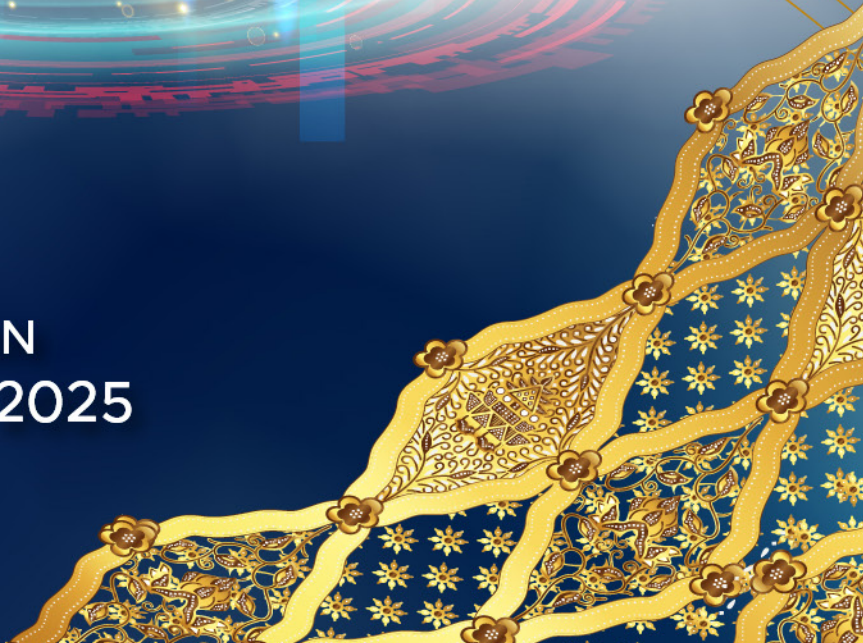


**TANGGUH DAN MANDIRI:
SINERGI MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH TINGGI
DAN BERDAYA TAHAN**



**PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2025**





DAFTAR ISI

I. Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pertumbuhan Melambat, Ketidakpastian Tinggi	6
II. Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Stabilitas Tetap Terjaga, Pertumbuhan Meningkat	17
III. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas	31
• Konsep Bauran Kebijakan Bank Indonesia	31
• Kebijakan Moneter	34
• Kebijakan Makroprudensial	38
• Kebijakan Sistem Pembayaran	43
• Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	48
• Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah	55
• Kebijakan Internasional	59
• Transformasi Bank Indonesia	61
IV. Bauran Kebijakan Transformasi Ekonomi Nasional: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan	65
• Sinergi Memperkuat Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan	68
• Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan	73
• Sinergi Meningkatkan Pembiayaan Perekonomian	78
• Sinergi Akselerasi Digitalisasi Ekonomi-Kuangan Nasional	80
• Sinergi Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Internasional	81
• Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Menengah	81
V. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2026: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas	84
• Arah Kebijakan Moneter	85
• Arah Kebijakan Makroprudensial	89
• Arah Kebijakan Sistem Pembayaran	94
• Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	100
• Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah	105
• Kebijakan Internasional	107
• Kebijakan Transformasi Kelembagaan	108
VI. Melangkah ke Depan: Sinergi Menuju Indonesia Emas	110

TANGGUH DAN MANDIRI: SINERGI MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN

Pidato Gubernur Bank Indonesia
PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA
Jakarta, 28 November 2025

Yang kami muliakan dan kami banggakan,

Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI,
- Para Pimpinan Lembaga Negara,
- Para Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat,
- Para Menteri Kabinet Merah Putih,
- Para Pendahulu kami sebagai Gubernur dan rekan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia,
- Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK dan LPS,
- Para Gubernur, Walikota, dan Bupati Kepala Daerah dari seluruh Indonesia,
- Para Pimpinan Perbankan, Korporasi, dan Media Nasional,
- Undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* (SWT), Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat bersilaturahmi dalam acara **Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025** pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan **terima kasih kepada Bapak Presiden** yang berkenan hadir beserta seluruh undangan sekalian, dan sekaligus memberikan arahan untuk memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan.

Kami sampaikan selamat kepada sejumlah 47 (empat puluh tujuh) penerima **Bank Indonesia Award 2025** dari perbankan, korporasi, dan perorangan dalam 5 (lima) area dan 19 (sembilan belas) kategori di bidang pengelolaan stabilitas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia. Pada tahun ini, Bank Indonesia juga menganugerahkan 3 (tiga) *Special Award* sebagai bentuk penghargaan kepada Mitra Strategis Bank Indonesia dalam menjaga nasionalisme dan kedaulatan Republik Indonesia serta mendukung semangat Asta Cita hingga ke pelosok negeri. Penghargaan **Bank Indonesia Award** yang dilakukan secara tahunan dan disatukan dengan acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, merupakan apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2025 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2026. Pemaparan ini kami rangkum dalam satu tema **"Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan"**.

Secara keseluruhan, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berkinerja baik, di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dengan stabilitas yang terjaga. Kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai salah satu kunci penting dalam mencapai kinerja perekonomian nasional itu. Sinergi bauran kebijakan itulah yang perlu terus dipererat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan menuju Indonesia Emas ke depan.

Secara rinci, pemaparan kami sampaikan dalam 5 (lima) bagian. *Pertama*, evaluasi kinerja dan prospek ekonomi global yang penuh dinamika, risiko dan ketidakpastian. *Kedua*, evaluasi kinerja dan prospek ekonomi nasional yang menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. *Ketiga*, laporan dan evaluasi bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Keempat*, sinergi bauran kebijakan ekonomi yang perlu ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan. *Kelima*, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. **Penjelasan ini sekaligus sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.**

I. Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pertumbuhan Melambat, Ketidakpastian Tinggi

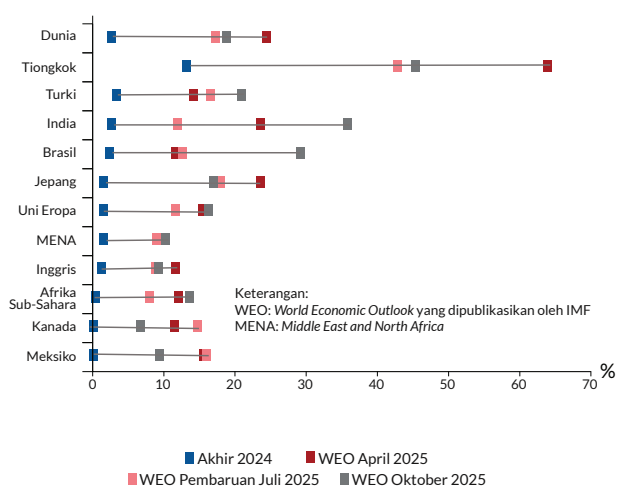
Dunia terus bergejolak dengan ketidakpastian yang tinggi. Ketegangan geopolitik dunia berlanjut dimana perang Rusia dan Ukraina di Eropa belum selesai dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas sejalan meningkatnya serangan Israel ke Palestina. Di bidang ekonomi, perang dagang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 dengan pengenaan tarif impor universal sebesar 10% atas semua barang yang masuk ke AS, ditambah dengan tarif resiprokal yang sangat tinggi kepada 57 negara mitra dagang termasuk Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa.

Pengenaan tarif impor sepihak oleh Trump ini dikenal dengan "*Liberation Day*" untuk perlindungan industri dan mengatasi defisit neraca perdagangan AS karena kurang berdaya saing dalam perdagangan multilateral. Kepada Tiongkok dikenakan tarif impor hingga efektif sebesar 54%, sementara kepada Kanada dan Meksiko tarif efektif hingga 25%. Bahkan negara-negara yang kecil pun dikenakan tarif tinggi, seperti Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Myanmar (44%) di Asia serta Lesotho (50%) dan Madagaskar (47%) di Afrika. Atas pengenaan tarif impor sepihak oleh AS tersebut, sejumlah negara besar seperti

Kanada, Tiongkok dan Uni Eropa mengumumkan tarif balasan dan karenanya perang dagang antarnegara semakin memanas. Sementara itu, negara-negara lain bernegosiasi untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah antara lain dengan komitmen untuk mengimpor barang yang lebih besar dari AS. Hasilnya tetap saja kebijakan tarif AS yang tinggi, khususnya terhadap Tiongkok, meskipun tidak setinggi ancaman Trump semula (Grafik 1.a). Lebih dari itu, perang dagang dan ketegangan geopolitik tersebut menyebabkan meningkat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, yang berdampak negatif pada keyakinan para pelaku bisnis dan investor di berbagai negara (Grafik 1.b).

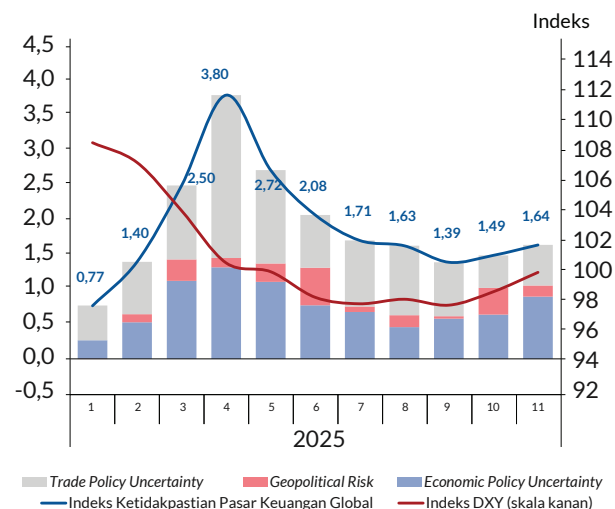
Kebijakan tarif sepihak AS dan ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan fragmentasi antarnegara yang semakin melebar. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global dan semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia dari ketegangan geopolitik yang telah terjadi sejak tahun 2024. Pertumbuhan impor wilayah Amerika Utara, misalnya, merosot dari 22,1% pada triwulan I-2025 menjadi hanya 0,7% dan 1,7% pada triwulan II dan III-2025. Pertumbuhan ekspor Asia dan Eropa yang meningkat pada triwulan II-2025 sebagai antisipasi dari pengenaan tarif AS, mulai menurun di triwulan III-2025. Dampak terhadap aktivitas ekonomi lebih terlihat pada memburuknya

Grafik 1.a. Kebijakan Tarif Efektif AS: Tiongkok, Meksiko, Jepang, Indonesia, Total



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 1.b. Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia: Negara Maju dan *Emerging Economies* (% , yoy)

	2023	2024	2025*	2026*	2027*
Dunia	3,5	3,3	3,1	3,0	3,1
Negara Maju	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,0	2,0	2,1
Kawasan Eropa	0,4	0,9	1,3	1,3	1,4
Jepang	1,2	0,1	1,0	0,5	0,5
Negara Berkembang	4,7	4,3	4,1	3,9	4,0
Tiongkok	5,4	5,0	4,8	4,2	4,0
India	8,7	6,5	6,6	6,4	6,7
ASEAN-5	4,1	4,6	4,4	4,3	4,5
Amerika Latin	2,4	2,4	1,9	2,2	2,6

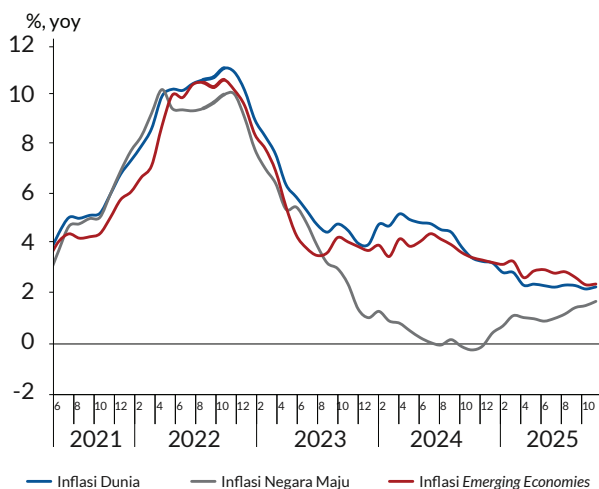
Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

sentimen, baik konsumen maupun produsen akibat ketidakpastian pendapatan dan usaha di berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025 dan 3,0% pada 2026 sebelum membaik menjadi 3,1% pada 2027 (Tabel 1). Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut, dengan ekonomi negara maju tumbuh melambat dari 1,8% pada 2024 menjadi 1,7% pada 2025 dan 1,6% pada 2026 sebelum membaik menjadi 1,8% pada 2027. Sementara pertumbuhan *Emerging Economies* turun menjadi 4,1% dan 3,9% pada 2025 dan 2026

sebelum membaik menjadi 4,0% pada 2027. Kebijakan tarif juga mendorong kenaikan harga emas yang tinggi, di samping kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan jasa-jasa memperburuk dampak kenaikan upah karena kebijakan imigrasi yang diterapkan di AS dan negara maju sebelumnya. Akibatnya, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya, dengan perkiraan mencapai 4,3% dan 4,1% pada 2025 dan 2026. Pada periode yang sama inflasi negara maju diperkirakan sekitar 2,4%, sementara inflasi *Emerging Economies* sekitar 5,5% dan 5,1% (Grafik 2).

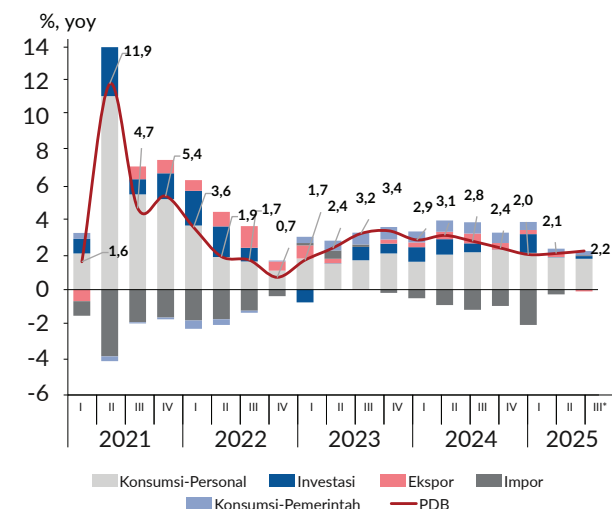
Grafik 2. Inflasi Dunia: Negara Maju dan *Emerging Economies*



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

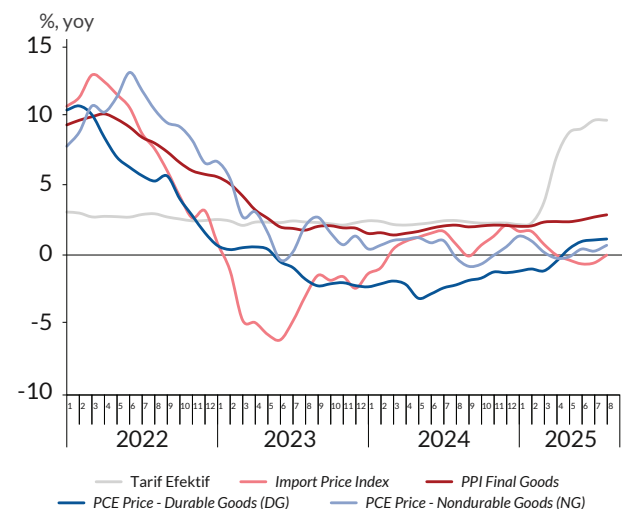
Di negara maju, ekonomi AS melambat sementara pemulihan ekonomi Uni Eropa masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan menurun dari 2,8% dan stagnan pada 2,0% pada 2025 dan 2026, sebelum membaik ke 2,1% pada 2027 dengan asumsi tidak terjadi peningkatan tarif. Kebijakan tarif sepihak yang diterapkan AS memang mampu menurunkan impor tetapi juga tidak mampu mendorong ekspor dan karenanya menyebabkan tekanan pertumbuhan dari sisi eksternal (Grafik 3.a). Sementara itu, kelemahan daya saing industri AS, kecuali teknologi digital dan militer, menyebabkan melemahnya investasi sehingga memperburuk kontribusi permintaan domestik dalam pertumbuhan di tengah melemahnya konsumsi karena kondisi ketenagakerjaan dan tingginya inflasi (Grafik 3.b). Kebijakan fiskal juga semakin terbatas dengan

Grafik 3.a. Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat (AS)



Keterangan: *) Nowcasting triwulan III-2025 per 14 November 2025
Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 3.b. Inflasi Amerika Serikat (AS)

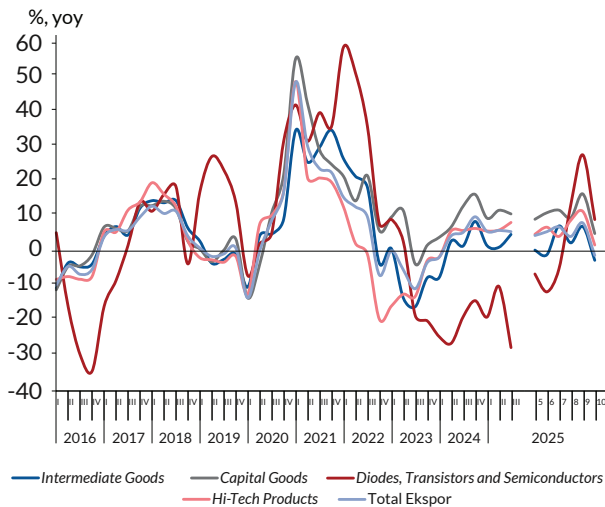


Keterangan: Producer Price Index (PPI), Personal Consumption Expenditure (PCE)
Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

tingginya defisit fiskal dan utang Pemerintah AS di tengah berhentinya aktivitas Pemerintah (*government shutdown*), akibat belum dicapainya kesepakatan politik. Kebijakan tarif juga memperlambat penurunan inflasi yang diperkirakan sebesar 2,9% pada 2025 dan 3,0% pada 2026 dan karenanya memperlambat ruang gerak penurunan Fed Funds Rate (FFR) dari 4,5% pada 2024 menjadi 4,0% dewasa ini. The Fed diperkirakan akan menahan penurunan FFR lebih lanjut di sisa tahun 2025 dan baru akan kembali melanjutkan penurunan pada tahun 2026. Sementara itu, pemulihan ekonomi Uni Eropa terus berlangsung, dengan pertumbuhan meningkat dari 0,9% tahun 2024 menjadi 1,3% pada tahun 2025 dan 2026, serta menjadi 1,4% pada 2027, didukung oleh perbaikan konsumsi seiring pelonggaran kebijakan moneter dan stimulus fiskal, dan 'front-loading' ekspor sebagai antisipasi kesepakatan perdagangan dengan AS. Inflasi Uni Eropa terus menurun dari 2,4% pada 2024 menjadi 2,0% dan 1,9% pada 2025 dan 2026 sehingga memungkinkan penurunan suku bunga European Central Bank (ECB) lebih awal dan lebih besar dari FFR yaitu dari 3,0% pada 2024 menjadi 2,0% pada 2025. Di Jepang, pertumbuhan ekonomi yang pada 2025 meningkat menjadi 1,0% didukung berlanjutnya perbaikan upah, diperkirakan akan menurun menjadi 0,5% pada 2026 dan 2027 karena masalah struktural 'ageing population' di tengah masih tingginya inflasi serta melemahnya ekspor karena dampak kebijakan tarif AS.

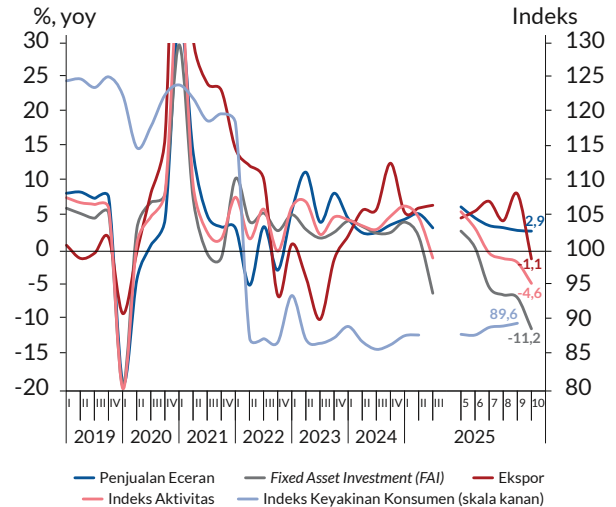
Di negara *Emerging Market Economies* (EMEs), dampak kebijakan tarif AS terhadap perlambatan ekonomi terutama terjadi di Tiongkok dan Amerika Latin, sementara kinerja ekonomi India dan ASEAN+5 cukup berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 5,0% pada 2024 menjadi 4,8% pada 2025 dan diperkirakan akan menurun lagi ke 4,2% dan 4,0% pada 2026 dan 2027. Tingginya kebijakan tarif AS berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekspor Tiongkok, kecuali komoditas berbasis teknologi informasi sejalan dengan kuatnya adopsi teknologi dan *Artificial Intelligence* (AI) dan didukung oleh stimulus dari Pemerintah (Grafik 4.a). Sejauh ini belum ada indikasi terjadinya pengalihan perdagangan (*trade diversion*) yang besar dari Tiongkok ke negara-negara lain, termasuk ASEAN. Konsumsi domestik Tiongkok juga masih lemah dan diperkirakan akan berlanjut ke depan di tengah besarnya stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif (Grafik 4.b). Sementara itu, ekonomi India cukup berdaya tahan dengan pertumbuhan mencapai 6,6% pada 2025 dan tetap tinggi sekitar 6,4% dan 6,7% pada 2026 dan 2027. Prospek pertumbuhan India ditopang oleh berlanjutnya perbaikan konsumsi domestik dan berlanjutnya ekspansi manufaktur, didukung oleh belanja fiskal meskipun dengan kecenderungan menurun seiring konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah. Kinerja ekonomi ASEAN-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina) juga menunjukkan daya tahan,

Grafik 4.a. Tiongkok: Ekspor Berdasarkan Kelompok Barang



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 4.b. Tiongkok: Indikator Permintaan Domestik



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

dengan pertumbuhan diperkirakan sedikit menurun dari 4,6% pada 2024 menjadi 4,4% dan 4,3% pada 2025 dan 2026 sebelum meningkat kembali ke 4,5% pada 2027. Inflasi di ASEAN-5 secara keseluruhan juga terjaga rendah di sekitar 2,7% pada 2025-2027.

Kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik dunia serta dampaknya terhadap fragmentasi dan tertundanya penurunan inflasi menempatkan bank-bank sentral pada pilihan yang lebih sulit dalam kebijakan moneter, meskipun secara umum arah kebijakan moneter tetap akomodatif di sepanjang

tahun 2025. Ketidakpastian ekonomi dunia ini mendorong bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya (Tabel 2). Bank Sentral AS, the Fed, misalnya yang mulai menurunkan FFR menjadi 4,50% pada September 2024, lebih memilih menunda penurunan hingga September 2025 menjadi 4,25% dan Oktober 2025 menjadi 4,00%. Di sisi lain, European Central Bank (ECB) tetap menurunkan suku bunga kebijakan moneter dari 3,00% pada Desember 2024 menjadi 2,50% pada triwulan I-2025 dan 2,00% pada triwulan II-2025.

Tabel 2. Suku Bunga Kebijakan Moneter: Negara Maju dan *Emerging Economies* (%)

	2024	2025		
		Tw 1	Tw 2	Tw 3
Negara Maju				
Federal Reserve (FED)	4,50	4,50	4,50	4,25
European Central Bank (ECB)	3,00	2,50	2,00	2,00
Bank of England (BOE)	4,75	4,50	4,25	4,00
Bank of Japan (BOJ)	0,25	0,50	0,50	0,50
Negara Berkembang				
People's Bank of China (PBOC)	1,50	1,50	1,40	1,30
Bank of Korea (BOK)	3,00	2,75	2,50	2,50
Reserve Bank of India (RBI)	6,50	6,25	5,50	5,50
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)	5,75	5,75	5,25	5,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 5. Suku bunga FFR vs Yield US Treasury Tenor 2 dan 10 Tahun



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

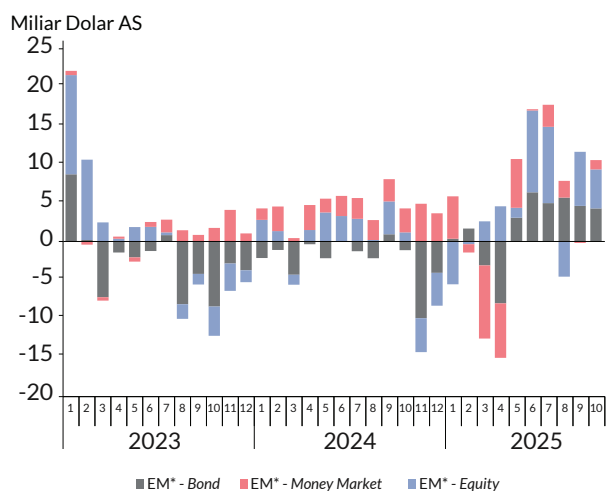
Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan moneter juga terjadi di *Emerging Economies*, seperti di Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Secara umum bank-bank sentral *Emerging Economies* harus mempertimbangkan dampak negatif ketidakpastian global tersebut dalam mencapai sasaran inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hal ini mengingat tertundanya penurunan FFR serta tingginya defisit fiskal dan utang Pemerintah AS berdampak besar terhadap aliran modal asing dan nilai tukar di negara-negara *Emerging Economies*. Untuk diketahui, defisit fiskal dan utang Pemerintah AS pada

Oktober 2025 diperkirakan masing-masing sekitar 6,25% dari PDB dan 38,3 triliun dolar AS, termasuk salah satu terbesar di dunia. Karenanya, meskipun *yield* US-Treasury untuk tenor 2 tahun menurun menjadi 3,58% pada 18 November 2025 dengan penurunan FFR tersebut, *yield* US-Treasury tenor 10 tahun tetap tinggi sekitar 4,12% sejalan dengan tingginya defisit fiskal dan utang Pemerintah AS (Grafik 5).

Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat tinggi dengan aliran modal keluar dari *Emerging Market* bergeser ke aset yang dianggap aman (*safe haven assets*), khususnya obligasi AS dan emas.

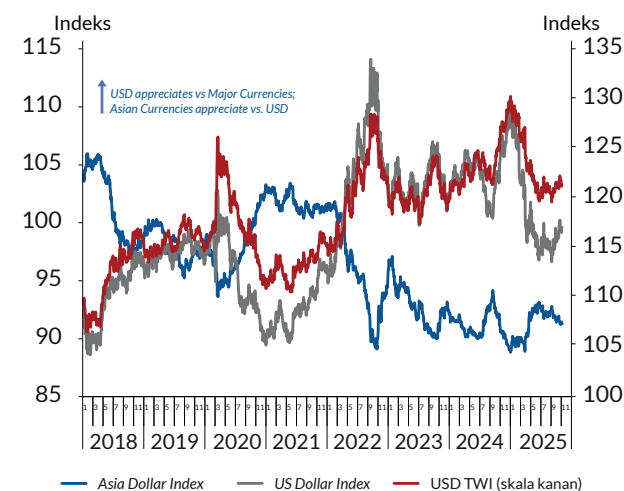
Penurunan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral, termasuk penurunan FFR, seharusnya dapat mendorong stabilitas pasar keuangan global. Akan tetapi, kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia meningkatkan premi risiko di pasar keuangan global dan mendorong investor memindahkan portofolio ke aset investasi yang dianggap aman. Akibatnya, terjadi aliran portofolio asing keluar dari EMEs dalam jumlah besar pada triwulan II-2025, khususnya dalam bentuk obligasi dan pasar uang (Grafik 6.a). Dengan perundingan tarif dan kejelasan penurunan suku bunga FFR, aliran portofolio kembali masuk ke sejak triwulan III-2025 terutama ke negara-negara EMEs yang menawarkan imbal hasil yang menarik dibandingkan dengan AS dan memiliki stabilitas makroekonomi dan sistem

Grafik 6.a. Aliran Modal Asing ke *Emerging Economies*: Obligasi, Saham, Pasar Uang



Keterangan: *) Tidak termasuk Tiongkok
Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 6.b. Indeks Nilai Tukar Dolar AS vs Negara Maju dan Negara Asia



Keterangan: Trade-Weighted Index (TWI)
Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

keuangan yang terjaga. Di pasar valuta asing, nilai tukar dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang utama dunia, seperti Euro dan Pound sterling, namun tetap dengan volatilitas tinggi terhadap mata uang Asia (Grafik 6.b). Hal ini mencerminkan perbedaan imbal hasil antarnegara tetap tinggi sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter yang dijelaskan di atas. Secara keseluruhan, tetap tingginya volatilitas aliran modal dan nilai tukar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara EMEs untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dalam memperkuat ketahanan eksternalnya, untuk mendorong ekonomi dalam negeri.

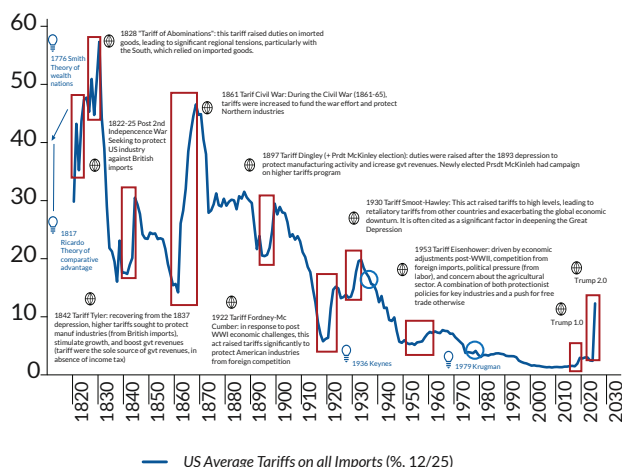
Ke depan, perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai oleh berlanjutnya perang dagang dan ketegangan geopolitik antarnegara dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Meskipun tarif yang kemudian dikenakan AS tidak sebesar ancaman awal Presiden Trump pada 2 April 2025, negosiasi tarif bilateral antara AS dengan Tiongkok dan negara-negara lain mungkin saja akan terus berlangsung hingga Pemerintah AS merasa puas dengan hasilnya berupa penurunan defisit neraca perdagangan. Pemerintahan baru hasil pemilihan umum tahun 2024-2025 juga cenderung lebih populis, baik dengan pengeluaran fiskal dan utang publik yang besar maupun kebijakan lainnya untuk mempertahankan popularitas. Semakin maraknya transaksi dan produk-produk derivatif dari utang publik negara maju oleh lembaga keuangan bukan bank (*Non-Bank Financial Institutions*, NBFIs) yang belum ketat pengaturan dan pengawasannya diperkirakan akan menimbulkan risiko dan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global. Dalam waktu yang sama, begitu cepatnya revolusi teknologi digital termasuk penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di bidang keuangan, termasuk perdagangan mata uang kripto (*cryptocurrencies*), *stablecoins*, dan produk aset digital lainnya oleh pihak swasta, semakin meningkatkan risiko dan volatilitas pasar keuangan global serta kemampuan otoritas negara, termasuk bank sentral, dalam pengendaliannya.

Berbagai faktor berikut ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, dapat berpengaruh

besar terhadap prospek dan risiko memburuknya perekonomian global ke depan. Setidaknya ada 5 (lima) kecenderungan yang perlu diwaspadai.

- i. **Pertama, berlanjutnya perang dan polarisasi perdagangan dan investasi antarnegara dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global.** Kebijakan tarif sepihak bukanlah yang pertama kali ditempuh Pemerintah AS dalam mengatasi besarnya defisit neraca perdagangan akibat kurang mampunya daya saing ekonominya (Grafik 7.a). Bahkan sebelum Perang Dunia II, kenaikan tarif yang tinggi diterapkan pada tahun 1919-1923 dengan Fordney-McCumber Tariff Act untuk melindungi sektor pertanian dan industri AS. Kemudian pada tahun 1934, Pemerintah AS memperkenalkan kebijakan tarif resiprokal yang berbeda-beda kepada negara mitra dagang melalui konsep *Most Favored Nations* (MFNs). Setelah Perang Dunia II, tarif menurun drastis dengan pembentukan GATT untuk liberasi perdagangan global. Akan tetapi membengkaknya defisit neraca perdagangan pada dekade 1980an mendorong munculnya kembali kebijakan proteksionis AS, termasuk pengenaan tarif terhadap impor baja oleh Pemerintahan Bush pada tahun 2002-2003. Pada tahun 2018, Pemerintahan Trump mengenakan tarif baru atas sejumlah komoditas seperti besi baja dan aluminium yang kemudian memicu retaliasi dari Pemerintah Tiongkok. Kemudian kembalinya pemerintahan Trump pada tahun 2025, kebijakan tarif resiprokal kembali diterapkan sebagai yang tertinggi sejak tahun 1934 untuk mengatasi defisit neraca perdagangannya yang membengkak sejak tahun 2020 (Grafik 7.b). Sejarah ini menunjukkan bahwa perang dagang yang dilancarkan Pemerintah AS akan terus berlanjut sebagai kebijakan politik dan ekonomi terhadap mitra dagang yang mengalami surplus neraca perdagangan, meskipun mendapat tentangan dalam kerja sama multilateral antarnegara. Dengan kata lain, polarisasi perdagangan akan terjadi ke depan yang mendorong negara-negara lain lebih mengutamakan kerja sama bilateral

**Grafik 7.a. Sejarah Kebijakan Proteksionisme AS:
Dari Politik ke Ekonomi**

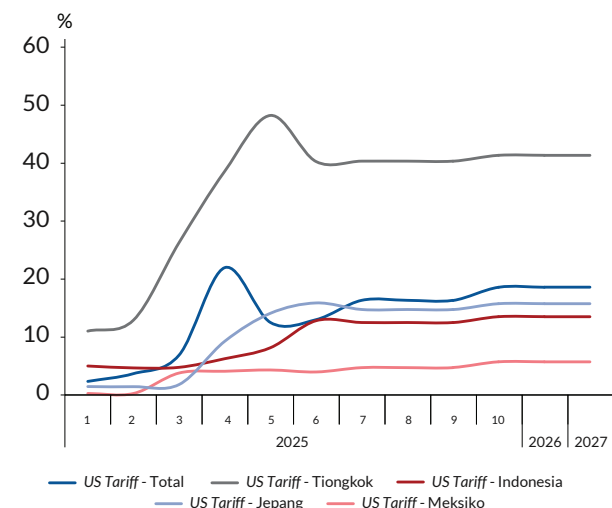


Sumber: SUERF Policy Brief No. 1260, September 2025

dan regional daripada kerja sama multilateral di bawah World Trade Organization (WTO).

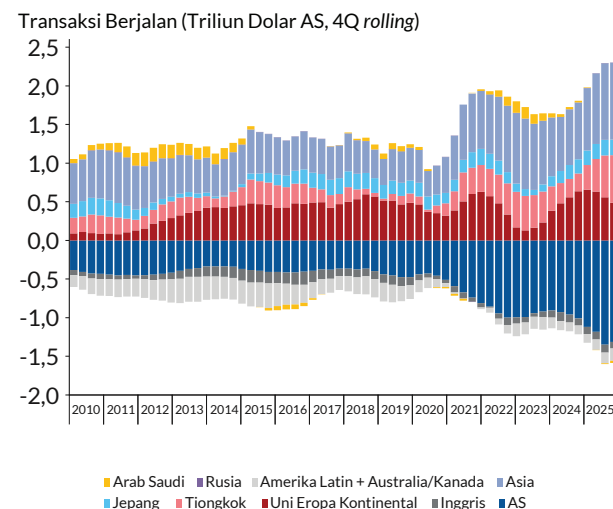
- ii. **Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat dengan fragmentasi antarnegara yang melebar.** Mencermati sejarah panjang kebijakan proteksionis Pemerintah AS dalam mengatasi besarnya defisit neraca perdagangannya, tidaklah berlebihan kalau kebijakan tarif tinggi dan proses negosiasi bilateral akan terus berlanjut ke depan. Tiongkok diperkirakan akan dikenakan tarif oleh Pemerintah AS yang tinggi hingga surplus

Grafik 8.a. Kebijakan Tarif Resiprokal AS Berlanjut terhadap Tiongkok dan Negara lainnya



Sumber: Perkiraan Bank Indonesia

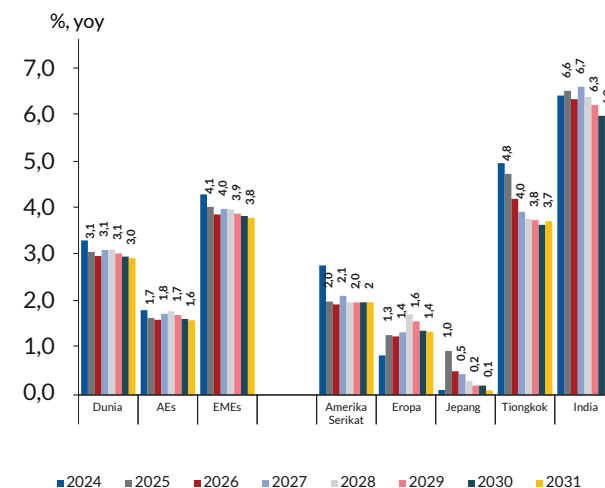
Grafik 7.b. Ekonomi AS dan Ketidakseimbangan Perdagangan Global



Sumber: CEIC

neraca perdagangannya dengan AS menurun, di samping pertimbangan politik persaingan antarnegara besar dunia (Grafik 8.a). Hambatan mata rantai pasok akan terus terganggu dengan menurunnya volume perdagangan dunia dari sekitar 3,6% pada tahun 2025 menjadi 2,3% pada 2026. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan stagnan di sekitar 3%, dengan risiko lebih rendah apabila perang dagang yang dilancarkan AS berlanjut (Grafik 8.b). Ekonomi AS diperkirakan akan stagnan dengan pertumbuhan di sekitar 2% dan risiko resesi yang meningkat akibat lemahnya daya saing industri

Grafik 8.b. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global dan Fragmentasi Antarnegara

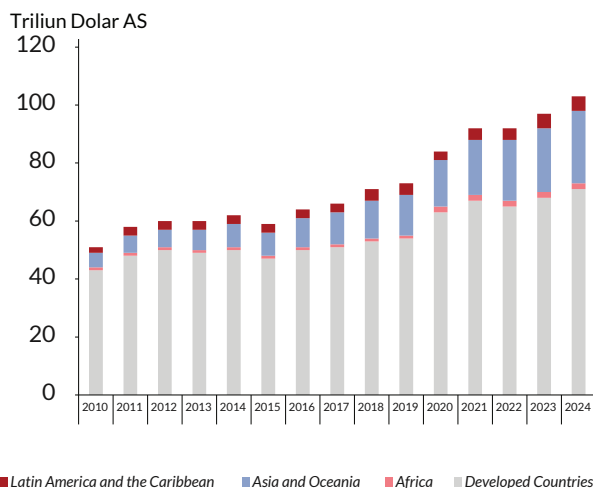


Sumber: Perkiraan Bank Indonesia

dan konsumsi rumah tangga akibat dampak kebijakan imigrasi terhadap ketenagakerjaan dan masih tingginya tekanan inflasi karena kebijakan tarif impor. Ekonomi Tiongkok yang paling terkena kebijakan tarif tinggi dengan pertumbuhan ekonomi akan terus menurun ke sekitar 3,7% ke depan, meskipun kecepatan pengalihan perdagangan (*trade diversion*) dari Tiongkok ke negara lain selain AS dapat saja menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Ekonomi India diperkirakan dapat tumbuh tetap tinggi di sekitar 6% ke depan dengan dukungan kuatnya permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga. Sementara itu, tekanan inflasi dunia dan di berbagai negara diperkirakan masih akan tinggi karena tetap tingginya harga komoditas nonmigas sebagai dampak pengenaan tarif impor yang tinggi dan terganggunya mata rantai perdagangan dunia. Kondisi ini akan membatasi ruang gerak penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut di banyak negara mulai tahun 2026 mendatang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi domestiknya. Karenanya, dorongan pertumbuhan ekonomi akan banyak tergantung dari implementasi kebijakan reformasi struktural dan industri untuk menggerakkan sektor riil, didukung dengan perluasan kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional.

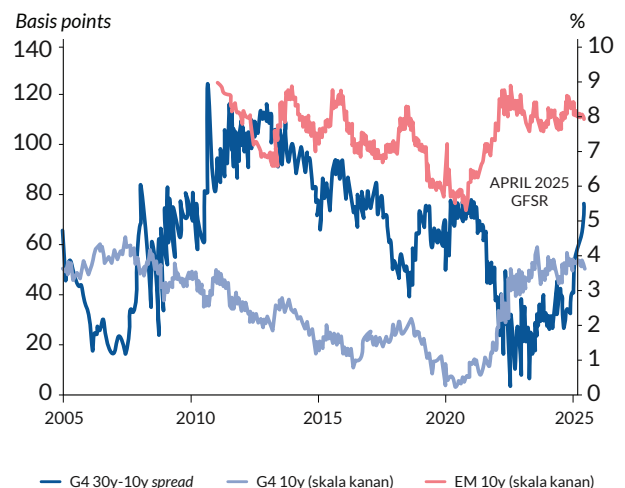
iii. **Ketiga, membengkak tingginya utang publik dunia dengan beban yang semakin berat, baik di negara maju maupun *Emerging Economies*.** Total utang Pemerintah dunia kini telah menembus 110,9 triliun dolar AS (94,6% PDB), dengan dua pertiganya atau sebesar 74,8 triliun dolar AS di negara maju (Grafik 9.a). Angka fantastis ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus ekonomi selama dekade terakhir mengakibatkan beban berat di banyak negara. AS dan Tiongkok merupakan dua negara dengan jumlah utang besar, yang kalau digabung lebih dari separuh utang dunia. Total utang Pemerintah AS mencapai 38,3 triliun dolar AS (125% PDB), atau lebih dari sepertiga dari utang global, sementara Tiongkok menempati urutan kedua dengan utang sebesar 18,7 triliun dolar AS (96% PDB). Jepang di urutan ketiga dengan utang 9,8 triliun dolar AS (230% PDB), disusul Inggris (4,1 triliun dolar AS, 103% PDB) dan Perancis (3,9 triliun dolar AS, 117% PDB). Tingginya utang Pemerintah tersebut diakibatkan oleh pembiayaan sosial jangka panjang, peningkatan anggaran pertahanan, serta biaya demografi menua yang semakin berat. Masalahnya, membengkaknya utang Pemerintah tersebut telah mengakibatkan tingginya suku bunga global dan menjadi beban tidak saja bagi negara maju tetapi juga bagi *Emerging Market* dan negara berkembang. *Yield* obligasi tenor 10 tahun

Grafik 9.a. Utang Publik Global: Negara Maju dan *Emerging and Developing Economies*



Sumber: UNCTAD, A World of Debt, Report 2025

Grafik 9.b. Suku Bunga Utang Publik: Negara Maju dan *Emerging Economies*



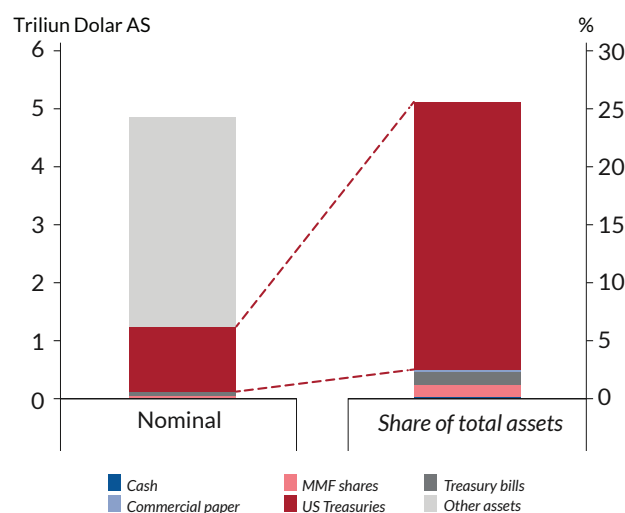
Sumber: IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2025

dari 4 negara maju (AS, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang), misalnya, meningkat dari sekitar 0% pada waktu COVID-19 menjadi sekitar 4% dengan *spread yield* tenor 30 tahun meningkat menjadi hampir 80 bps dewasa ini (Grafik 9.b). Akibatnya, *yield* obligasi Pemerintah EMEs meningkat tinggi dari sekitar 5% pada tahun 2020 menjadi sekitar 8% dewasa ini. Ini berarti bahwa negara EMEs harus mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% secara nominal agar mampu membayar kembali beban utang Pemerintah tersebut. Dampak yang lebih serius terhadap negara-negara berkembang khususnya di Afrika yang beban utang Pemerintah lebih besar dari alokasi anggaran untuk program pendidikan dan kesehatan sehingga semakin menjadi miskin.

- iv. **Keempat, pasar keuangan global memendam kerentanan dan risiko yang tinggi khususnya dari lembaga keuangan nonbank.** Krisis keuangan global mengingatkan bahaya produk-produk derivatif oleh *Non-Bank Financial Institutions* (NBFIs) atas utang perumahan, yang dikenal dengan *sub-prime mortgage crisis*, yang kemudian mengakibatkan krisis sistemik secara global. Sejak saat itu penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sektor perbankan telah mencapai banyak kemajuan dengan peningkatan modal, manajemen risiko, hingga kerja sama antarnegara

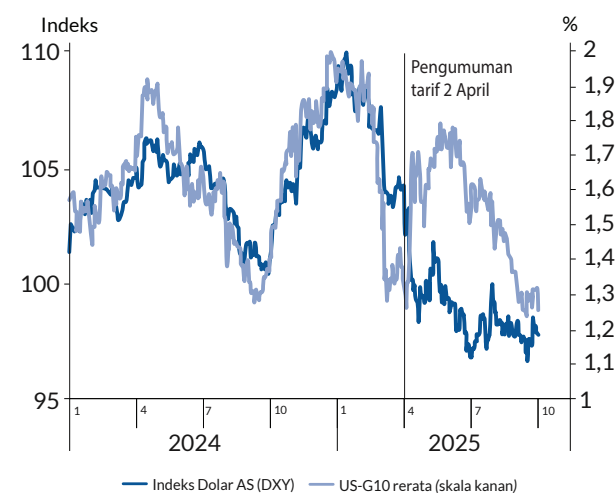
di bawah Financial Stability Board (FSB) dan Bank for International Settlement (BIS). Akan tetapi inisiatif global untuk penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap NBFIs masih dalam proses dan belum mencapai kesepakatan global, di samping kesulitan dalam monitoring data transaksi maupun kelembagaan. Sementara itu, pengembangan produk dan transaksi derivatif oleh NBFIs meningkat sangat pesat yang kali ini memanfaatkan sangat besarnya utang Pemerintah negara maju sebagai transaksi yang mendasarinya (*underlying transactions*). Sebagai contoh, NBFIs di AS dewasa ini diperkirakan memegang sekitar 5 triliun dolar AS obligasi sebagai *underlying transactions* produk-produk derivatifnya, dimana sepertiganya merupakan utang Pemerintah AS (Grafik 10.a). Produk-produk derivatif itu mencakup berbagai ragam dari *repurchase agreements* (*repo*), *swap* suku bunga, *option*, dan lain sebagainya, yang hingga kini belum ada pengaturan untuk sistem margin atau besarnya kelipatan nilai transaksi dari nilai obligasi yang mendasarinya, ataupun keharusan peningkatan modal sesuai dengan nilai transaksi bagi NBFIs. Lebih jauh lagi, berbagai ragam produk derivatif itu dikombinasikan dengan produk-produk lindung nilai dari risiko nilai tukar terhadap dolar AS, seperti *swap* valuta asing, *forward*, dan *option*. Inilah yang menjelaskan kenapa dolar AS tetap mengalami apresiasi dan tidak menjelaskan perbedaan suku

Grafik 10.a. Kepemilikan Obligasi oleh Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFIs) di AS



Sumber: IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2025

Grafik 10.b. Indeks Dolar AS vs Perbedaan Suku Bunga Negara Maju



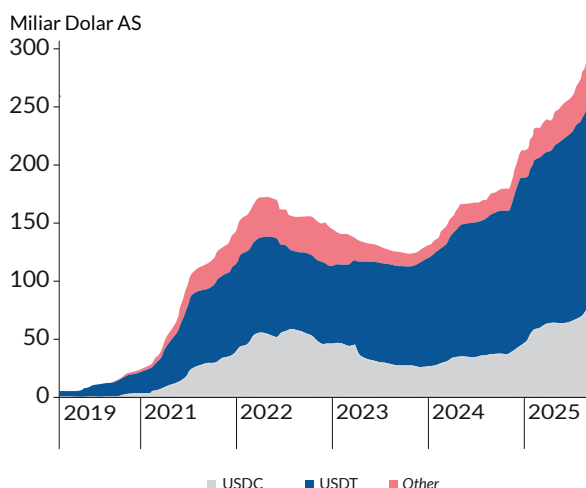
Sumber: IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2025

bunga di AS dengan negara-negara maju lainnya (Grafik 10.b). Karenanya, pelipatan transaksi derivatif oleh NBFIs tersebut mengandung kerentanan dan risiko yang tinggi apabila terjadi pembalikan kondisi pasar yang dapat mengakibatkan penjualan besar-besaran (*fire sales*) karena kepanikan pelaku pasar, suatu kondisi yang pernah terjadi pada waktu krisis keuangan global tahun 2008.

- v. **Kelima, kerentanan dan risiko pasar keuangan global semakin tinggi sejalan dengan maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang dan aset digital oleh pihak swasta.** Seperti diketahui, mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital yang diterbitkan dan diedarkan oleh swasta melalui jaringan komputer, yang tidak bergantung pada otoritas pusat mana pun, apakah Pemerintah dan/atau bank sentral. Perdagangan kripto pertama kali adalah *bitcoin* sejak tahun 2009 yang kemudian hingga Juni 2023 muncullah lebih dari 25.000 kripto di pasar, dengan sekitar 40 di antaranya memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar AS. Hingga April 2025, kapitalisasi perdagangan kripto di seluruh dunia diperkirakan mencapai 2,70 triliun dolar AS. Pada tahun 2014 muncullah *stablecoin* sebagai suatu tipe kripto yang berupaya menjaga stabilitas nilainya terhadap aset tertentu atau suatu sekeranjang

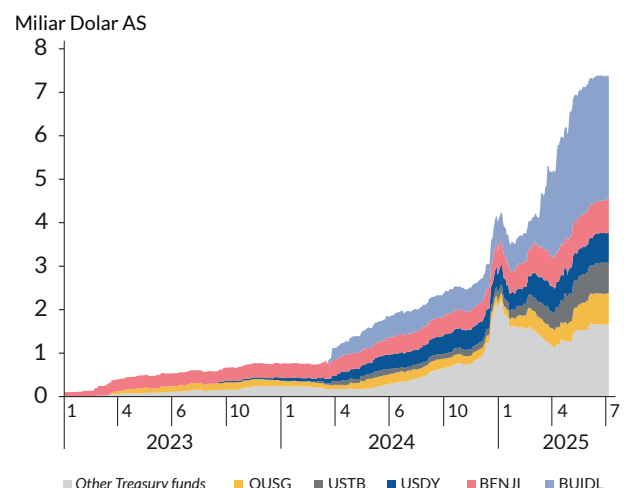
aset tertentu, yang bisa berupa mata uang, obligasi, komoditas, atau uang kripto lainnya. Meskipun demikian, nilai dari *stablecoin* tidak selalu stabil karena tergantung dari instrumen stabilisasinya, yang dapat berupa algoritma dalam komputer dan/atau nilai aset yang mendasarinya. Hingga Juni 2025 nilai kapitalisasi perdagangan *stablecoin* diperkirakan mencapai lebih dari 255 miliar dolar AS, yang sebagian besar dikaitkan dengan mata uang dolar AS (USDC) dan/atau obligasi Pemerintah AS (USDT), seperti pada Grafik 11.a. Kemudian di pasar keuangan global diperdagangkan pula tokenisasi aset secara digital yang memungkinkan kepemilikan dan transaksi jual-beli. *Stablecoin* tidak hanya dalam bentuk tokenisasi aset digital, tetapi juga dalam bentuk tokenisasi aset berwujud atau tidak berwujud lainnya. Sebagai contoh, perdagangan tokenisasi dana obligasi Pemerintah AS berkembang sangat pesat dan diperkirakan mencapai sekitar 7,4 miliar dolar AS (Grafik 11.b). Semakin maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto, *stablecoin*, dan tokenisasi oleh swasta di platform digital, semakin meningkatkan kerentanan dan risiko di pasar keuangan global. Berbeda dengan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang diterbitkan secara formal oleh bank sentral, berbagai bentuk mata uang dan aset keuangan kripto tersebut diterbitkan dan diperdagangkan oleh pihak swasta. Hingga kini belum ada pengaturan dan pengawasan

Grafik 11.a. Nilai Kapitalisasi Pasar *Stablecoin*



Sumber: IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2025

Grafik 11.b. Tokenisasi Dana Obligasi AS



Sumber: IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2025

yang jelas dan setara dengan lembaga keuangan lainnya dengan prinsip: “*same activities, same risks, same regulations*”. Lebih dari itu, ditengarai peredaran berbagai uang dan aset digital tersebut sebagai wadah untuk pencucian uang, di samping pentingnya perlindungan konsumen.

Dinamika, prospek dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara EMEs, termasuk Indonesia, dan karenanya perlu direspons dengan bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal. Satu pelajaran sangat penting dalam menghadapi perekonomian global yang penuh gejolak geopolitik, kebijakan proteksionis, dan volatilitas pasar keuangan tersebut adalah: **TANGGUH DAN MANDIRI**. Tangguh dengan memperkuat ketahanan eksternal dalam menghadapi dampak negatif gejolak global tersebut. Mandiri dengan terus mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Setidaknya ada 5 (lima) aspek penting yang perlu dipertimbangkan agar perekonomian nasional dapat tangguh dan mandiri dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

- i. *Pertama*, pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan nilai tukar yang stabil, inflasi rendah, defisit fiskal terkendali, sistem perbankan yang kuat dengan pasar keuangan yang dalam. Koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan moneter bank sentral sangatlah penting, demikian pula koordinasi untuk stabilitas sistem keuangan. Perlu disadari bahwa sebagian besar krisis yang dialami suatu negara, termasuk Indonesia di masa lalu, bermula dari ketidakstabilan ekonomi, khususnya nilai tukar.
- ii. *Kedua*, perlunya mempercepat transformasi sektor riil dengan kebijakan industrial dan struktural untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri yang lebih tinggi. Di samping terus mendorong konsumsi dan investasi domestik, sangat penting pula untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai pilar

penting ketangguhan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Sementara kebijakan struktural diarahkan untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis yang mampu merangsang bergairahnya penanaman modal dan perdagangan di dalam negeri maupun dengan negara lain.

- iii. *Ketiga*, perlunya terus mengembangkan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung program transformasi sektor riil tersebut. Pembiayaan dengan defisit fiskal Pemerintah perlu dijaga kesinambungannya agar tidak terjebak pada ketergantungan terhadap utang publik yang akhirnya memberatkan beban negara dan rakyat. Karenanya, pembiayaan swasta baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya maupun penanaman modal dari dalam dan luar negeri perlu terus ditingkatkan. Pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar.
- iv. *Keempat*, digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel sangat penting untuk kemudahan bertransaksi sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang sangat murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) perlu terus dikembangkan, termasuk eksperimentasi penerbitan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dan Aset Keuangan Digital (tokenisasi aset). Kerja sama antarnegara dalam sistem pembayaran digital, termasuk konektivitas infrastruktur pembayaran (ritel dan *wholesale*), perlu terus dijalin dan diperluas.

- v. *Kelima*, peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama. Dalam dunia yang diwarnai kebijakan proteksionis AS dan polarisasi ekonomi antarnegara, kerja sama perdagangan dan investasi perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, dengan tetap menyuarakan kerja sama multilateral. Dalam hal ini termasuk kerja sama dalam memperluas penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT), pendalaman pasar keuangan, serta kerja sama sistem pembayaran digital antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

II. Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Stabilitas Tetap Terjaga, Pertumbuhan Meningkat

Ekonomi Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. *Pertama*, ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dengan stabilitas makroekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan pertumbuhan yang tetap tinggi. Pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 terus berlangsung dan semakin kuat. *Kedua*, koordinasi kebijakan yang kuat dan dengan berhati-hati, khususnya antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia mampu mendorong

permintaan domestik dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. *Ketiga*, Indonesia juga terus memperkuat komitmen dalam melakukan transformasi ekonomi, melalui perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Perbaikan sektor-sektor ekonomi terus berlangsung dan memperkuat sisi penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan *keempat*, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang kuat di berbagai forum internasional, termasuk dalam sejumlah kerja sama dan lembaga internasional. Keberhasilan Ketekuaan Indonesia pada G20 tahun 2022 diakui dunia dengan mendorong sejumlah agenda penting, termasuk penguatan koordinasi kebijakan fiskal-moneter global, kerja sama kesehatan, penyelesaian utang negara miskin, dan kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara. Di kawasan ASEAN, Ketekuaan Indonesia tahun 2023 menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan integrasi kawasan.

Selama enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia mencatat kinerja yang kuat, termasuk salah satu yang terbaik di antara negara EMEs. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2019 secara konsisten bertahan di atas 5%, kecuali pada masa pandemi COVID-19 (Tabel 3). Bahkan, kontraksi ekonomi akibat pandemi termasuk yang paling

Tabel 3. Kinerja Ekonomi Indonesia: 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	%yoy	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05*	5,03**
Transaksi Berjalan	%PDB	-2,71	-0,42	0,30	1,00	-0,15	-0,62*
Defisit Fiskal	%PDB	-2,20	-6,14	-4,57	-2,35	-1,61	-2,30
Inflasi IHK	%yoy	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Nilai Tukar Rupiah	IDR/USD (rerata)	14.139	14.525	14.296	14.873	15.247	15.841
Suku Bunga BI-Rate	%	5,00	3,75	3,50	5,50	6,00	6,00
Kredit Perbankan	%yoy	6,08	-2,41	5,24	11,35	10,38	10,39
Modal Perbankan (CAR)	%	23,31	23,81	25,67	25,63	27,66	26,65

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

ringan dibandingkan dengan negara-negara lain. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pun tetap terjaga dengan baik. Inflasi tetap terkendali rendah, dengan rerata di bawah 3% selama periode 2019-2024, dan nilai tukar Rupiah terjaga stabil, dengan komitmen yang tinggi kebijakan moneter Bank Indonesia. Defisit fiskal terjaga rendah di bawah 3% dari PDB, kecuali pada periode puncak COVID-19 tahun 2020 dan 2021 yang kemudian secara cepat kembali berhati-hati dengan konsolidasi fiskal Pemerintah. Kinerja eksternal juga terjaga baik, dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dan bahkan mencatat surplus pada 2021 dan 2022, didukung penguatan kinerja ekspor seiring keberhasilan hilirisasi sumber daya alam. Demikian pula, stabilitas sistem keuangan terjaga dengan kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) perbankan yang tinggi di atas 20%. Pertumbuhan kredit yang solid turut mendukung pembiayaan sektor produktif dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga disertai dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat dan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia mendukung kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya tahan. Kebijakan fiskal Pemerintah yang berhati-hati dengan defisit di bawah 3% PDB ditempuh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial untuk menopang konsumsi masyarakat. Sementara itu, bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh secara optimal untuk stabilitas dan pertumbuhan, dengan kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan, dan kebijakan sistem pembayaran untuk digitalisasi ekonomi-keuangan nasional yang inklusif dan efisien. Berbagai kebijakan transformasi struktural juga terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor, termasuk transportasi, perairan, perumahan,

dan telekomunikasi. Reformasi kelembagaan dan regulasi ditempuh melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat ketahanan, perluasan jasa keuangan, dan efisiensi sistem keuangan nasional. Ke depan, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat dan diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kinerja positif ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2025, dan diperkirakan akan lebih tinggi pada 2026 dan 2027. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II dan III 2025 lebih baik dari prakiraan, yaitu sebesar 5,12% (yoy) dan 5,04% (yoy), lebih tinggi dari 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025 (Tabel 4). Kinerja ekspor nonmigas meningkat dipengaruhi *front-loading* ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur, khususnya komoditas minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*, CPO) ke India seiring penurunan bea impor. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh permintaan domestik, khususnya investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring tingginya mobilitas masyarakat, meskipun perlu terus diperkuat di tengah menurunnya ekspektasi konsumen khususnya pada kelompok menengah ke bawah serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Ke depan, ekonomi Indonesia akan terus menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan berada di kisaran 4,7–5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*)

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - Sisi Pengeluaran (% yoy)

Komponen	2023*	2024**	2025***			2025 ^P	2026 ^P	2027 ^P
			I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,03	4,87	5,12	5,04	4,7-5,5	4,9-5,7	5,1-5,9
- Konsumsi Swasta	4,94	5,11	4,91	5,04	4,87	4,6-5,4	4,9-5,7	4,9-5,7
- Konsumsi Pemerintah	3,02	6,61	-1,37	-0,33	5,49	2,0-2,8	7,2-8,0	5,9-6,7
- Investasi	3,76	4,61	2,12	6,99	5,04	4,8-5,6	5,6-6,4	6,4-7,2
- Ekspor	1,34	6,51	6,44	10,95	9,91	7,7-8,5	4,9-5,7	5,3-6,1
- Impor	-1,60	7,95	4,00	11,48	1,18	6,5-7,3	5,0-5,8	5,8-6,6

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^PProyeksi Bank Indonesia

dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi fiskal, realisasi belanja Pemerintah sesuai APBN perlu dipercepat untuk mendorong permintaan domestik, baik implementasi program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), maupun proyek prioritas Pemerintah terkait program ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025. Dari sisi penawaran, implementasi hilirisasi sumber daya alam dan reformasi struktural perlu dipercepat untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja tinggi. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, peningkatan insentif makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor-sektor padat modal, sementara sektor padat karya masih memerlukan dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Kinerja positif terutama terlihat pada sektor-sektor berorientasi ekspor dan sektor hilirisasi sumber daya alam, seperti Industri Pengolahan, yang mencatat pertumbuhan relatif tinggi seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah di

dalam negeri (Tabel 5). Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, seperti Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan, turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi digitalisasi, antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi, juga mencatatkan pertumbuhan yang semakin tinggi. Berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pun terus menunjukkan penguatan kinerja. Perkembangan lintas lapangan usaha tersebut menggambarkan proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19 yang semakin kuat. Pemulihan awal terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh efek *memar* (*scarring effect*) selama periode 2021–2022, kemudian berlanjut pada sektor-sektor berorientasi ekspor pada periode 2022–2024, dan kini semakin bergeser menuju sektor-sektor yang mendorong penguatan permintaan domestik. Ke depan, sektor-sektor seperti Pertanian, Perdagangan—khususnya ritel, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi terutama terkait digitalisasi, serta berbagai sektor jasa lainnya, perlu terus diperkuat. Sektor-sektor tersebut tidak hanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Keseimbangan

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	2023*	2024**	2025***			2025 ^p	2026 ^p	2027 ^p
			I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,03	4,9	5,1	5,0	4,7-5,5	4,9-5,7	5,1-5,9
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	0,67	10,5	1,7	4,9	4,4-5,2	5,2-6,0	5,4-6,2
Pertambangan dan Penggalian	6,12	4,90	-1,2	2,0	-2,0	1,0-1,8	2,8-3,6	4,0-4,8
Industri Pengolahan	4,64	4,43	4,5	5,7	5,5	5,1-5,9	5,0-5,8	4,9-5,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	4,77	5,1	0,9	2,9	3,0-3,8	4,5-5,3	4,1-4,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,90	1,56	0,2	0,8	3,3	2,2-3,0	4,3-5,1	4,6-5,4
Konstruksi	4,91	7,02	2,2	5,0	4,2	4,7-5,5	7,5-8,3	7,1-7,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,85	4,86	5,0	5,4	5,5	5,0-5,8	5,3-6,1	5,1-5,9
Transportasi dan Pergudangan	13,96	8,69	9,0	8,5	8,6	8,1-8,9	10,8-11,6	10,4-11,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,00	8,56	5,8	8,0	8,4	7,4-8,2	6,4-7,2	6,2-7,0
Informasi dan Komunikasi	7,59	7,57	7,7	7,9	9,7	7,5-8,3	8,0-8,8	9,5-10,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	4,74	4,0	3,2	0,8	4,9-5,7	7,6-8,4	7,5-8,3
Real Estat	1,43	2,50	2,9	3,7	4,0	3,5-4,3	3,0-3,8	2,8-3,6
Jasa Perusahaan	8,24	8,38	9,3	9,3	9,9	8,3-9,1	6,1-6,9	5,9-6,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1,51	6,40	4,8	4,7	4,3	3,9-4,7	5,2-6,0	4,6-5,4
Jasa Pendidikan	1,77	3,75	5,0	1,4	10,6	4,1-4,9	6,4-7,2	7,1-7,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	8,11	5,8	3,8	6,8	5,3-6,1	4,0-4,8	3,9-4,7
Jasa Lainnya	10,52	9,80	9,8	11,3	9,9	8,7-9,5	7,0-7,8	6,7-7,5

Sumber: BPS, Bank Indonesia

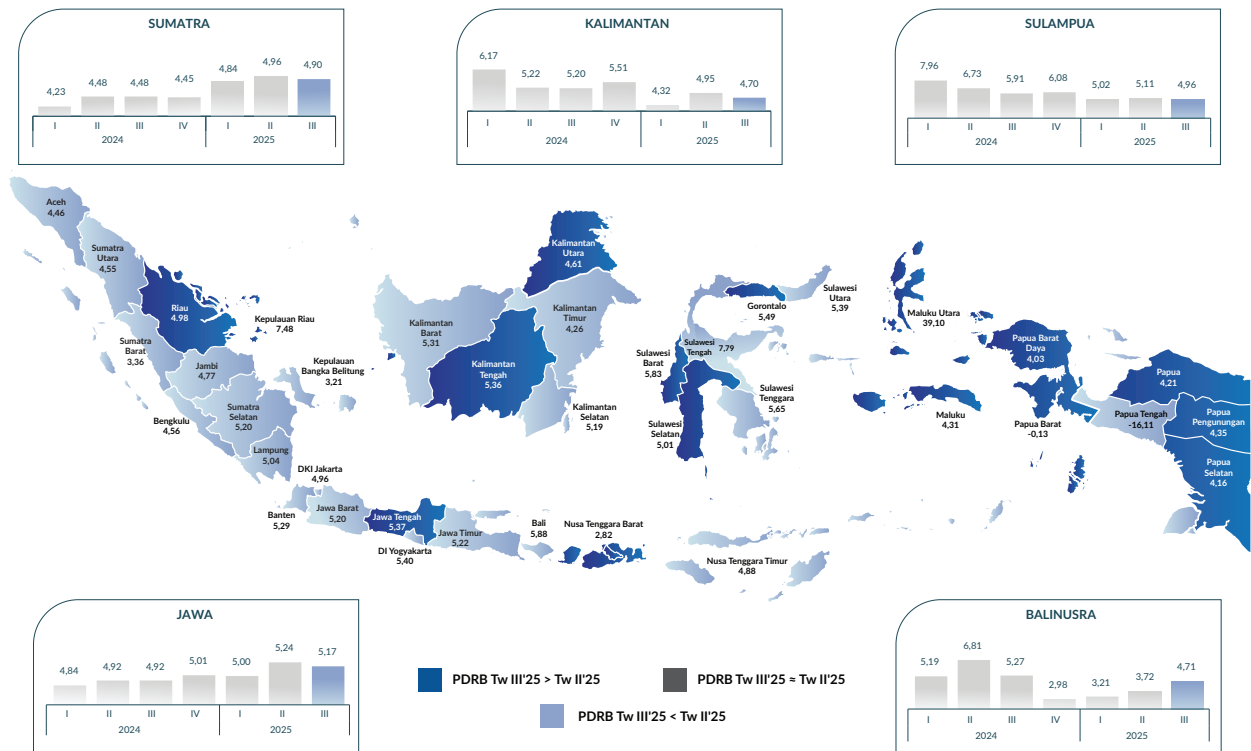
Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^pProyeksi Bank Indonesia

pola pertumbuhan antara sektor padat modal dan padat karya sangat penting untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik didukung oleh kinerja perekonomian di hampir seluruh wilayah. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Jawa sebesar 5,17% (yoy), diikuti Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 4,96% (yoy), Sumatra

sebesar 4,90% (yoy), Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebesar 4,71% (yoy), dan Kalimantan sebesar 4,70% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, lebih baiknya pertumbuhan di wilayah Jawa didorong oleh penambahan kapasitas industri dan peningkatan produksi pertanian. Di Kawasan Timur Indonesia, hilirisasi mineral terutama nikel, bauksit, dan tembaga menopang pertumbuhan industri di wilayah tersebut. Dari sisi pengeluaran, di tengah konsumsi rumah tangga di mayoritas wilayah yang masih di bawah 5%, investasi menjadi penopang utama terutama investasi

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial Triwulan III 2025 (% ,yoy)



Sumber: BPS, diolah

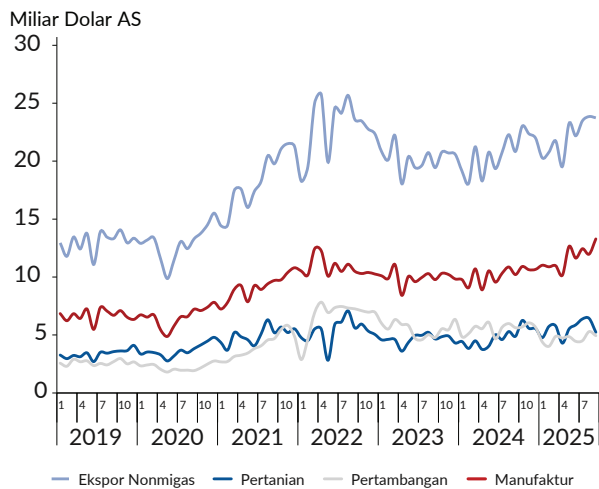
industri di Kawasan Investasi (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa (Batang, Kendal, Gresik) dan Sulampua (hilirisasi nikel). Dari sisi ekspor, kinerja ekspor terutama didukung oleh komoditas logam di Jawa, CPO dari Sumatra, dan ekspor besi baja di Sulampua, sementara ekspor batu bara dari Kalimantan terkena dampak penurunan permintaan luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2025, perekonomian wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8-5,2%, 4,7-5,5%, 4,3-5,1%, 4,2-5,0%, dan 4,2-4,8%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada 2026 diperkirakan akan meningkat masing-masing menjadi 4,9-5,3%, 4,7-5,5%, 4,6-5,4%, 5,5-6,3%, dan 5,6-6,4% (Gambar 1).

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang terjaga sehat.

Kinerja transaksi berjalan hingga triwulan III 2025 cukup baik, didukung surplus neraca perdagangan yang besar, mencapai 40 miliar dolar AS. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor nonmigas Indonesia, baik manufaktur, pertanian, maupun

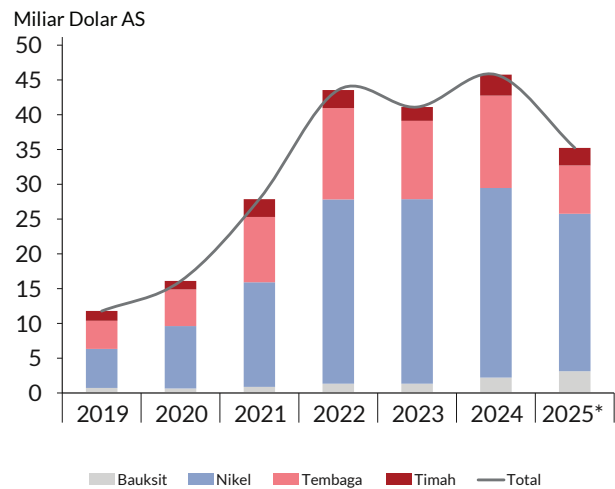
pertambangan, tetap tumbuh tinggi sejalan dengan antisipasi eksportir terhadap tarif resiprok AS (Grafik 12.a). Demikian juga ekspor pertambangan komoditas hasil hilirisasi sumber daya alam terus meningkat tinggi, khususnya nikel dan tembaga (Grafik 12.b). Untuk keseluruhan tahun 2025, transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni sekitar surplus 0,1% sampai dengan defisit 0,7% dari PDB. Sementara itu, tingginya gejolak global berdampak negatif pada kinerja transaksi modal dan finansial dengan terjadinya *net outflows* investasi portofolio, di tengah tetap positifnya penanaman modal langsung. Hingga triwulan III 2025, investasi portofolio tercatat *net outflows* sebesar 14 miliar dolar AS yang mengharuskan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2025 tetap kuat sebesar 149,9 miliar dolar AS, menurun dari 155,7 miliar dolar AS pada akhir tahun 2024. Posisi cadangan devisa dimaksud setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Tabel 6). Pada tahun 2026,

Grafik 12.a. Ekspor Nonmigas Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diolah

Grafik 12.b. Ekspor Produk Hilirisasi Minerba



Keterangan: *Data s.d September 2025 (Kumulatif)
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diolah

Tabel 6. Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar Dolar AS)

Komponen	2021	2022	2023	2024*					2025		
				I	II	III	IV	Total	I*	II*	III**
Transaksi Berjalan	3,5	13,2	-2,0	-2,4	-3,0	-2,0	-1,3	-8,7	-0,2	-2,7	4,0
A. Barang	43,8	62,7	46,3	9,3	10,0	9,2	11,3	39,8	13,0	10,6	16,1
- Ekspor, fob	232,8	292,5	257,7	61,9	62,3	67,5	71,3	263,1	65,9	68,0	73,9
- Impor, fob	-189,0	-229,9	-211,4	-52,6	-52,3	-58,3	-60,0	-223,3	-52,9	-57,4	-57,8
a. Nonmigas	57,8	89,8	67,8	15,1	15,2	14,7	17,8	62,8	18,8	15,7	20,9
b. Migas	-13,0	-24,8	-19,9	-5,5	-4,6	-4,4	-5,1	-19,6	-4,7	-4,2	-4,8
B. Jasa-jasa	-14,6	-20,0	-17,7	-4,2	-5,0	-4,2	-5,2	-18,6	-5,4	-5,2	-4,3
C. Pendapatan Primer	-32,0	-35,3	-36,0	-8,8	-9,4	-8,5	-9,0	-35,9	-9,4	-9,8	-9,4
D. Pendapatan Sekunder	6,3	5,8	5,4	1,3	1,4	1,5	1,6	5,9	1,6	1,7	1,7
Transaksi Modal dan Finansial	12,6	-8,7	9,9	-2,4	2,6	8,1	9,7	17,9	-0,4	-3,5	-8,1
1. Investasi Langsung	17,3	18,1	14,4	4,8	2,3	5,1	3,6	15,9	2,6	3,5	2,5
2. Investasi Portofolio	5,1	-11,6	2,2	-2,1	3,2	9,8	-2,5	8,3	1,0	-8,1	-7,1
3. Investasi Lainnya	-10,2	-15,6	-6,9	-4,7	-3,4	-7,2	8,4	-6,9	-4,2	1,0	-3,4
Neraca Keseluruhan	13,5	4,0	6,3	-6,0	-0,6	5,9	7,9	7,2	-0,8	-6,7	-6,4
Memorandum:											
- Cadangan Devisa	144,9	137,2	146,4	140,4	140,2	149,9	155,7	155,7	157,1	152,6	148,7
Dalam bulan Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah	7,8	5,9	6,5	6,2	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,1	6,0
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	1,0	-0,1	-0,7	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	0,0	-0,8	1,1

Sumber: Bank Indonesia

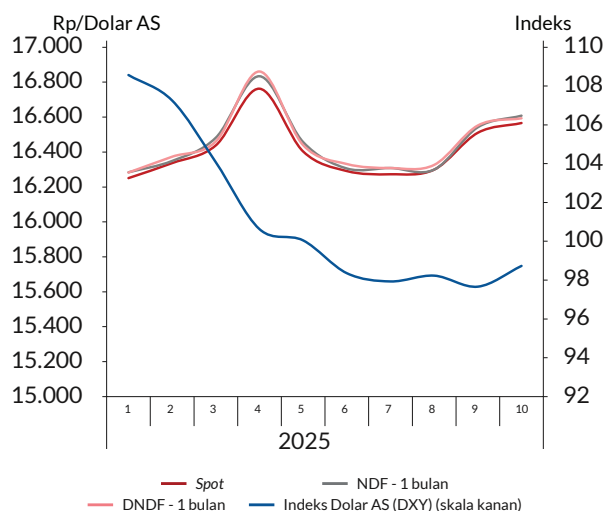
Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

NPI diperkirakan akan kembali mencatat surplus dengan posisi cadangan devisa yang meningkat. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah dalam kisaran defisit 1,0–0,2% PDB, didukung oleh kinerja ekspor yang tetap baik termasuk dari hasil positif hilirisasi sumber daya alam. Neraca modal dan finansial diperkirakan akan surplus dari penanaman modal asing dan kembali masuknya aliran portofolio sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga terlihat pada terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global dengan komitmen tinggi Bank Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan tarif sepihak yang tinggi oleh Presiden Trump telah menyebabkan aliran keluar portofolio asing dan depresiasi nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Rupiah sempat mengalami tekanan tinggi di pasar *forward* luar negeri (*off-shore Non-Deliverable Forward*, NDF) setelah pengumuman tarif AS pada awal April 2025. Untuk memperkuat stabilisasi Rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara intensif dan tanpa henti baik di pasar Asia, Eropa, dan AS. Intervensi *off-shore* NDF dimaksudkan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di pasar domestik yang terus dilakukan dengan strategi *triple intervention* pada transaksi

spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga dioptimalkan, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan komitmen kuat Bank Indonesia tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga Agustus 2025 tercatat sekitar Rp16.300 per dolar AS, menguat dibandingkan dengan awal April 2025 sebesar Rp16.865 per dolar AS (tanggal 8 April 2025) setelah pengumuman tarif resiprokal AS (Grafik 13.a). Namun tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali besar sejak akhir Agustus 2025, baik karena faktor global seperti penurunan FFR yang dinilai kurang besar (*less dovish*) dan *government shutdown* di AS, maupun faktor domestik seperti kerusuhan sosial dan kekhawatiran pasar atas melebarnya defisit fiskal. Nilai tukar Rupiah hingga 18 November 2025 tercatat Rp16.735 per dolar AS, atau melemah 4,01% dari posisi akhir Desember 2024, dengan rerata Rp16.430 per dolar AS selama tahun 2025. Secara umum, perkembangan Rupiah relatif stabil jika dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS (Grafik 13.b). Selain ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi, stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor

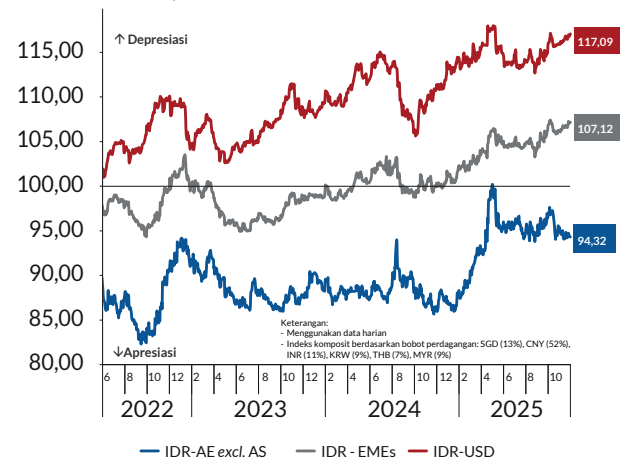
Grafik 13.a. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Dolar AS: Spot, NDF, DNDF



Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

Grafik 13.b. Indeks Nilai Tukar Rupiah vs Negara EMEs dan Negara Maju Lainnya

Data dalam indeks, rata-rata 2021 = 100



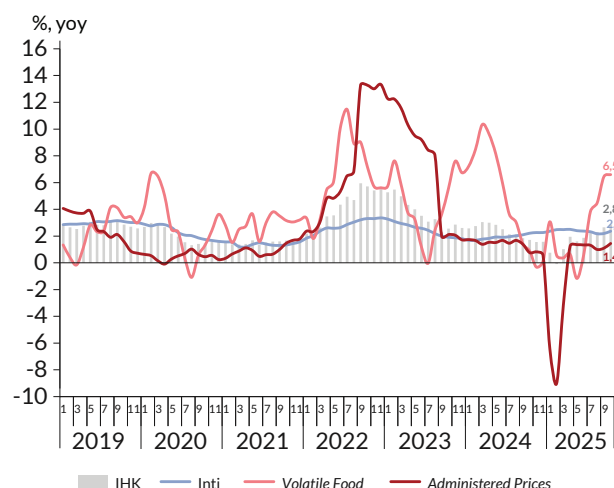
Keterangan: Data per 18 Nov'25
Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi yang rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan mendukung stabilitas perekonomian.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2025 tercatat rendah sebesar 2,86% (yoy) (Grafik 14). Inflasi inti tetap rendah sebesar 2,36% (yoy), dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan *imported inflation* yang rendah. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) juga tetap rendah sebesar 1,45% (yoy) seiring menurunnya tarif angkutan dan bensin di tengah kenaikan harga jual eceran rokok. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) terkendali sebesar 6,59% (yoy), didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui Kantor Pusat dan 46 kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah,

Grafik 14. Inflasi IHK, Inti, Volatile Food (VF), dan Administered Prices (AP)



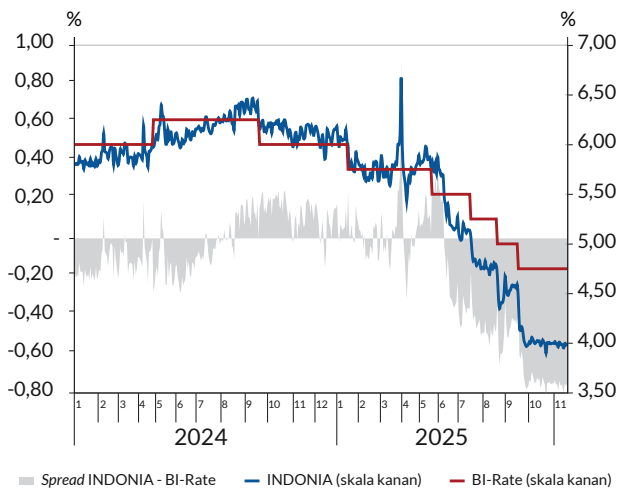
Sumber: BPS, diolah

Bank Indonesia mendukung kesuksesan GNPIP tersebut melalui program-program unggulan untuk peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, Kerja sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, pasar murah, digitalisasi data, serta koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga akhir tahun 2025, inflasi IHK diperkirakan akan tetap rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Demikian pula untuk tahun 2026 dan 2027, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan eratnya koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah.

Stabilitas moneter dan pasar keuangan terjaga dengan proses penurunan suku bunga yang terus berlangsung sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia.

Sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah penurunan 25 bps pada September 2024, Bank Indonesia selama tahun 2025 kembali menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali yakni pada Januari 2025, Mei 2025, Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps. Dengan demikian, Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 150 bps menjadi 4,75% pada November 2025, atau level terendah sejak tahun 2022. Seiring dengan penurunan BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga pasar uang, INDONIA, turun sebesar 203 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,00% pada 18 November 2025 (Grafik 15.a). Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 254 bps, 256 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62%; 4,65%; dan 4,69% pada 14 November 2025, sehingga mendukung kebijakan moneter yang ekspansif. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 226 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,70% pada 18 November 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun

Grafik 15.a. Suku Bunga BI-Rate dan INDONESIA

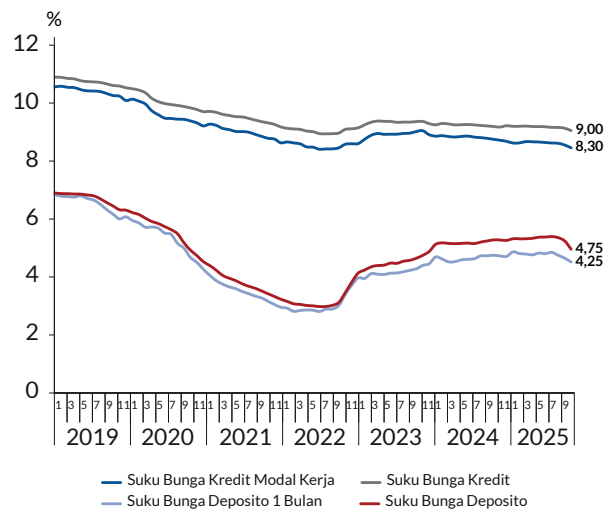


Sumber: Bank Indonesia

sebesar 113 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,13% pada 18 November 2025. Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat dan karenanya perlu dipercepat. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian *special rate* kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 20 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,00% pada Oktober 2025 (Grafik 15.b). Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan tersebut, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit, untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Stabilitas moneter juga didukung dengan ekspansi operasi moneter Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Dalam kaitan ini,

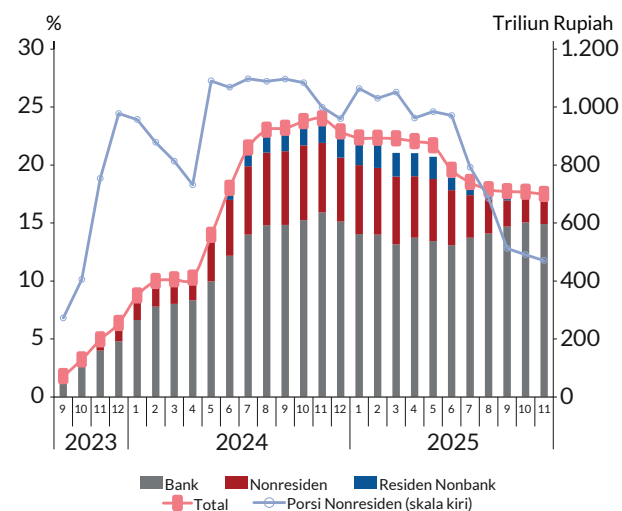
Grafik 15.b. Suku Bunga Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia menurunkan struktur suku bunga instrumen moneter dan *swap* valas untuk mendukung ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Ekspansi likuiditas moneter juga dilakukan Bank Indonesia dengan penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Posisi instrumen moneter SRBI turun sebesar Rp217,66 triliun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp699,30 triliun pada 17 November 2025 (Grafik 16.a). Selain itu, Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 18 November 2025 mencapai Rp289,91 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp212,6 triliun. Untuk mendorong pendalaman pasar uang, pengembangan produk, harga, pelaku, dan infrastruktur dalam *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) terus dilakukan Bank Indonesia bersama Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO). Hasilnya sangat membanggakan, dengan peningkatan rerata harian transaksi dari hanya Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp54,43 triliun pada 2025 (s.d Oktober 2025) di pasar uang, dan dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 10,15 miliar dolar AS

Grafik 16.a. Posisi SRBI: Bank, Nonresiden, Residen Nonbank

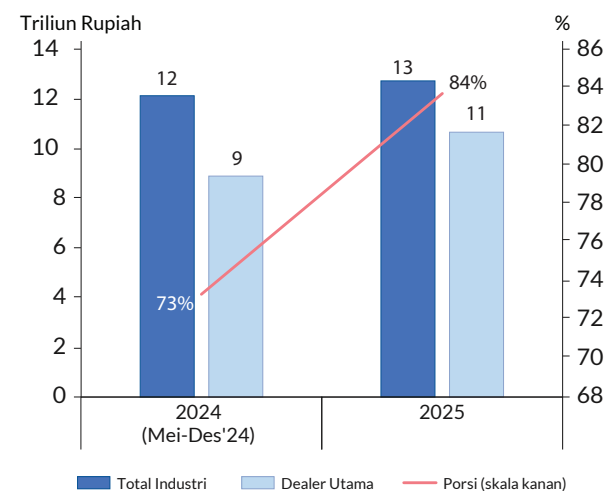


Sumber: Bank Indonesia

dalam periode sama di pasar valas. Implementasi Dealer Utama sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan *repurchase agreement* (repo) antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI di pasar sekunder meningkat dari rerata 73% pada 2024 menjadi 84% pada 2025 (s.d Oktober 2025) (Grafik 16.b).

Kebijakan moneter longgar yang ditempuh Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga dan ekspansi moneter mendorong kenaikan jumlah uang beredar dan longgarnya likuiditas perbankan. Pertumbuhan uang Primer (M0) *Adjusted*, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), tercatat 14,38% (yoy) pada Oktober 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 7,75% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, kenaikan M0 *Adjusted* ini dipengaruhi oleh ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia dan ekspansi keuangan Pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Government*-NCG). Pelonggaran kebijakan moneter juga berdampak pada pertumbuhan

Grafik 16.b. Peran Dealer Utama dalam Transaksi SRBI Sekunder

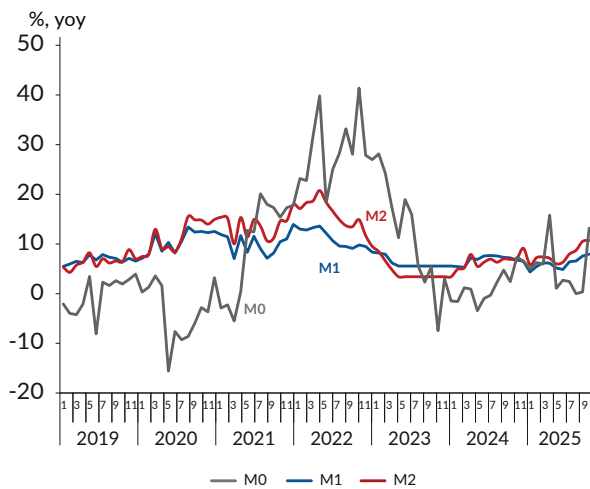


Sumber: Bank Indonesia

uang beredar dalam arti luas (M2) yang meningkat dari 5,46% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,96% (yoy) pada September 2025 (Grafik 17.a). Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,72% (yoy) pada September 2025, sejalan dengan pertumbuhan uang kartal dari 10,30% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 14,5% (yoy) pada September 2025. Dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Asset*-NFA). Ke depan, jumlah uang yang beredar diperkirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah. Sementara itu, longgarnya likuiditas perbankan yang diukur dengan rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada pada level yang tinggi. Kondisi likuiditas perbankan yang memadai juga terlihat dari rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR), yang mencerminkan akumulasi dana yang belum disalurkan ke kredit. Per Oktober 2025, rasio AL/DPK dan LDR perbankan tercatat masing-masing sebesar 29,47% dan 84,26%, dan karenanya secara keseluruhan menunjukkan likuiditas perbankan yang longgar (Grafik 17.b).

Di tengah penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan masih

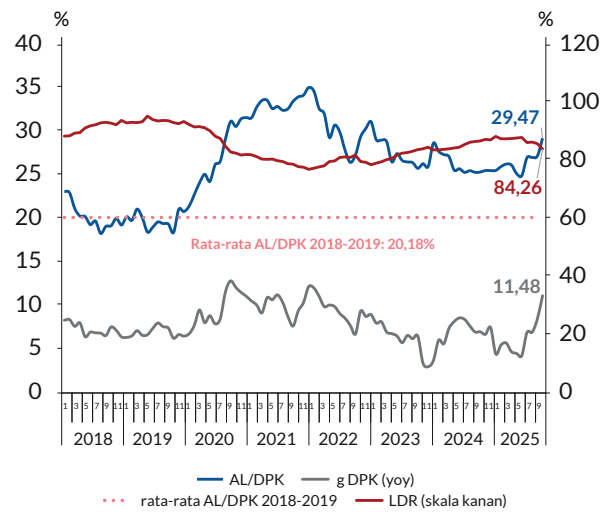
Grafik 17.a. Likuiditas Perekonomian



Sumber: Bank Indonesia

perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit tercatat 7,36% (yoy) pada Oktober 2025. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi melambat menjadi masing-masing sebesar 2,39% (yoy) dan 7,03% (yoy), sementara pertumbuhan kredit investasi meningkat menjadi 15,72% (yoy) (Grafik 18.a). Berdasarkan segmennya, kredit korporasi masih tumbuh baik sebesar 12,24 (yoy), sementara pertumbuhan kredit komersial, konsumsi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurun masing-masing menjadi 4,32% (yoy), 7,03% (yoy),

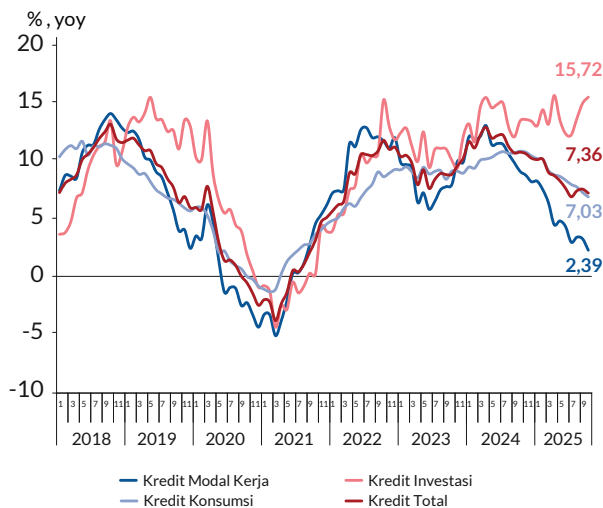
Grafik 17.b. Likuiditas Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

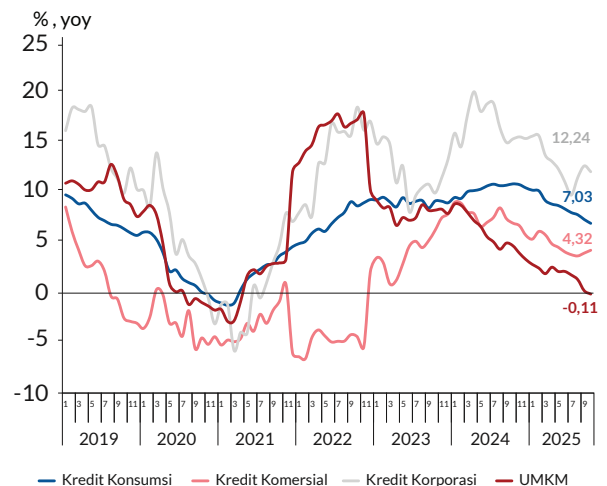
dan -0,11% (yoy) (Grafik 18.b). Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit ditopang sektor-sektor berorientasi ekspor seperti pertambangan (14,49%) serta sektor berorientasi domestik seperti jasa sosial (23,11%), listrik, gas, dan air (25,16%), dan transportasi (15,38%). Pertumbuhan kredit sektor industri (7,53%), pertanian (3,54%), perdagangan (0,93%), dan sektor-sektor lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Tabel 7). Penyaluran kredit/pembiayaan dipengaruhi sikap kehati-hatian perbankan dan permintaan kredit yang belum kuat. Pada sisi penawaran, minat penyaluran

Grafik 18.a. Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 18.b. Pertumbuhan Kredit per Segmen: Kredit Konsumsi, Komersil, Korporasi, UMKM



Sumber: Bank Indonesia

Tabel 7. Kredit per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan (% yoy)				Kontribusi (% yoy)			
	Okt-22	Okt-23	Okt-24	Okt-25	Okt-22	Okt-23	Okt-24	Okt-25
Labor Intensive Sectors								
Jasa Sosial	15,33	33,79	19,27	23,11	0,46	1,06	0,74	0,95
Konstruksi	5,94	(0,68)	(0,06)	0,19	0,39	(0,04)	(0,00)	0,01
Perdagangan	8,40	5,55	8,17	0,93	1,61	1,03	1,47	0,16
Pertanian	9,59	8,49	7,21	3,54	0,72	0,63	0,53	0,25
Capital Intensive Sectors								
Industri	15,44	4,16	7,53	7,53	2,50	0,70	1,20	1,17
Jasa Dunia Usaha	24,19	18,19	14,99	6,69	2,01	1,68	1,50	0,69
Pengangkutan	5,50	14,30	16,11	15,38	0,29	0,71	0,84	0,84
Pertambangan	67,17	15,23	25,69	14,49	1,73	0,59	1,04	0,67
LGA	(7,54)	4,36	23,77	25,16	(0,23)	0,11	0,58	0,68
Lainnya								
Lain-lain	8,70	9,28	11,01	7,03	2,45	2,54	3,02	1,93
	11,95	8,99	10,92	7,36	11,95	8,99	10,92	7,36

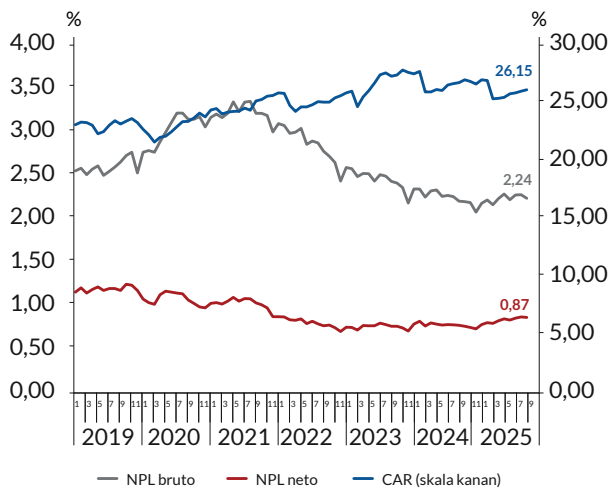
Sumber: Bank Indonesia

kredit perbankan pada umumnya masih cukup baik sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang cukup longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai, ditopang oleh DPK yang tumbuh sebesar 11,48% (yoy) pada Oktober 2025 seiring ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Sementara pada sisi permintaan, belum kuatnya permintaan kredit dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih *wait and see*, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Perkembangan ini tecermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) pada Oktober 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai

Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Industri, Jasa Dunia Usaha, Konstruksi, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga.

Stabilitas sistem keuangan terjaga didukung kecukupan permodalan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada September 2025 tercatat sebesar 26,15% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit (Grafik 19.a). Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non-*

Grafik 19.a. CAR dan NPL Perbankan

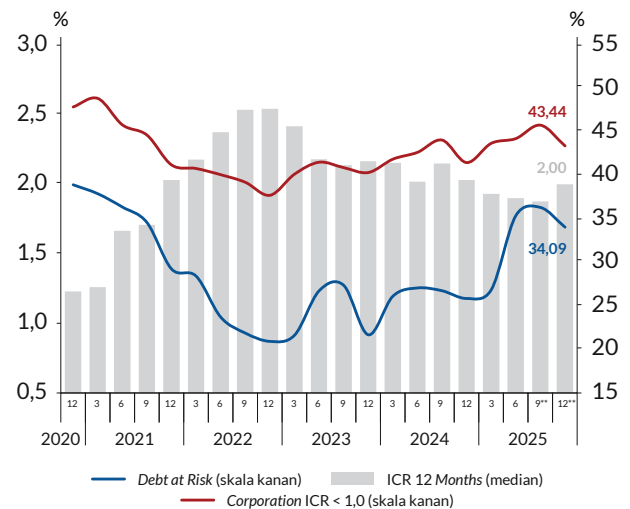


Sumber: OJK dan Bank Indonesia

Performing Loan/NPL) perbankan pada September 2025 terjaga rendah, sebesar 2,24% (bruto) dan 0,87% (neto). Terjaganya risiko kredit tecermin pula pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang terus menurun. Perbankan pada umumnya telah membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang besar atas risiko kreditnya. Hasil *stress test* menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat, tecermin pada ketahanan permodalan CAR yang masih di atas 25% pada berbagai skenario. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar (*Interest Coverage Ratio*, ICR) dan profitabilitas korporasi yang terjaga (Grafik 19.b). Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan semakin meningkatnya kinerja perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS pada Oktober 2025 meningkat 35,02% (yoy) sehingga mencapai Rp22.524,6 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 31,96% (yoy) mencapai 446,8 juta transaksi. Transaksi *digital payment* tercatat 4,45 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 31,20%

Grafik 19.b. *Interest Coverage Ratio* (ICR)



Keterangan: **Proyeksi Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia

(yoy). Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 139,45% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 58,30 juta dan jumlah *merchant* 41,19 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 13,37% (yoy) menjadi Rp1.213,76 triliun (Tabel 8). Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan struktur yang membaik. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas. Sejalan dengan nontunai, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk menjangkau daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Capaian kinerja positif perekonomian domestik tersebut merupakan hasil dari eratnya koordinasi

Tabel 8. Prakiraan Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2027

Transaksi		Pertumbuhan (%)				Nominal/Volume			
		2024	2025*	2026*	2027*	2024	2025*	2026*	2027*
I. Nontunai									
1. Digital Payment	Nominal (Triliun Rupiah)	19,3	10,8	12,4	14,8	70.890,4	78.563,1	88.310,7	101.410,3
	Volume (Juta)	40,7	34,1	30,0	23,9	36.659,2	49.167,8	63.925,9	79.206,7
2. QRIS	Nominal (Triliun Rupiah)	191,6	125,3	109,2	82,4	659,9	1.486,80	3.110,6	5.674,3
	Volume (Juta)	191,7	146,4	10,6	10,6	6.239,7	15.374,2	17.000,0	18.797,7
3. BI-FAST	Nominal (Triliun Rupiah)	54,7	36,6	26,7	20,3	8.913,8	12.176,2	15.429,5	18.568,7
	Volume (Juta)	62,4	45,2	29,8	25,2	3.430,0	4.862,6	6.312,5	7.902,9
4. Sistem BI-RTGS	Nominal (Triliun Rupiah)	12,8	19,1	11,2	9,0	178.920,3	149.344,0	166.015,0	180.967,0
	Volume (Juta)	3,2	0,9	0,3	0,1	10,2	10,3	10,3	10,3
II. Tunai									
	Nominal (Triliun Rupiah)	9,3	8,1	7,2	7,3	1.204,5	1.273,2	1.301,9	1.497,2

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal Pemerintah tetap dijalankan secara berhati-hati, dengan defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan sekitar 2,75% dari PDB, mencerminkan proses konsolidasi fiskal yang berlanjut dengan baik. Kebijakan moneter Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan Bank Indonesia juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, stimulus diberikan melalui program perlindungan sosial guna menjaga daya

beli masyarakat, dan percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga. Selain itu, Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai program Asta Cita, sejalan dengan pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional yang berfokus pada ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) telah disalurkan insentif likuiditas sebesar Rp404,6 triliun hingga minggu pertama November 2025 kepada perbankan guna mendorong penyaluran kredit/ pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, antara lain hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, otomotif, perdagangan, LGA (listrik, gas, dan air), pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sinergi kebijakan juga diperkuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional, termasuk melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Koordinasi di dalam KSSK juga ditempuh untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendukung peran

sektor keuangan dalam pembiayaan perekonomian bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

III. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Di bidang kebijakan moneter, dengan rendah dan terkendalinya inflasi dalam sasaran, penurunan suku bunga dan ekspansi operasi moneter ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Di bidang kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas diberikan kepada perbankan untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam program Asta Cita Pemerintah. Di sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk meningkatkan inklusi ekonomi

dan keuangan digital, khususnya pada sektor riil dan UMKM. Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia ini didukung penguatan kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.

Konsepsi Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU P2SK, tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai Rupiah diukur dengan tercapainya sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah didukung dengan kecukupan cadangan devisa (Gambar 2). Stabilitas sistem pembayaran tecermin pada tingkat perputaran (velositas) peredaran uang (baik uang kertas, uang berbasis rekening, maupun

Gambar 2. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025



Sumber: Bank Indonesia

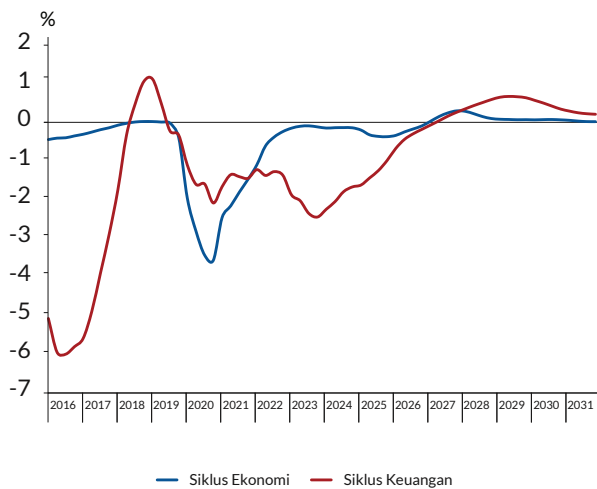
uang digital) sesuai kebutuhan perekonomian, struktur industri sistem pembayaran nasional yang sehat dan efisien, serta penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan andal. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan (SSK) tecermin pada optimalnya pertumbuhan kredit/pembiayaan, terjaganya risiko sistem keuangan, serta berkembangnya inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut menjaga SSK melalui kebijakan makroprudensial pada sektor perbankan dari sisi keterkaitan makro-finansial, mengingat tujuan SSK sebagai tanggung jawab bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ketiga aspek tujuan stabilitas Bank Indonesia tersebut sangat penting dan karenanya diarahkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Dengan demikian, dukungan Bank Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh melalui ketiga tugas tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, melalui kebijakan moneter, tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tumbuh-kembang berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh Pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, maupun masyarakat. Inflasi yang rendah meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kepastian bagi dunia usaha. Demikian pula, stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi terkendalinya inflasi, terjaganya stabilitas sistem keuangan, stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pembiayaan fiskal Pemerintah, serta terpeliharanya kepastian bagi dunia usaha. *Kedua*, melalui kebijakan sistem pembiayaan, inovasi alat pembayaran, kelancaran transaksi, industri yang sehat dan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil menentukan perputaran uang (velositas), efisiensi, dan produktivitas dari berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik yang berbasis rekening maupun digital. Demikian pula, pengedaran uang kertas dalam jumlah yang cukup dan berkualitas

sangat diperlukan masyarakat, termasuk di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). *Ketiga*, melalui kebijakan makroprudensial, pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang optimal, didukung oleh terjaganya stabilitas sistem perbankan dengan sinergi erat dalam KSSK, berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan ketiga tugas tersebut, Bank Indonesia juga diberi kewenangan dalam pendalaman pasar uang dan kebijakan internasional, di samping turut serta dalam pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah.

Dalam melaksanakan ketiga tugasnya, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang optimal untuk keseimbangan antara terjaganya stabilitas dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan pula dampak dari perekonomian global. Bauran kebijakan dimaksud didasarkan pada asesmen, proyeksi, dan simulasi Bank Indonesia terhadap pergerakan siklus ekonomi dan keuangan nasional ke depan. Dalam hal ini, “*stance*” bauran kebijakan longgar ditempuh pada waktu siklus menurun dan di bawah kapasitas perekonomian potensial (“stagnan atau resesi”), dan sebaliknya “*stance*” kebijakan ketat pada waktu siklus menanjak di atas kapasitas potensial (“*boom* atau *overheating*”). Sebagai contoh, dewasa ini siklus ekonomi dan keuangan Indonesia dalam tren meningkat tetapi masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial (Grafik 20). Hal ini tecermin antara lain pada inflasi inti yang rendah, defisit transaksi berjalan yang kecil, dan pertumbuhan ekonomi yang belum meluas pada sebagian besar sektor ekonomi. Karenanya, secara konsepsi “*stance*” bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia cenderung longgar untuk keseimbangan pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, dampak rambatan gejolak global berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan tarif AS

Grafik 20. Siklus Ekonomi dan Siklus Keuangan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia dan Consensus Indonesia

dan ketegangan geopolitik dunia berdampak pada tekanan instabilitas nilai tukar Rupiah dan aliran keluar portofolio investasi asing. Pertimbangan ini yang mendasari “stance” bauran kebijakan moneter lebih “pro-growth dan stability”, sementara kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial tetap “pro-growth” dengan didukung oleh kebijakan pendalaman pasar uang dan program pengembangan inklusi ekonomi-keuangan.

Berdasarkan “stance” bauran kebijakan Bank Indonesia dimaksud, berikut ini pokok-pokok instrumen kebijakan yang ditempuh selama tahun 2025.

- i. **Di bidang kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah dan ekspansi likuiditas moneter.** Langkah ini ditempuh untuk optimalisasi trilema kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan cadangan devisa. BI-Rate telah turun sebesar enam kali atau sebesar 150 bps sejak September 2024 menjadi 4,75%, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *off-shore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*,

Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pembelian SBN termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah. Kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

- ii. **Di bidang kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas ditingkatkan dan seluruh instrumen makroprudensial diperlonggar guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.** Dalam kaitan ini, ketiga sasaran trilema kebijakan makroprudensial, yaitu kredit optimal, SSK, dan inklusi keuangan berjalan searah dan semakin diperkuat. Kebijakan KLM diperbesar untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas yang juga sejalan dengan program prioritas Pemerintah dalam Asta Cita. Instrumen Rasio Pinjaman Luar Negeri (RPLN) diperlonggar untuk memperluas alternatif pendanaan bank dari luar negeri. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) juga dilonggarkan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas melalui pengurangan rasio kewajiban surat berharga yang wajib dimiliki terhadap DPK. Instrumen kebijakan makroprudensial lainnya tetap dipertahankan longgar untuk mendorong penyaluran kredit, yaitu *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti, serta ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Surveilans makroprudensial dan pasar uang terhadap sistem perbankan juga diperkuat untuk turut menjaga SSK dengan koordinasi erat dalam KSSK.

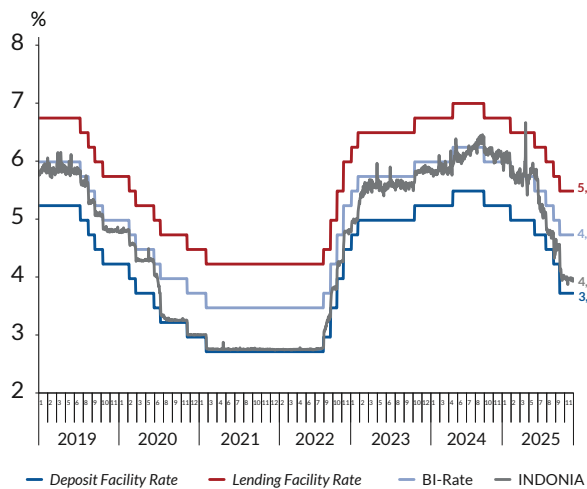
iii. Di bidang kebijakan sistem pembayaran, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan kecukupan pengedaran uang terus ditempuh untuk mendukung kelancaran, efisiensi, dan produktivitas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital (EKD) nasional. Implementasi BSPI 2025 telah berhasil mencapai berbagai transformasi strategis di area sistem pembayaran, antara lain meluasnya akseptasi QRIS, implementasi BI-FAST, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang mendorong peningkatan velositas pembayaran dan efisiensi transaksi ritel. Transformasi digital sistem pembayaran dilanjutkan dalam BSPI 2030, dengan fokus pada penguatan ketahanan sistem pembayaran serta perluasan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada 2025, Bank Indonesia terus memperluas akseptasi digital melalui kebijakan skema harga QRIS yang lebih murah untuk *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO). Dari sisi inovasi, fitur QRIS telah diperluas melalui peluncuran QRIS Tap (tanpa pindai) berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC). Struktur industri sistem pembayaran diperkuat untuk interkoneksi dan interoperabilitas antarpengyelenggara jasa pembayaran melalui perluasan implementasi SNAP serta penguatan kelembagaan industri melalui penguatan fungsi surveilans dan manajemen risiko, termasuk terhadap transaksi ilegal dan ancaman siber. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran terus dijaga melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Sejalan dengan digitalisasi keuangan publik, Bank Indonesia memperkuat elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah

melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta peningkatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tata kelola fiskal. Selain itu, sinergi internasional diperluas melalui implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN dan pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang untuk memperkuat konektivitas lintas batas dan mendukung agenda integrasi ekonomi digital regional. Sementara itu, untuk menjaga kelancaran, efisiensi, dan produktivitas transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan akseptasi serta infrastruktur digital, Bank Indonesia terus memastikan kecukupan dan meningkatkan kualitas uang Rupiah, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjamin ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan Moneter

Kebijakan suku bunga pada 2025 ditetapkan dalam setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan prakiraan inflasi dua tahun ke depan tetap terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026. Sebagaimana dijelaskan di atas, penurunan suku bunga kebijakan moneter BI-Rate sebanyak 6 kali sebesar 150bps dari 6,25% pada September 2024 menjadi 4,75% pada September 2025 dan menjadi tingkat BI-Rate ini terendah sejak 2022 (Grafik 21.a). Penurunan BI-Rate itu diputuskan Bank Indonesia pada September 2024 dan selama tahun 2025 pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bank Indonesia pada 18-19 November 2025 juga memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50% untuk terus mendorong peran perbankan dalam memanfaatkan pelonggaran likuiditas bagi sektor riil. Keputusan

Grafik 21.a. BI-Rate dan INDONESIA



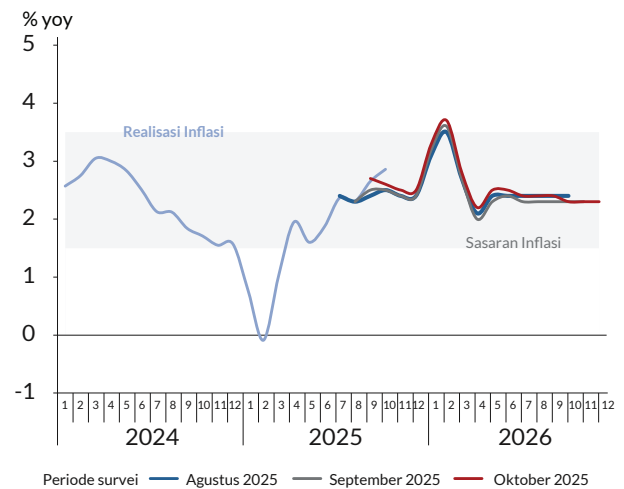
Sumber: Bank Indonesia

ini sejalan dengan upaya bersama Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ (Grafik 21.b), dan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental ditempuh melalui intervensi baik melalui transaksi *spot* dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Nilai tukar Rupiah yang pada awal April 2025 pernah mencapai sekitar Rp17.000 per dolar AS, telah menguat dan stabil di sekitar Rp16.300-16.700 per dolar AS. Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai bagian penting dari stabilitas perekonomian dan stabilitas NKRI.

Ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* guna makin

Grafik 21.b. Ekspektasi Inflasi

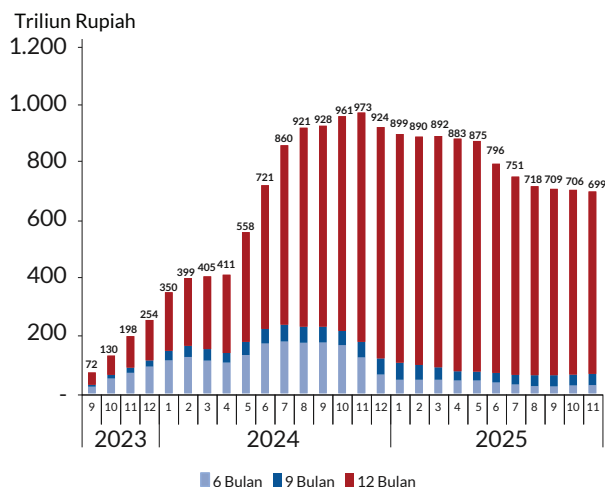


Sumber: Consensus Forecast, diolah

memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh dengan tiga langkah. *Pertama*, peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penurunan posisi SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp699,30 triliun pada 17 November 2025 (Grafik 22.a). *Kedua*, penurunan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 254 bps, 256 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62%; 4,65%; dan 4,69% pada 14 November 2025 (Grafik 22.b). *Ketiga*, penguatan peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar. Selain itu, untuk memperkuat efektivitas ekspansi likuiditas moneter ini, seperti dikemukakan di atas, pada RDG 18-19 November 2025, suku bunga *deposit facility* Bank Indonesia dipertahankan 3,75% agar perbankan lebih menggunakan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit ke sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market*. Sejak November 2025, Bank Indonesia memperluas *underlying repo*

Grafik 22.a. Perkembangan Posisi SRBI Berdasarkan Tenor

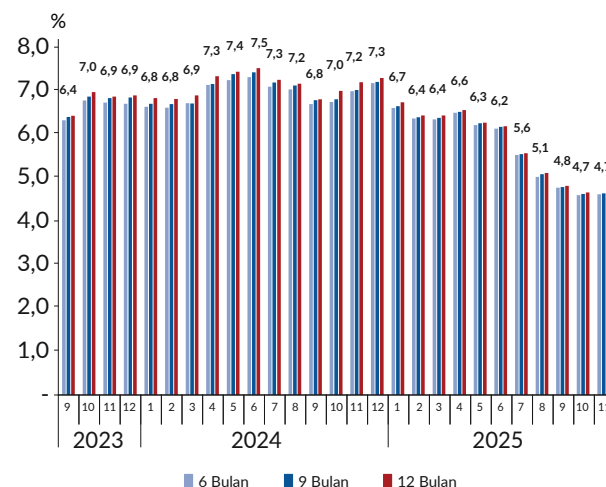


Sumber: Bank Indonesia

dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung BPPU 2030, Bank Indonesia juga menerbitkan BI-FRN (*Floating Rate Note*) dan pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) untuk tenor di atas *overnight* untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang. Dalam rangka mendukung pasar uang syariah, Bank Indonesia juga memperluas investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk.

Pembelian SBN dari pasar sekunder dilakukan sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter. Hingga 18 November 2025, Bank Indonesia telah membeli Rp289,91 triliun sejak Januari 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp212,60 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Selain itu, pembelian SBN dimaksud sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk bersama

Grafik 22.b. Perkembangan Suku Bunga SRBI Berdasarkan Tenor

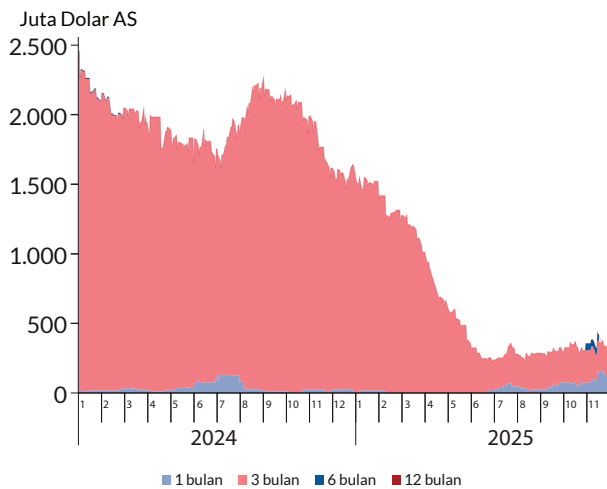


Sumber: Bank Indonesia

menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan Pemerintah untuk pendanaan program ekonomi kerakyatan, seperti Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga instrumen moneter di atas, yaitu kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa dan pengelolaan lalu lintas devisa. Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan cadangan sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi cadangan devisa akhir Oktober 2025 yang berjumlah 149,9 miliar dolar AS setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Lebih lanjut, untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025. Instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE

Grafik 23.a. Perkembangan Posisi TD Valas DHE Berdasarkan Tenor

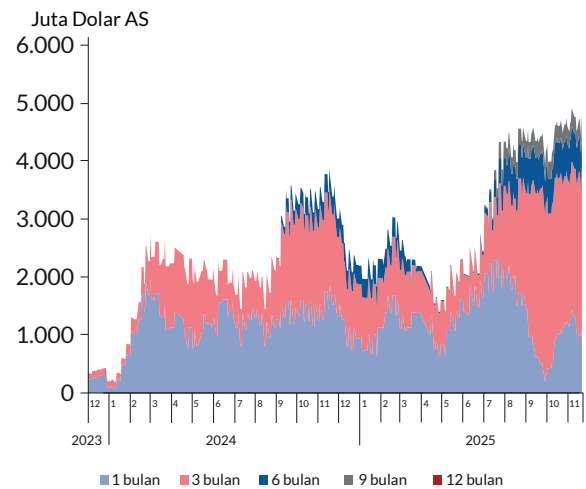


Sumber: Bank Indonesia

SDA diperluas meliputi antara lain penempatan di instrumen *Term Deposit* (TD) valas DHE sampai dengan tenor 12 bulan (Grafik 23.a), dan penempatan di instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sampai dengan tenor 12 bulan (Grafik 23.b). Selain melalui instrumen penempatan valas, ruang fleksibilitas pada PP No. 8 Tahun 2025 juga mendorong peningkatan konversi valas ke Rupiah. Hal ini mengakibatkan suplai valas dari korporasi meningkat, yang selanjutnya juga turut mendorong peningkatan DPK Rupiah korporasi.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan pengendalian inflasi khususnya harga pangan (*volatile food*), sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilakukan dengan dukungan penuh Bank Indonesia, baik dari kantor pusat maupun 46 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip pengendalian inflasi pangan mengacu kepada strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun dukungan Bank Indonesia pada GNPIP melingkupi program Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, Kerja sama Antar Daerah

Grafik 23.b. Perkembangan Posisi SVBI Berdasarkan Tenor



Sumber: Bank Indonesia

(KAD), Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), Operasi Pasar Murah, Digitalisasi Data, serta Koordinasi dan Komunikasi publik yang dilakukan secara intensif (Tabel 9). Lebih lanjut, Bank Indonesia juga senantiasa mendukung berbagai upaya pengendalian harga yang dilakukan oleh Pemerintah seperti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khususnya untuk komoditas beras serta pemantauan harga pangan secara intensif baik melalui rapat koordinasi di level TPID/TPIP secara berkala maupun kegiatan inspeksi baik di tingkat pasar maupun produsen. Berbagai upaya tersebut tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga pangan di jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ketahanan pangan yang tangguh dan adaptif, di mana efisiensi rantai pasok, pemberdayaan daerah, dan koordinasi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga. Selain di sisi pengendalian harga, Bank Indonesia juga terus mendukung upaya Pemerintah, khususnya di daerah, untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain melalui penguatan *advisory* kebijakan ekonomi dalam mengoptimalkan sektor potensial di tiap daerah, pemberdayaan UMKM, promosi investasi dan perdagangan daerah melalui *Regional Investor Relation Unit* (RIRU) serta keterlibatan aktif dalam Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). Harapannya, dengan adanya sinergi

Tabel 9. Dukungan Bank Indonesia dalam GNPIP untuk Pengendalian Inflasi 2025

Program Unggulan GNPIP	Target	Pencapaian	Satuan	Implementasi (% terhadap Target)					
				Nasional	Sumatra	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
Peningkatan Produktivitas									
a. <i>Optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP)</i>	125	345	Program	276,00	277,14	190,24	250,00	343,75	380,00
b. Kelembagaan Klaster Pangan	75	171	Program	228,00	121,05	82,14	160,00	1030,00	107,69
Penguatan Ketahanan Pangan									
a. Replikasi <i>Best Practices</i>	127	80	Program	62,99	45,71	62,50	100,00	80,00	65,52
b. Hilirisasi Pangan	115	67	Program	58,26	50,00	34,21	85,71	114,29	68,18
c. Fasilitasi Kemitraan <i>Offtaker</i>	46	65	Program	141,30	123,08	78,57	400,00	250,00	110,00
Kerja Sama Antar Daerah	132	199	MoU	150,76	192,11	160,47	188,89	117,65	80,00
Fasilitasi Distribusi Pangan	226	854	Program	377,88	362,30	632,05	142,86	182,76	152,27
Pasar Murah	13.800	14.368	Pelaksanaan	104,12	104,60	105,98	108,88	93,67	105,96
Digitalisasi Data	66	69	Program	104,55	70,00	90,91	240,00	150,00	100,00
Koordinasi & Komunikasi									
a. Koordinasi Kelembagaan	626	582	Kegiatan	92,97	68,18	97,57	100,00	95,12	116,94
b. <i>Capacity Building</i> TPID	136	154	Program	113,24	105,56	102,13	111,11	168,75	110,71
c. Pengendalian Ekspektasi	472	818	Program	173,31	97,71	126,14	218,52	203,13	317,53
d. Diversifikasi & Olahan Pangan	175	123	Program	70,29	34,04	72,41	120,00	109,09	76,32
e. Pemanfaatan Insentif KLM	73	74	Program	101,37	61,90	75,00	140,00	66,67	214,29

Sumber: PowerApps GNPIP

Data per 14 November 2025

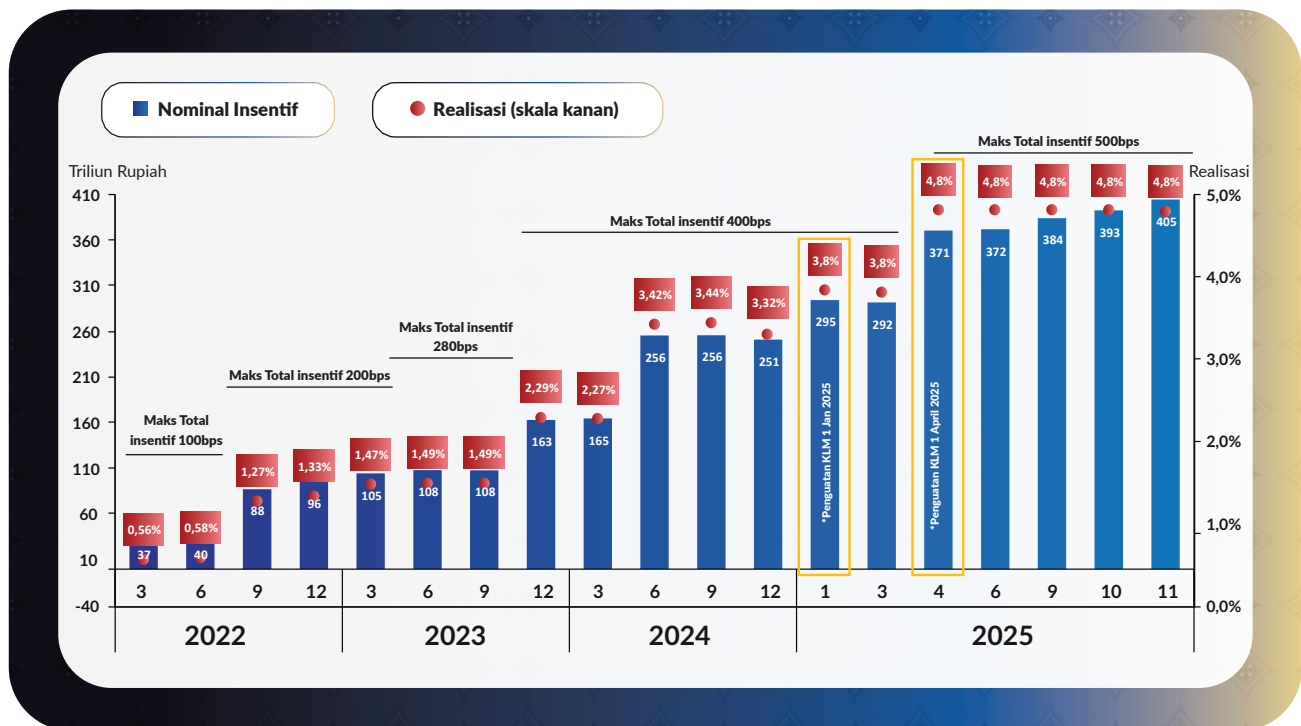
tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan Makroprudensial

Untuk semakin mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas serta mendukung program Asta Cita Pemerintah, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Inovasi pelonggaran kebijakan makroprudensial ini ditempuh sejak pertama kali diterapkan pada Maret 2022 sebagai bagian bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Insentif likuiditas diberikan kepada perbankan berupa pengembalian kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia

memandang pengembalian GWM dalam bentuk insentif likuiditas KLM tersebut lebih produktif bagi perekonomian, dibandingkan dengan penurunan kewajiban GWM kepada seluruh bank yang dapat saja dipergunakan untuk spekulasi nilai tukar atau penggunaan lain daripada untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Dengan pertimbangan ini, Bank Indonesia secara berkala mereviu implementasi KLM tersebut dan dari waktu ke waktu memperkuat efektivitasnya dalam mendorong perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, baik dari aspek cakupan sektor maupun besaran insentifnya (Grafik 24). Dari sisi cakupan sektor prioritas, KLM pada awal implementasinya disalurkan untuk mendukung pemulihan sektor yang mengalami luka memar (*scarring effect*) dari dampak pandemi COVID-19, yang kemudian diperluas ke sektor-sektor yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, cakupan sektor prioritas kembali diperkuat untuk mendukung peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja, serta

Grafik 24. Tahapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)



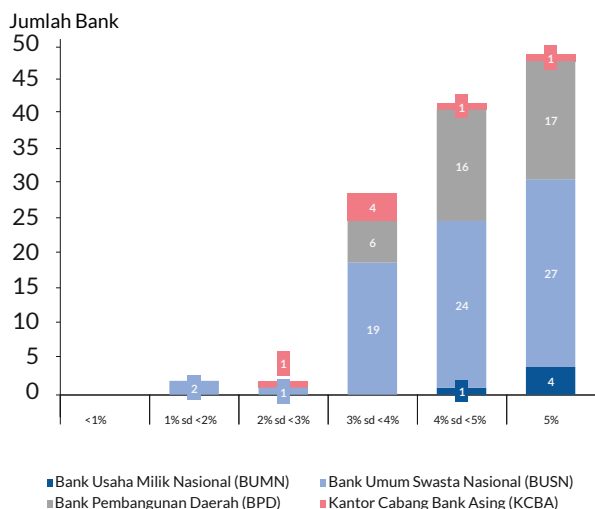
Sumber: Bank Indonesia

mendukung program Asta Cita Pemerintah dengan besaran insentif yang terus meningkat. Besaran insentif likuiditas KLM ditingkatkan dari 4% menjadi 5% dari DPK sejak 1 April 2025. Penguatan KLM dilakukan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan utamanya kepada sektor-sektor prioritas, yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Manufaktur, sektor Real Estat, Perumahan Rakyat, dan Konstruksi, sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UMKM dan ultra mikro, serta pembiayaan berwawasan lingkungan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja (*labor intensive*) dan dukungan program Asta Cita Pemerintah.

Pemanfaatan insentif likuiditas KLM oleh perbankan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp179,4 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp179,9 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp39,3

triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp6 triliun. Secara keseluruhan, sebanyak 124 bank telah menerima insentif likuiditas KLM tersebut dalam jumlah yang besar, yaitu 5% dan antara 4-5% dari DPK masing-masing sebanyak 49 bank dan 42 bank penerima (Grafik 25.a). Dari sisi sektor-sektor prioritas, seperti tergambar pada Grafik 25.b, insentif KLM terbesar disalurkan untuk kredit/pembiayaan pada sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri (Rp133,15 triliun), disusul sektor Perumahan (Rp107,84 triliun) dan pembiayaan inklusif UMKM (Rp81,19 triliun), Sektor Ekonomi Hijau (Rp36,38 triliun), Sektor Transportasi dan Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp23,90 triliun), dan pembiayaan inklusif Ultra Mikro (Rp22,11 triliun). Dengan demikian, pemberian insentif likuiditas KLM ini dinilai efektif untuk mendorong perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia akan secara berkala melakukan asesmen terhadap cakupan sektor-sektor prioritas tersebut agar sejalan dengan program-program Pemerintah, termasuk sektor-sektor untuk penciptaan lapangan kerja.

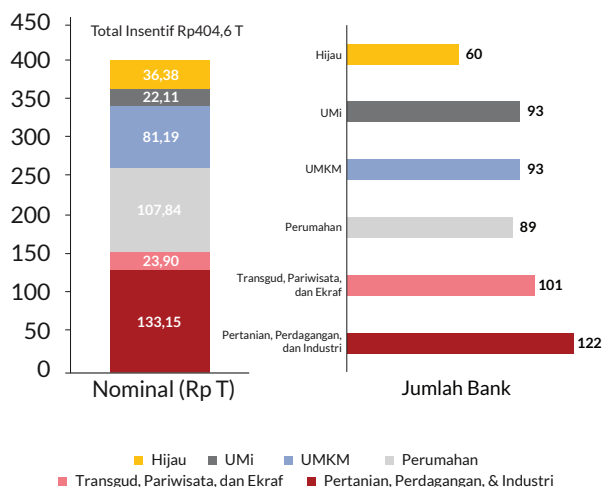
Grafik 25.a. Jumlah Bank Penerima KLM



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan penguatan instrumen Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan dalam rangka mengoptimalkan manajemen likuiditas dan penyaluran kredit perbankan. Kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal. Kewajiban jangka pendek yang diperhitungkan dalam RPLN terdiri atas utang luar negeri bank jangka pendek, Surat Utang Valas Domestik jangka pendek, dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko jangka pendek. RPLN memiliki dua fitur kebijakan, yaitu kontrasiklikal (*countercyclical*) dan pendekatan berbasis risiko (*Risk-based approach*). Batasan RPLN bersifat dinamis melalui penetapan parameter kontrasiklikal dengan mempertimbangkan siklus perekonomian makro dan keuangan serta siklus utang luar negeri (ULN) bank secara industri, yang dievaluasi secara berkala. Menggunakan *Risk-based approach*, penerapan parameter kontrasiklikal RPLN memperhitungkan risiko eksternal dan risiko makrofinansial, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian yang mencakup kapasitas permodalan, risiko kredit, dan risiko pasar. Efektif per 1 Juni 2025, Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar 5%, sehingga batas maksimum RPLN meningkat dari semula 30%

Grafik 25.b. Penyaluran KLM per Sektor Prioritas



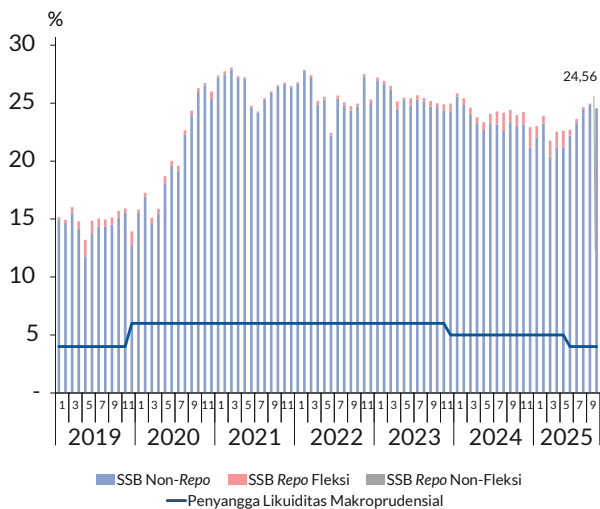
Sumber: Bank Indonesia

menjadi 35%¹. Penerapan parameter kontrasiklikal ini dapat memperkuat potensi likuiditas perbankan sesuai dengan kebutuhan perekonomian nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia terus menjaga kecukupan likuiditas perbankan, termasuk fleksibilitas rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), untuk memperkuat kredit/pembiayaan dan sekaligus turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi likuiditas perbankan yang longgar tercermin pada rasio AL/DPK dan LDR, masing-masing sebesar 29,47% dan 84,26% pada Oktober 2025. Dalam rangka memperkuat fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, Bank Indonesia melonggarkan rasio PLM, yaitu kewajiban bank untuk menyimpan sebagian Alat Likuid dimaksud pada Surat-Surat Berharga (SSB) yang berkualitas seperti SBN. Pada 1 Juni 2025, Bank Indonesia menurunkan rasio PLM dari 5% menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan rasio PLM Syariah dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/

¹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri

Grafik 26.a. Rasio PLM Perbankan

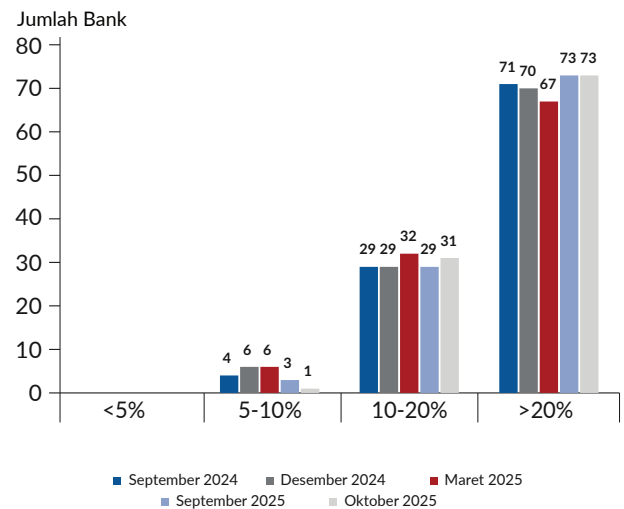


Sumber: Bank Indonesia

UUS)² (Grafik 26.a). Selain penurunan rasio pada kebijakan PLM, Bank Indonesia juga menyesuaikan fitur fleksibilitas *repurchase agreement* (repo) dalam kebijakan PLM/PLM Syariah. Fitur fleksibilitas repo surat berharga untuk pemenuhan PLM bagi BUK diturunkan menjadi 4% dari sebelumnya sebesar 5%, sementara fleksibilitas repo surat berharga syariah untuk pemenuhan PLM Syariah bagi BUS diturunkan menjadi 2,5% dari sebelumnya 3,5%. Penyesuaian ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi perbankan dalam mengelola likuiditas melalui transaksi repo atas surat berharga yang dimiliki bank dalam rangka pemenuhan kewajiban PLM/PLM Syariah. Pada Oktober 2025, seluruh bank mempunyai rasio PLM di atas 5% dari DPK, dan bahkan sebanyak 73 bank dengan rasio PLM di atas 20% dan 31 bank dengan rasio PLM antara 10-20% (Grafik 26.b). Hampir seluruh SSB untuk pemenuhan rasio PLM itu disimpan oleh perbankan, dan hanya sedikit saja direpokan ke Bank Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan kondisi likuiditas perbankan yang longgar sehingga mendukung penyaluran kredit/pembiayaan bagi perekonomian. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, perbankan cenderung menempatkan kelebihan likuiditas pada SSB sebagai

² Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Grafik 26.b. Distribusi Rasio PLM Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

alternatif penempatan dana di tengah belum kuatnya permintaan kredit dari dunia usaha yang memenuhi persyaratan. Ke depan, dengan semakin meningkatnya pemulihan ekonomi nasional, kredit/pembiayaan perbankan diperkirakan juga akan tumbuh lebih tinggi.

Di samping perluasan cakupan sektor prioritas dan peningkatan insentif likuiditas KLM, penguatan RPLN, dan fleksibilitas rasio PLM, seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lain juga tetap longgar untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melanjutkan berbagai instrumen kebijakan makroprudensial longgar yang ditempuh sebelumnya. Kebijakan rasio pembiayaan (*loan to value/financing to value, LTV/FTV*) 100% untuk semua jenis properti (termasuk perumahan rakyat) dan pelonggaran ketentuan uang muka 0% untuk penyaluran kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Demikian pula, Bank Indonesia mempertahankan rasio CCyB 0% dan RIM 84-94% (realisasi RIM akhir Oktober 2025 sebesar 85,21%) untuk fleksibilitas likuiditas dan penyaluran kredit perbankan, rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya UMKM, dan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan makroprudensial.

Bank Indonesia terus memperkuat surveilans makroprudensial dan pasar uang terhadap sistem perbankan untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan. Surveilans makroprudensial (*macroprudential surveillance*) difokuskan pada keterkaitan makroekonomi-finansial terhadap bank-bank besar yang berperan penting dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan. Surveilans dimaksud diarahkan pada penilaian risiko likuiditas, risiko pasar (suku bunga dan nilai tukar), dan risiko kredit, yang dapat muncul dari dinamika makroekonomi baik domestik maupun global. Asesmen risiko dilakukan terhadap individu bank-bank besar itu dan keterkaitan satu sama lain dalam sistem perbankan baik dalam jangka pendek (*cross-section*) maupun secara dinamis untuk dua tahun ke depan (*forward looking*). Uji ketahanan (*stress-test*) atas ketiga aspek risiko tersebut didasarkan pada prakiraan makroekonomi Indonesia ke depan serta dampak dari dinamika perekonomian global. Sementara itu, surveilans pasar (*market surveillance*) diarahkan untuk menilai ketiga risiko di atas, yang dapat muncul dari aktivitas transaksi dan interkoneksi bank-bank besar itu di pasar uang dan pasar valas. Selain penilaian risiko transaksi dan interkoneksi di atas, surveilans makroprudensial dan pasar mencakup pula penilaian kapabilitas SDM, manajemen risiko, dan teknologi dari bank-bank besar dimaksud. Kedua surveilans ini sebagai implementasi UU P2SK yang memperkuat mandat Bank Indonesia atas kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar uang dan pasar valas. Hasil kedua surveilans ini menjadi pertimbangan penting dalam perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia serta bagian dari koordinasi pengawasan secara bilateral dengan OJK dan koordinasi stabilitas sistem keuangan dalam KSSK.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berbagai otoritas terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama tahun 2025, KSSK mengadakan rapat secara berkala setiap triwulan, dan waktu lain apabila

diperlukan. Koordinasi bersama KSSK ditujukan untuk melakukan asesmen bersama kondisi dan koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, kondisi SSK terjaga dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan baik dari global maupun domestik. Bank Indonesia turut menjaga SSK dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal, surveilans pada bank-bank besar khususnya atas risiko likuiditas dan risiko pasar, serta stabilitas sistem pembayaran. Uji ketahanan (*stress test*) atas SSK dilakukan bersama, dan demikian pula simulasi koordinasi untuk pencegahan dan penanganan kemungkinan terjadinya krisis. KSSK juga berkoordinasi terkait tindak lanjut atas peraturan dan ketentuan yang perlu dikeluarkan sebagai implementasi UU P2SK. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menerbitkan 16 dari 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI), dengan sisanya akan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Bank Indonesia juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai otoritas dan forum internasional di bidang makroprudensial dan SSK, sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan SSK domestik yang berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan global. Komitmen tersebut tecermin melalui peran aktif Bank Indonesia dalam berbagai forum strategis internasional seperti *Financial Stability Board* (FSB) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Bank Indonesia juga memperkuat peran kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik melalui penugasan sebagai Ketua *Working Group on Banking Supervision* (WGBS) dalam forum *Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP) untuk periode 2024–2026. Dalam kapasitas sebagai Ketua WGBS, Bank Indonesia secara aktif mendorong pembahasan isu-isu strategis, seperti penguatan pengawasan sektor keuangan, digitalisasi perbankan, serta asesmen risiko iklim yang semakin relevan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebagai hasil dari upaya dan peran aktif tersebut, Penghargaan *The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award 2025* diraih Bank Indonesia dari *The Asian Banker*.

Kebijakan Sistem Pembayaran

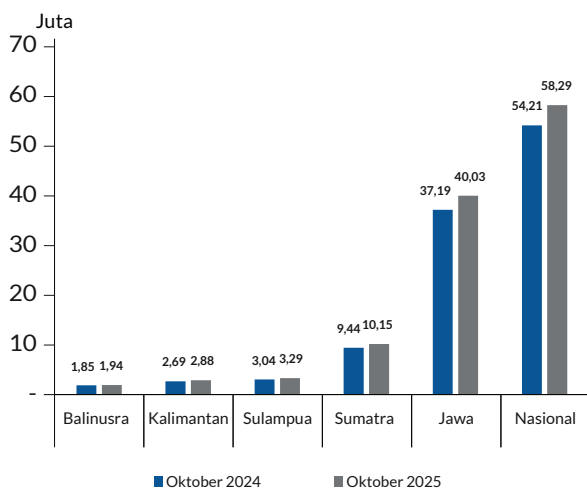
Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital (EKD) nasional. Penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar nasional QR transaksi ekonomi-keuangan digital di Indonesia terus diperluas dengan kampanye akseptasi secara luas dan pengembangan inovasi fitur-fitur kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kampanye perluasan akseptasi QRIS pada 2025 dilakukan secara luas baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Inovasi fitur QRIS terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berupa standar nasional QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP), khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Untuk semakin meningkatkan transaksi pembayaran digital bagi ekonomi kerakyatan, Bank Indonesia pada 2025 terus memberikan insentif berupa perluasan akseptasi digital sebagai komitmen Bank Indonesia untuk mendukung penyediaan layanan umum Pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO) dari 0,4% menjadi 0%. Hingga Oktober

2025, pengguna QRIS telah mencapai 58,30 juta dari target 58,0 juta dengan 41,19 juta *merchant*, yang sebagian besar UMKM. Dari sisi wilayah (Grafik 27.a), pengguna QRIS sebagian besar di Jawa yang mencapai 40,0 juta yang diikuti Sumatra (10,2 juta), Sulawesi, Maluku dan Papua (3,3 juta), Kalimantan (2,9 juta) dan Bali-Nusa Tenggara (1,9 juta). Akselerasi transaksi QRIS juga berlanjut dengan peningkatan volume sebesar 139,45% (yoy) dan nominal 102,0% (yoy) (Grafik 27.b). Semakin populernya QRIS bagi masyarakat menunjukkan semakin besarnya manfaat dari akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perluasan akseptasi dan stabilitas BI-FAST ditingkatkan sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang semakin digemari masyarakat.

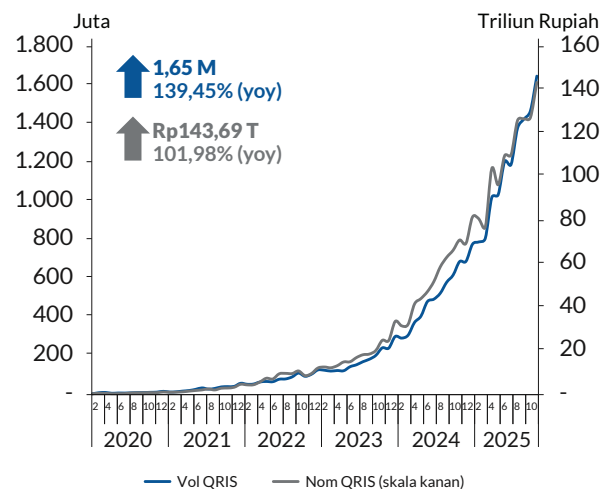
Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan transaksi ritel yang terus berkembang pesat, BI-FAST mulai diimplementasikan sejak tahun 2022 sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur serta merta (*real time*), dan beroperasi tanpa henti (24/7). Bank Indonesia juga menyediakan berbagai kemudahan, termasuk kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur baik secara independen maupun bersama (*sharing*),

Grafik 27.a. Jumlah Pengguna QRIS per Wilayah



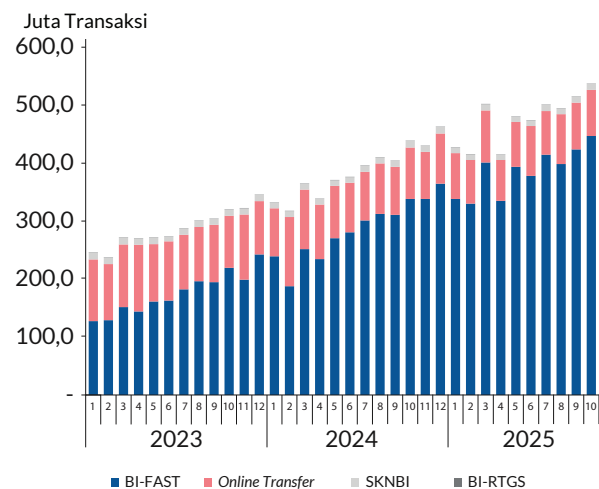
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 27.b. Perkembangan QRIS: Volume dan Nominal Transaksi



Sumber: Bank Indonesia

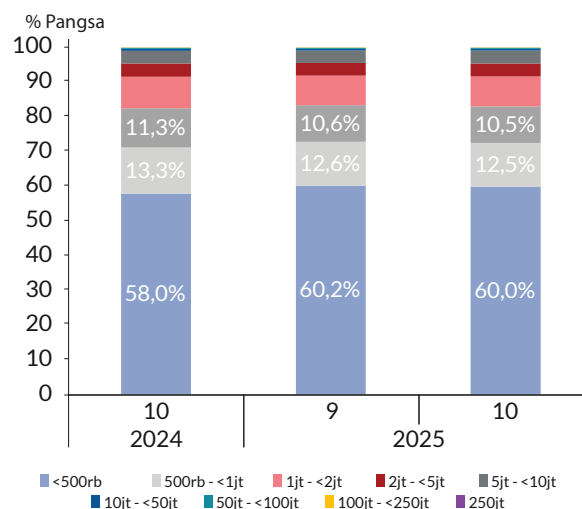
Grafik 28.a. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST vs Pembayaran Ritel Lain



Sumber: Bank Indonesia

penetapan batas maksimal transaksi Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta Rp19 per transaksi. Pembukaan layanan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 turut dioptimalkan mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*) untuk mendukung layanan ekonomi dan keuangan digital. Hingga Oktober 2025, volume transaksi layanan sistem pembayaran ritel di bawah Rp250 juta melalui BI-FAST mencapai 446,77 juta transaksi atau mencakup 83,2% dari volume transaksi pembayaran ritel (Grafik 28.a). Nominal per transaksi BI-FAST umumnya dalam jumlah yang kecil, yaitu di bawah Rp500 ribu per transaksi, yang mencakup sekitar 60,0% dari total seluruh segmen transaksi (Grafik 28.b). Perkembangan ini menunjukkan BI-FAST semakin mampu memberikan layanan pembayaran digital yang semakin inklusif kepada masyarakat dan mendorong kerja sama layanan pembayaran. Dengan semakin meluasnya akseptasi masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat stabilitas layanan BI-FAST secara *end-to-end*, dari sisi stabilitas infrastruktur sistem pembayaran di Bank Indonesia, teknologi dan manajemen risiko di Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), hingga layanan dari PSP kepada masyarakat. Aspek perlindungan konsumen, keamanan dari transaksi ilegal, dan keandalan

Grafik 28.b Perkembangan Volume BI-FAST per Kelompok Nominal Transaksi

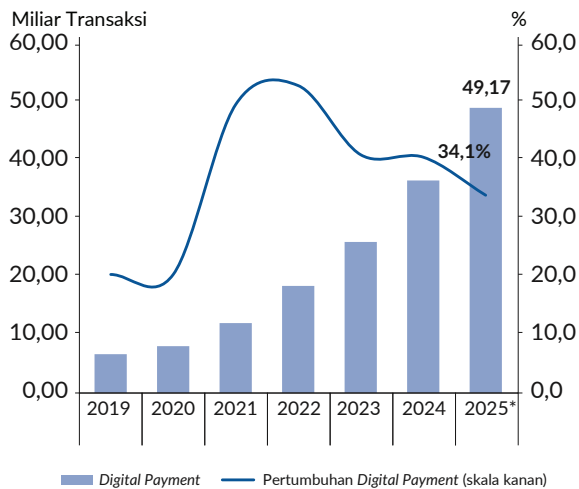


Sumber: Bank Indonesia

teknologi dari keamanan siber menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia.

Layanan sistem pembayaran digital oleh perbankan dan PSP nonbank meningkat pesat dengan interkoneksi layanan antarpelaku yang semakin tinggi. Layanan pembayaran secara digital (*digital payments*) pada 2025 diperkirakan mencapai 49,2 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp78,4 triliun (Grafik 29.a). Perkembangan pesat ini menunjukkan semakin luasnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital yang memberikan kenyamanan dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara cepat, mudah dan murah. Dalam kaitan ini, untuk semakin memudahkan transaksi pembayaran digital bagi masyarakat dan sekaligus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) terus diperluas untuk mendukung interkoneksi layanan perbankan digital antara bank dengan *fintech*. Setelah penerapan SNAP pada partisipasi *first movers* dan *second movers* pada tahun 2022 dan 2023, Bank Indonesia bekerja sama dengan ASPI pada tahun 2025 telah mengoptimalkan upaya perluasan integrasi adopsi SNAP pada segmen UMKM dan Nirlaba. Adopsi SNAP dalam interkoneksi layanan pembayaran oleh industri sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan signifikan,

Grafik 29.a. Perkembangan Volume Transaksi Digital Payment

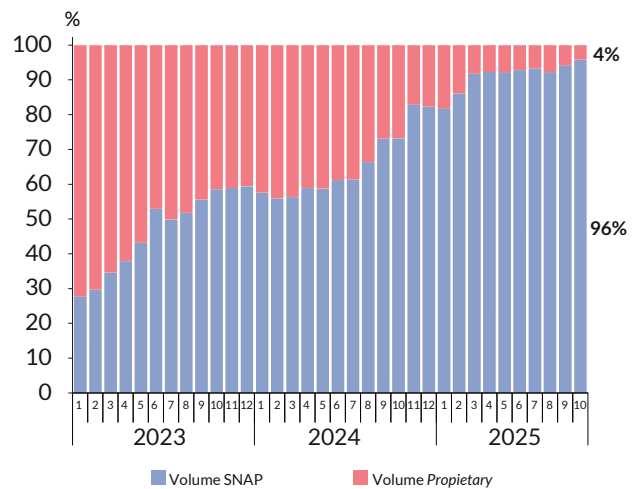


Keterangan: *Angka Prakiraan
Sumber: Bank Indonesia

yaitu mencapai sekitar 96% dari volume transaksi pembayaran (Grafik 29.b). Untuk memperkuat struktur industri PSP agar semakin sehat, efisien, stabil, Bank Indonesia terus memperkuat surveilans sistem pembayaran, baik dari sisi kompetensi SDM, manajemen risiko, maupun keandalan teknologi yang dipergunakan. Hasil dari surveilans ini menjadi dasar penentuan kesehatan dan klasifikasi PSP dalam kepesertaan pada BI-FAST, perizinan, dan pengembangan layanan pembayaran kepada masyarakat.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan transaksi keuangan Pemerintah. Kelancaran penyaluran Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus dijaga melalui koordinasi/fasilitasi, sosialisasi/edukasi, dan monitoring dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Implementasi dan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah terus diperluas untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan Pemerintah dan keuangan inklusif. KKI segmen Pemerintah yang diluncurkan pada Agustus 2022 ini merupakan skema kartu kredit nasional untuk domestik yang dimulai dari transaksi segmen Pemerintah dan telah menjangkau transaksi ritel. Setelah sukses mengintegrasikan QRIS ke dalam KKI segmen

Grafik 29.b. Pangsa Volume Transaksi Antar Pelaku melalui SNAP

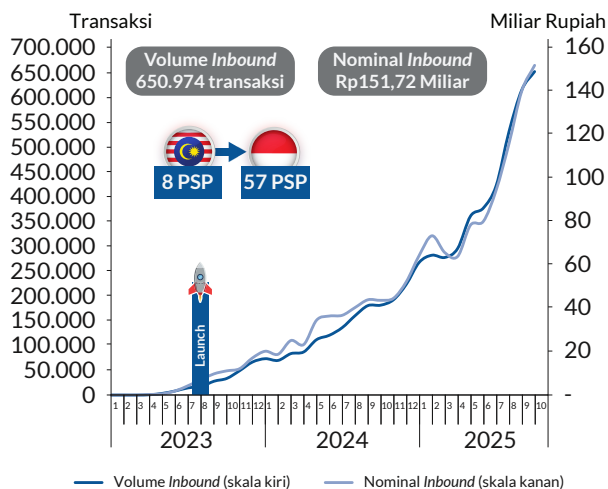


Sumber: Bank Indonesia

Pemerintah, Bank Indonesia pada 2025 fokus pada upaya mendorong penggunaan KKI segmen kartu kredit untuk memperluas akseptasinya. Dengan berbagai manfaat tersebut dan disertai konsistensi Bank Indonesia bersama ASPI untuk memperkuat implementasi dan akseptasi KKI segmen Pemerintah, jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi terus meningkat. Demikian pula, transaksi KKI terus meningkat baik secara volume maupun nominal transaksi, yang didominasi transaksi oleh Pemda melalui fitur QRIS. Transaksi KKI banyak dilakukan pada sektor transportasi dan hotel. Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus diperluas bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui pembentukan forum katalis P2DD. Di samping itu, sinergi dengan kementerian/ lembaga dan otoritas lainnya terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada Oktober 2025.

Bank Indonesia terus memperluas kerja sama pembayaran antarnegara melalui implementasi inisiatif *Regional Payment Connectivity (RPC)* di ASEAN dan sejumlah negara mitra ekonomi penting Indonesia lainnya. Perluasan kerja sama pembayaran berbasis QR code lintas negara saat ini telah diimplementasikan antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand (BoT) dan Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapura

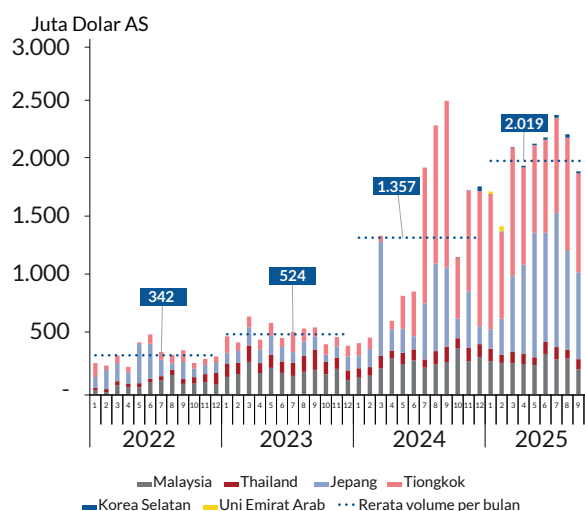
Grafik 30.a. Perkembangan Volume Transaksi Inbound QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia



Sumber: Bank Indonesia

(MAS), dan *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI) Jepang. Perkembangan menunjukkan semakin banyak penduduk kedua negara menggunakan QR untuk kemudahan bertransaksi, khususnya transaksi ritel untuk pariwisata. Sebagai contoh, kerja sama QR antara Bank Indonesia dengan BNM dewasa ini difasilitasi oleh 8 PSP dari Malaysia dan 57 PSP dari Indonesia, dengan penggunaan di Indonesia berjumlah sekitar 650 ribu transaksi dan dengan nilai sekitar Rp151,72 miliar (Grafik 30.a). Pada tahun 2025, pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang telah dilakukan untuk memperkuat konektivitas lintas batas. Perluasan kerja sama QRIS Antarnegara akan terus dilakukan dengan negara mitra lainnya, termasuk inisiasi perluasan kerja sama dengan Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung aktivitas perekonomian, termasuk sektor pariwisata, serta mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral dalam Kerangka *Local Currency Transaction* (LCT). Hingga Oktober 2025, penggunaan LCT mencapai ekuivalen 20,2 miliar dolar AS, atau rerata ekuivalen 2,0 miliar dolar AS per bulan, meningkat 58,8% dari rerata tahun 2024 sebesar 1,4 miliar dolar AS per bulan. Penggunaan LCT terbesar tercatat pada kerja sama Indonesia dengan Tiongkok,

Grafik 30.b. Perkembangan Local Currency Transaction (LCT)



Sumber: Bank Indonesia

disusul dengan Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan selanjutnya Uni Emirat Arab (Grafik 30.b).

Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan Rupiah Digital dalam “Proyek Garuda”, untuk memastikan Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia dalam era digital. Hal ini juga merupakan pelaksanaan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang Rupiah di Indonesia. Setelah mendapatkan berbagai masukan dari industri dan asosiasi, kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat, dewasa ini Bank Indonesia dalam proses eksperimentasi teknologi melalui *proof of concept* (POC), dengan fokus pada penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital. Saat ini, pengujian atas alternatif solusi teknologi sedang dilakukan Bank Indonesia, dengan pilihan antara sentralisasi dengan desentralisasi, serta dengan mempertimbangkan antara kecepatan dan keamanan penerbitan Rupiah Digital ke depan. *Output* POC ini akan menjadi landasan bagi proses selanjutnya berupa *sandboxing*, *piloting*, dan *prototyping* pada pengembangan tahap I (*immediate*) yang fokus pada pengedaran Rupiah Digital dari Bank Indonesia ke bank-bank yang akan ditunjuk sebagai *wholesaler*, sekaligus titik awal bagi pengembangan Rupiah Digital tahap berikutnya

(*intermediate*) untuk penggunaan Rupiah Digital dalam sekuritas keuangan digital (aset keuangan digital).

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi pengelolaan uang Rupiah berlandaskan pada *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2030, dengan tema *modern, kolaboratif, dan sustainable*. Implementasi transformasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain ketersediaan uang Rupiah, pengedaran uang Rupiah, serta infrastruktur pengelolaan uang Rupiah. Penguatan pada aspek ketersediaan uang Rupiah dilakukan melalui penguatan akurasi perhitungan estimasi kebutuhan uang Rupiah, pengelolaan persediaan uang Rupiah yang lebih optimal, serta penguatan kualitas bahan dan desain uang Rupiah guna menjamin peredaran uang yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Pada aspek pengedaran uang Rupiah, peningkatan efisiensi sistem distribusi ditempuh melalui optimalisasi rute distribusi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang semakin baik, serta implementasi *business process reengineering* pengedaran uang Rupiah. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses pengedaran uang Rupiah yang berdampak pada efisiensi sumber daya. Sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan, memastikan ketepatan waktu, serta menjaga keamanan distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Optimalisasi pengedaran uang Rupiah juga dilakukan melalui pengembangan Sentra Kas Mitra dan Mitra Layanan. Infrastruktur pengelolaan uang Rupiah (PUR) yang modern terus diperkuat melalui pengembangan *Digital Smart Cash Management* sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem PUR yang terintegrasi. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan proses perencanaan, *monitoring*, pemantauan, serta pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data yang kuat.

Bank Indonesia terus memperluas layanan kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan

untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat, Bank Indonesia senantiasa melaksanakan kas keliling di berbagai wilayah termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pelaksanaan layanan kas keliling di daerah 3T dilakukan melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang pada tahun ini telah menjangkau 90 pulau 3T di 18 provinsi. Seluruh upaya tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat misi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri dan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Selain pelaksanaan ERB, Bank Indonesia juga menyelenggarakan program tahunan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025. Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Indonesia dalam memastikan tersedianya uang Rupiah dalam kondisi layak edar, dengan jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, serta didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Realisasi *outflow* SERAMBI 2025 tercatat sebesar Rp161,3 triliun. SERAMBI 2025 dilakukan melalui berbagai kanal layanan penukaran. Secara nasional, sebanyak 6.897 titik layanan telah dihadirkan, terdiri dari 4.141 titik layanan perbankan dan 2.756 titik layanan langsung oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga mendorong penerapan pengelolaan uang Rupiah yang berkelanjutan.

Komitmen terhadap prinsip keberlanjutan (*green commitment*) diwujudkan oleh Bank Indonesia melalui program Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Berkelanjutan, yang mencakup seluruh siklus pengelolaan uang mulai dari pencetakan, pengedaran, hingga pemusnahan uang Rupiah. Pada aspek pencetakan, Bank Indonesia memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan melalui penguatan *life cycle* uang Rupiah. Upaya ini diwujudkan dengan penggunaan *durable paper* dalam proses desain dan pencetakan uang Rupiah, guna meningkatkan ketahanan fisik sekaligus memperpanjang usia edar uang. Pada aspek pengedaran, komitmen hijau diwujudkan melalui implementasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan, baik yang berstandar Euro 4 atau Euro

5, maupun kendaraan *hybrid*, untuk mendukung distribusi uang yang efisien dan rendah emisi. Sementara itu, pada aspek pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia menerapkan konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) melalui dua inisiatif utama, yaitu *waste to energy* dan *waste to product*, sebagai wujud tanggung jawab lingkungan dalam setiap tahapan pengelolaan uang. Pemanfaatan limbah uang Rupiah menjadi energi dilakukan dengan mengolah briket limbah hasil racikan uang kertas sebagai bahan *co-firing* di sejumlah pembangkit listrik. Inisiatif ini menghasilkan sekitar 1,15 juta kWh listrik per tahun, yang setara dengan kebutuhan listrik bagi sekitar 72,3 ribu rumah tangga, dengan pemanfaatan ± 5.517 ton limbah uang Rupiah per tahun. Selain itu, pemanfaatan limbah uang Rupiah juga dikembangkan melalui program *waste to product*, antara lain dengan mengolah limbah menjadi *soil composter* dan produk kerajinan bernilai guna, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan semangat transformasi dan digitalisasi, Bank Indonesia terus melangkah maju membangun pengelolaan uang Rupiah yang modern, kolaboratif dan berkelanjutan (*sustainable*).

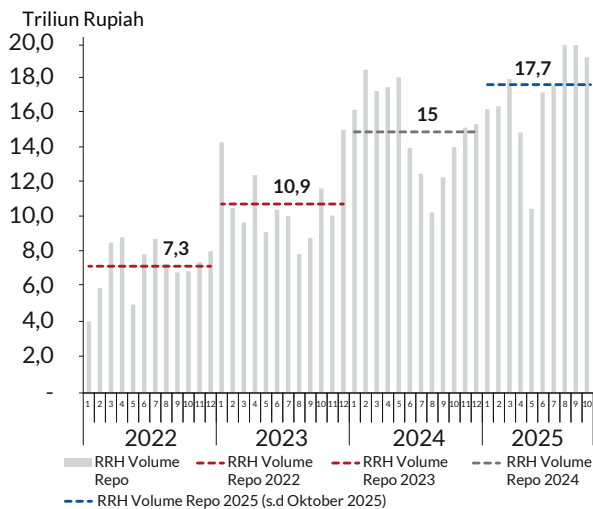
Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia terus melanjutkan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang modern dan maju serta terintegrasi dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional. Melanjutkan capaian dan momentum positif yang telah terbangun melalui implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, Bank Indonesia menetapkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas 2030 (BPPU 2030) sebagai arah dan landasan strategis pengembangan PUVA di Indonesia. Penetapan BPPU 2030 sekaligus merupakan implementasi UU P2SK yang memberi mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi PUVA. UU P2SK juga memperluas mandat tersebut

dengan menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan derivatif PUVA yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). BPPU 2030 dirancang dengan sasaran strategis yang fokus pada 4 (empat) area, yaitu produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku pasar (*participants*), dan infrastruktur (*infrastructure*) pasar keuangan atau 3P+I. Transformasi BPPU 2030 merupakan penguatan BPPU 2025 khususnya terkait integrasinya dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market*, besaran strategis pada aspek 3P+I, pengembangan infrastruktur PUVA dengan prinsip 3i dan digitalisasi data, serta penguatan pengaturan dan pengawasan PUVA. Pencapaian sasaran strategis pada BPPU 2030 akan ditempuh melalui 3 (tiga) strategi utama, mencakup (1) pengembangan produk yang variatif dan likuid serta harga yang kredibel dan transparan, (2) pengembangan pelaku yang aktif dan kompeten serta Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang memenuhi prinsip 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, dan (3) sinergi dan koordinasi untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Bank Indonesia meyakini PUVA yang modern dan maju merupakan fondasi penting dalam memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan fiskal Pemerintah, serta memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha dan perekonomian.

Sejak implementasi BPPU 2030, transaksi PUVA Indonesia terus melanjutkan perkembangan positif. Dari sisi pengembangan produk di pasar uang, data hingga Oktober 2025 menunjukkan rerata harian nilai transaksi repo pada tahun 2025 telah mencapai Rp17,7 triliun, meningkat 17,9% dari Rp15 triliun tahun 2024 dan meningkat 62,7% dari Rp10,9 triliun pada tahun 2023 (Grafik 31). Sementara itu, transaksi OIS juga mengalami peningkatan rerata harian nilai transaksi OIS yang hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp66,5 miliar, meningkat 35,71% dari Rp49 miliar pada tahun 2024. Perkembangan positif tersebut didorong oleh berbagai inisiatif di tahun 2025 antara lain (1) penerapan kewajiban Dealer

Grafik 31. Rerata Harian Transaksi Repo



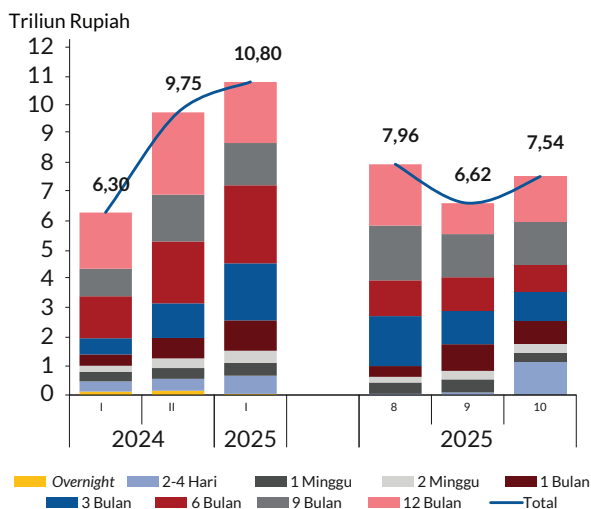
Sumber: Bank Indonesia

Utama (DU) PUVA dalam meningkatkan *counterparty* transaksi repo dan perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA), (2) perluasan *underlying* repo dalam operasi moneter yang menginisiasi perluasan *underlying* repo antarpelaku, dan (3) penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) sebagai instrumen surat berharga dengan kupon mengambang. Secara lebih rinci pada inisiatif pertama, penetapan kewajiban Dealer Utama PUVA untuk meningkatkan *counterparty* transaksi repo dan perluasan penandatanganan GMRA berkontribusi terhadap peningkatan interkoneksi pelaku transaksi repo. Inisiatif ini pada gilirannya juga dapat mendorong peningkatan volume dan efisiensi transaksi repo, memperluas basis pelaku pasar, serta meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional. Inisiatif kedua, perluasan *underlying* repo dalam operasi moneter dengan mengikutsertakan surat berharga berkualitas tinggi lainnya berupa obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik yang dibentuk atau didirikan Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat (*special mission vehicle*), menginisiasi perluasan *underlying* repo antarpelaku. Inisiatif ketiga, penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) sebagai instrumen surat berharga dengan kupon mengambang akan meningkatkan eksposur pelaku terhadap risiko suku bunga sehingga ditargetkan akan mendorong peningkatan transaksi *Overnight Index Swap* (OIS) sebagai instrumen

lindung nilai suku bunga. Peningkatan volume transaksi OIS akan mendorong pembentukan harga di pasar uang sekaligus melengkapi *term-structure* pasar uang. Sejalan dengan inisiatif tersebut, untuk meningkatkan likuiditas di pasar OIS juga dilakukan pengembangan peran perusahaan pialang untuk memfasilitasi *matchmaking* OIS pada November 2025. Secara khusus, perkembangan positif dari transaksi repo juga mencerminkan penguatan peran transaksi repo sebagai instrumen yang memudahkan pelaku pasar melakukan pengelolaan likuiditas perbankan dengan memanfaatkan surat-surat berharga (khususnya SBN dan SRBI). Perkembangan ini turut memberikan dampak positif bagi pasar SBN. Likuiditas SBN meningkat dan *yield* SBN ikut turun sehingga berkontribusi positif terhadap penurunan beban pembiayaan fiskal Pemerintah.

Pendalaman PUVA juga diperkuat dengan strategi operasi moneter *pro-market* yang diterapkan Bank Indonesia. Strategi operasi moneter *pro-market* di antaranya dilakukan melalui penyediaan instrumen pasar uang yaitu SRBI, SUKBI, SVBI, SUVBI, dan BI-FRN guna mendorong peningkatan transaksi instrumen pasar uang tersebut di pasar sekunder sehingga memperkuat fungsi pasar sebagai sumber pembentukan harga (*price discovery*). Perkembangan transaksi pasar sekunder instrumen pasar uang di tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, didorong tren peningkatan transaksi SRBI di pasar sekunder. Pada semester I-2024 rerata harian transaksi SRBI di pasar sekunder baru mencapai sekitar Rp6,3 triliun. Pasca-implementasi Dealer Utama PUVA pada Mei 2024, rerata harian transaksi SRBI di pasar sekunder terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp10,8 triliun di semester I-2025 (Grafik 32.a). Sejalan dengan perkembangan tersebut, interkoneksi antarpelaku pasar juga menunjukkan peningkatan yang tecermin dari rerata harian transaksi SRBI antara Dealer Utama dan Dealer Utama yang mengalami peningkatan dari Rp3,83 triliun pada Semester II 2024 menjadi Rp4,02 triliun pada Semester I 2025 serta antara Dealer Utama dan NonDealer Utama yang mengalami peningkatan dari Rp7,08 triliun pada Semester II 2024 menjadi Rp8,17 triliun pada Semester I 2025 (Grafik 32.b). Perkembangan positif tersebut tidak terlepas

Grafik 32.a. Transaksi SRBI di Pasar Sekunder per Jangka Waktu

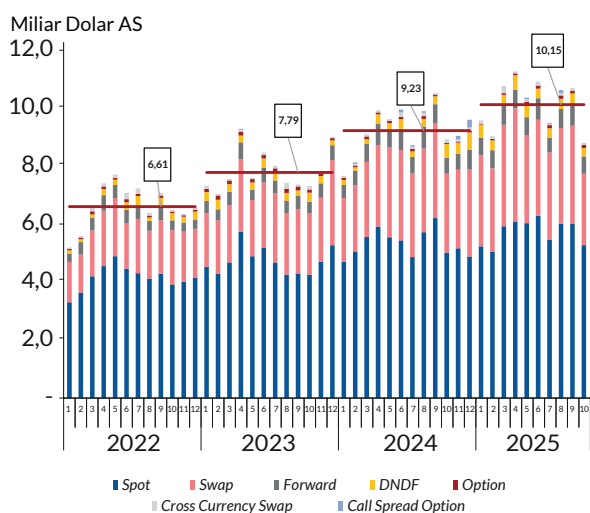


Sumber: Bank Indonesia

dari kebijakan Bank Indonesia dalam menata struktur pelaku pasar melalui seleksi Dealer Utama untuk peningkatan transaksi dan interkoneksi antarpelaku di PUVA. Capaian ini sekaligus menunjukkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perbankan serta pelaku pasar lainnya dalam mengelola likuiditas dan portfolio investasi, yang sebelumnya masih bergantung pada operasi moneter Bank Indonesia.

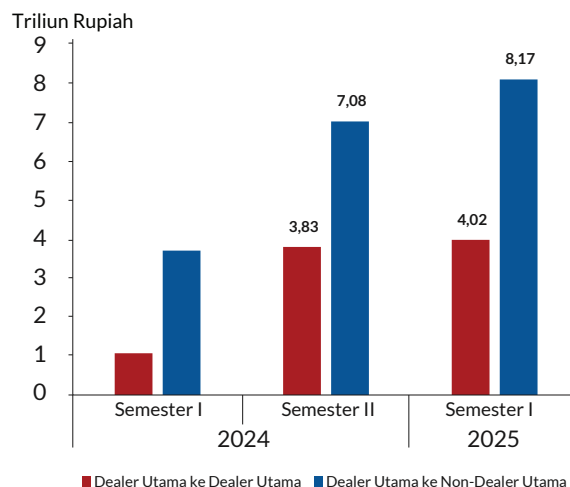
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja transaksi di pasar valuta asing (valas) juga menunjukkan perkembangan positif. Rerata harian transaksi valas sampai dengan Oktober 2025 tercatat

Grafik 33. Rerata Harian Transaksi Valas



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 32.b. Transaksi SRBI Dealer Utama dengan Dealer Utama dan Dealer Utama dengan Non-Dealer Utama



Sumber: Bank Indonesia

sebesar 10,15 miliar dolar AS, meningkat 10% dari 9,23 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan 30% dari 7,79 miliar dolar AS pada tahun 2023 (Grafik 33). Meskipun masih didominasi transaksi *spot*, porsi transaksi derivatif valas terus meningkat menjadi 43% dari 42% pada tahun 2024 dan 40% di tahun 2023. Sejalan dengan pengembangan transaksi derivatif valas, peningkatan rerata harian transaksi DNDF terus berlanjut hingga mencapai 368 juta dolar AS per hari di tahun 2025 (sampai dengan Oktober 2025) dari 298 juta dolar AS per hari di tahun 2024 dan 268 juta dolar AS di tahun 2023. Peningkatan volume DNDF turut meningkatkan *competitiveness* harga DNDF dibandingkan dengan NDF *offshore* sehingga transaksi DNDF semakin efisien. Perkembangan positif tersebut didorong oleh berbagai langkah strategis di tahun 2025 antara lain: (1) implementasi fasilitas DNDF untuk Dealer Utama PUVA yang menandakan perluasan cakupan Dealer Utama PUVA di pasar valuta asing, (2) pelaksanaan forum koordinasi dan sinergi dengan asosiasi pelaku pasar untuk pengembangan pasar valas, dan (3) upaya perluasan kontrak standar penerapan margin.

Inisiatif pengembangan produk pasar valas utamanya diarahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar valas. Pertama, implementasi Dealer Utama pasar valas pada awal semester II 2025 telah berkontribusi terhadap perkembangan transaksi

DNDF baik dari sisi volume maupun interkoneksi antarpelaku. *Kedua*, koordinasi dengan asosiasi pelaku pasar yaitu APUVINDO, mencakup evaluasi pengembangan DNDF dan sosialisasi implementasi lindung nilai, mendukung perluasan pelaku transaksi valas. Bank Indonesia telah memenuhi komitmen G20 *Over the Counter (OTC) Derivatives Market Reform* melalui implementasi transaksi DNDF yang terstandarisasi dan dikliringkan melalui *Central Counterparty (CCP)*. *Ketiga*, pemberlakuan ketentuan mengenai kebijakan *Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD)* atau Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP pada 1 September 2025, juga mendukung Bank Indonesia untuk terus mengembangkan DNDF yang dikliringkan melalui CCP. Untuk itu, pada 2025 Bank Indonesia telah menerapkan perluasan kontrak standar margin diawali dengan penandatanganan komitmen oleh pelaku pasar. Berbagai langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat DNDF sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), baik bagi perbankan dan pelaku pasar maupun bagi dunia usaha.

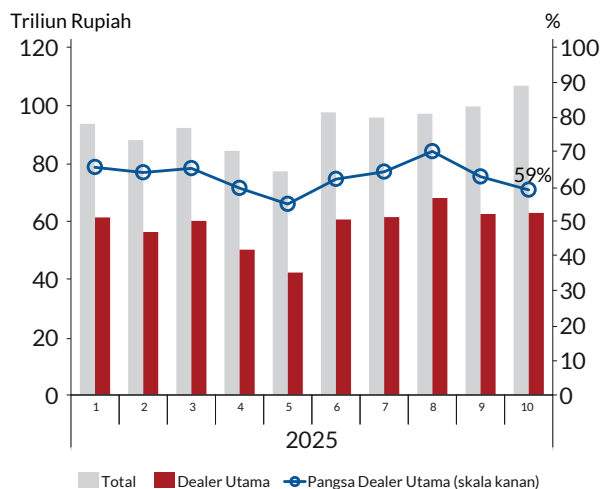
Perkembangan positif di pasar uang dan pasar valas juga didukung dengan perolehan *netting opinion* dari *International Swaps and Derivatives Association (ISDA)* sejak April 2025 dan *collateral opinion* pada Agustus 2025 sehingga mendukung implementasi *close out netting*. Sebagai kelanjutan dari perolehan status *netting opinion* tersebut, Bank Indonesia akan berfokus pada perluasan adopsi kontrak standar PUVA antara lain GMRA, ISDA, PIDI, dan Kontrak Penerapan Margin. Upaya tersebut sejalan dengan rencana strategis Bank Indonesia untuk terus mengembangkan produk PUVA dengan memperdalam repo dan DNDF, serta memperluasnya dengan produk-produk lain seperti *swap* suku bunga (*Interest Rate Swap, IRS*) dan *swap* antar nilai tukar. *Regulatory reform* di pasar uang dan pasar valas terus diperkuat melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan yang mengatur transaksi pasar uang dan penyelenggaraan sarana transaksi. Kelanjutan *regulatory reform* tersebut senantiasa diarahkan kepada tujuan pendalaman pasar uang dan

pasar valas sehingga efektivitas transmisi kebijakan moneter dapat meningkat, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pembiayaan ekonomi nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Dari sisi mekanisme pembentukan harga (*pricing*), inisiatif diarahkan untuk pembentukan *term structure* pasar uang yang efisien dari tenor 2 minggu hingga 12 Bulan. Di Pasar Uang, Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga acuan *INDONIA* untuk tenor *overnight* dan *Compounded INDONIA* untuk tenor 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari yang bersifat *backward looking*. Selanjutnya, sebagai bagian dari *benchmark reform*, Bank Indonesia menerbitkan *BI-FRN (Floating Rate Note)* untuk mendorong perkembangan transaksi *Overnight Index Swap (OIS)*. Harga yang terbentuk dari transaksi *OIS* akan mendukung pembentukan struktur suku bunga di pasar uang yang bersifat *forward looking* berdasarkan transaksi khususnya untuk tenor 2 minggu hingga 12 bulan. Perkembangan tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung pembentukan *money market curve* yang kredibel, sehingga semakin memperkuat fungsi *price discovery* di pasar uang.

Di sisi pasar valas, *JISDOR* dan Kurs acuan Non-USD/IDR telah dikembangkan sebagai referensi nilai tukar harian di pasar valas dengan mengacu pada praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Kurs acuan Non-USD/IDR diperluas menjadi 17 *currency pair* pada tahun 2025, dari sebelumnya 14 *currency pair* pada tahun 2024, dengan penambahan kurs baru meliputi AED/IDR, PHP/IDR dan INR/IDR. Sejalan dengan inisiatif di pasar uang, pengembangan transaksi *FX Swap* dan *FX Forward* untuk tenor panjang akan diarahkan kepada upaya pembentukan *FX Forward Curve* sebagai kurs acuan dalam transaksi derivatif di pasar valas. Terbentuknya *money market curve* dan *FX forward curve* yang kredibel dan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya mengindikasikan pasar uang dan pasar valas yang dalam dan efisien sehingga mampu memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter secara menyeluruh.

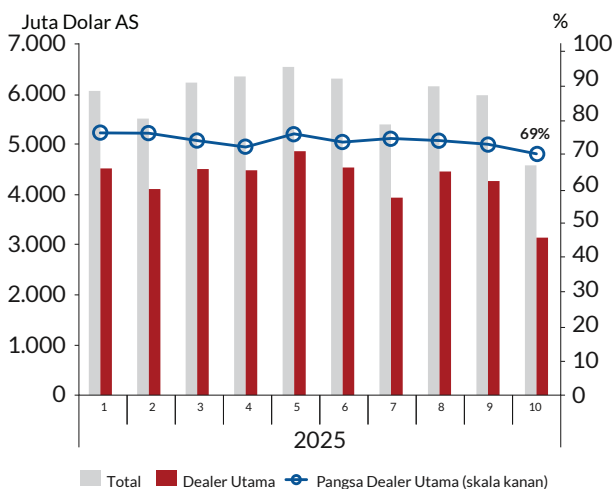
Grafik 34.a. Transaksi Dealer Utama di Pasar Uang



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia senantiasa melakukan pengembangan pelaku PUVA agar semakin aktif, kompeten, berintegritas, dan profesional sekaligus memperkuat peran asosiasi dalam mempercepat pendalaman PUVA. Sebagai bentuk penataan struktur pelaku PUVA untuk menciptakan pelaku pasar yang aktif, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Dealer Utama PUVA pada tahun 2024. Hingga Oktober 2025, Bank Indonesia telah menetapkan 20 bank sebagai Dealer Utama PUVA yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam akselerasi pengembangan PUVA. Hal ini tecermin dari *share* rerata harian transaksi Dealer Utama PUVA yang telah mencapai 59% di pasar uang (Grafik 34.a) dan 69% di pasar valas (Grafik 34.b). Pencapaian tersebut dikontribusikan melalui implementasi kebijakan Dealer Utama PUVA antara lain: (1) penguatan kewajiban Dealer Utama PUVA meliputi peningkatan peran Dealer Utama PUVA sebagai *market maker*, keaktifan dalam transaksi operasi moneter, serta partisipasi aktif dalam transaksi di PUVA, (2) penguatan kapasitas Dealer Utama PUVA melalui peningkatan *counterparty line* repo dan penyediaan fasilitas DNDF khusus Dealer Utama PUVA, dan (3) evaluasi kinerja berkala atas pemenuhan kriteria Dealer Utama PUVA. Secara lebih rinci untuk implementasi pertama, dalam menjalankan kewajibannya, Dealer Utama PUVA memainkan peran penting dalam mendukung

Grafik 34.b. Transaksi Dealer Utama di Pasar Valas



Sumber: Bank Indonesia

inisiatif strategis pendalaman PUVA sejalan dengan implementasi BPPU 2030 antara lain pelaksanaan transaksi repo seiring perluasan *underlying* repo dengan surat berharga berkualitas tinggi serta pembentukan harga OIS melalui penyediaan kuota. Pada implementasi kedua, penguatan kapasitas Dealer Utama PUVA juga diakselerasi melalui penerapan kewajiban *counterparty line* repo pada April 2025 dan penyediaan fasilitas DNDF khusus Dealer Utama PUVA sejak awal semester II 2025 untuk mendorong peningkatan likuiditas dan efisiensi pasar repo dan pasar derivatif valas domestik. Selanjutnya, Bank Indonesia secara berkala juga melakukan evaluasi atas kinerja Dealer Utama PUVA berdasarkan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dari tercapainya tujuan dari implementasi Dealer Utama PUVA.

Dari sisi kualitas, pelaku pasar PUVA khususnya aspek kompetensi, tingkat kepemilikan sertifikat *tresuri* pada tahun 2025 telah mencapai 95% dari total *tresuri* dealer, yang mencerminkan peningkatan profesionalisme dan kapasitas pelaku PUVA. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan yang terus menyempurnakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Tresuri* agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan kebutuhan

industri keuangan terkini. Penyempurnaan ini bertujuan memperkuat kredibilitas sertifikasi profesi tresuri sebagai acuan kompetensi nasional sekaligus memastikan pelaku pasar memiliki kemampuan teknis, integritas, dan profesionalisme yang sesuai dengan standar global. Dalam proses penguatan kualitas pelaku PUVA, Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO) senantiasa berperan aktif sebagai mitra strategis Bank Indonesia antara lain dalam penyelenggaraan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar (*Market Code of Conduct*).

Akselerasi pengembangan PUVA dilakukan dengan melibatkan APUVINDO sebagai mitra strategis Bank Indonesia diseluruh aspek 3P+I untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas.

Beberapa langkah konkret kolaborasi APUVINDO dalam pengembangan pasar antara lain (1) penyusunan pedoman akuntansi transaksi PUVA melalui CCP yang disusun oleh APUVINDO dengan melibatkan KPEI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan anggota CCP, (2) kegiatan *sharing session* dari APUVINDO kepada seluruh perbankan mengenai implementasi dan keuntungan dari berbagai inisiatif pengembangan PUVA seperti produk PUVA dan CCP, serta (3) evaluasi inisiatif pengembangan PUVA. Melalui koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia, seluruh program kerja APUVINDO senantiasa diarahkan agar selaras dengan arah kebijakan BPPU 2030 dan mandat PBI No.6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valas, guna memperkuat tata kelola, efisiensi, dan daya saing pasar keuangan nasional.

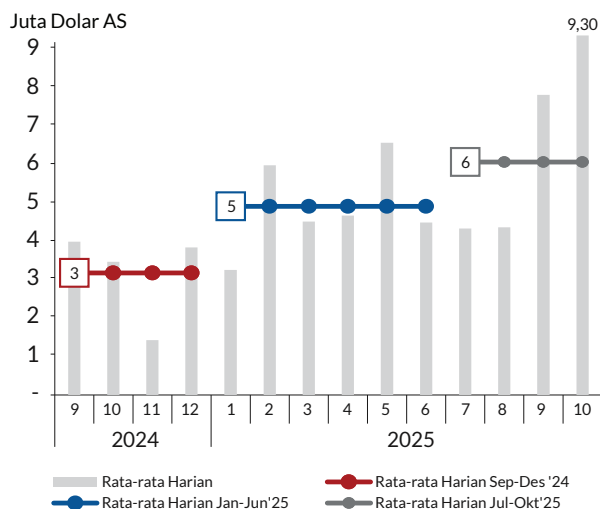
Dari sisi infrastruktur PUVA, penguatan dan pengembangan dilakukan menyeluruh mencakup 3 (tiga) sisi yaitu *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*. Penguatan infrastruktur **pertama** yakni *front end* ditujukan untuk mendukung strategi integrasi PUVA dengan operasi moneter *pro-market* guna mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pembentukan harga yang efisien. Penguatan infrastruktur *front-end* di sisi Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform* (BI – ETP)

dilakukan melalui peningkatan fitur untuk mengakomodasi: (1) penerbitan BI-FRN, (2) perluasan *underlying repo* Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh korporasi berupa lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik dengan penugasan khusus, dan (3) penyesuaian platform peserta BI-ETP berupa *enhancement* fitur *collateral search*. Guna mendukung penerapan strategi operasi moneter *pro-market* yang bertujuan untuk mendorong pelaku pasar lebih banyak melakukan transaksi dalam pengelolaan likuiditas melalui transaksi antarpelaku dibanding transaksi dengan Bank Indonesia, kapabilitas infrastruktur sarana transaksi terus diperkuat. Penguatan infrastruktur *front-end* di sisi sarana transaksi antarpeserta dilakukan melalui: (1) penerbitan ketentuan penyelenggaraan sarana transaksi, (2) pengembangan interkoneksi dari sistem transaksi antar pelaku pasar ke *Central Counterparty*, dan (3) penguatan peran perusahaan pialang sebagai operator *matchmaking* OIS antarbank.

Kedua, penguatan infrastruktur di sisi *middle-end*, difokuskan pada penguatan *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA).

Sejak peluncuran pada 30 September 2024, volume transaksi DNDF yang dikliringkan di CCP PUVA terus meningkat hingga mencapai 1,3 miliar dolar AS dengan rata-rata harian (RRH) terus meningkat mencapai 9,3 juta dolar AS pada Oktober 2025 dibandingkan dengan kondisi bulan awal implementasi (September 2024) sebesar 4 juta dolar AS (Grafik 35). Pemanfaatan CCP PUVA oleh pelaku pasar dapat semakin meningkatkan efisiensi transaksi PUVA melalui fitur novasi, *multilateral netting*, dan penguatan manajemen risiko khususnya *counterparty risk*. Penguatan CCP PUVA terus dilakukan sepanjang tahun 2025 melalui (1) peningkatan fitur CCP PUVA agar dapat mengkliringkan berbagai variasi tenor, (2) penguatan *rule book* CCP PUVA agar dapat mengakomodasi peningkatan fitur dan kapabilitas CCP PUVA, (3) penerbitan pedoman akuntansi bagi transaksi PUVA yang dikliringkan di CCP oleh

Grafik 35. Rata-rata harian Transaksi DNDF melalui Central Counterparty

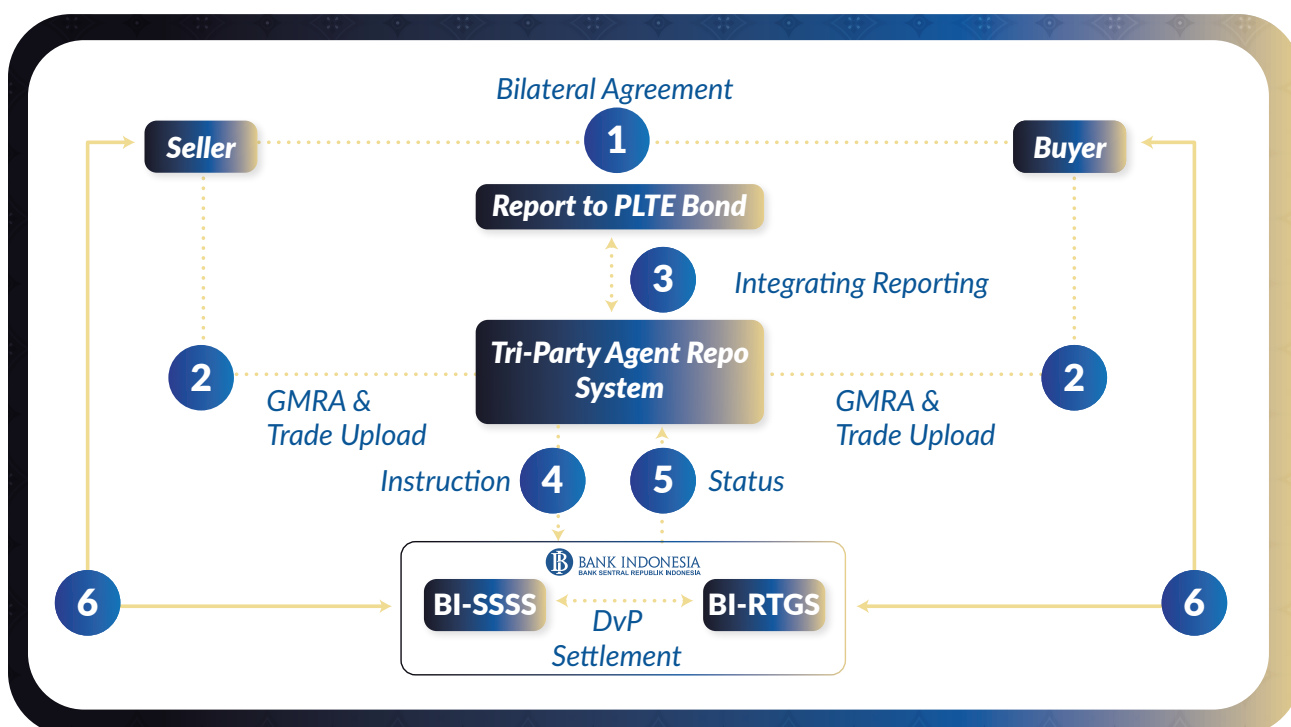


Sumber: Bank Indonesia

APUVINDO. Penguatan CCP juga dilakukan melalui (1) penyelenggaraan *workshop* CCP dan seminar nasional mengenai CCP, serta penyelenggaraan sosialisasi mengenai CCP berkolaborasi dengan APUVINDO, (2) perluasan peserta CCP PUVA, dan (3) inisiasi perolehan status *recognized* CCP dari regulator di Uni Eropa (European Commission dan European Securities and Market Authority) dan Inggris (His Majesty Treasury and Bank of England).

Peningkatan kapabilitas CCP PUVA juga dilakukan melalui penambahan layanan *Tri-Party Agent Repo* (TPA Repo) yang mulai beroperasi pada tanggal 29 September 2025. Perluasan peran CCP sebagai penyelenggara TPA Repo memungkinkan Bank untuk mengalihkan fungsi *collateral management*, administrasi dan penyelesaian transaksi, serta pelaporan transaksi repo dari *back office* ke TPA Repo. Melalui TPA Repo, pelaku pasar dapat mengurangi risiko operasional sekaligus mendorong transaksi repo yang lebih efisien, transparan, dan terstandarisasi sehingga mendukung akselerasi pengembangan pasar repo. Lebih lanjut, perluasan layanan CCP sebagai *Tri-Party Repo Agent* mencerminkan implementasi IPK yang selaras dengan prinsip 3i, dengan dukungan operasional yang terintegrasi secara *end-to-end* dengan sistem penyelesaian baik sisi surat berharga maupun dana yaitu BI-SSSS dan BI-RTGS (Gambar 3). Pada tahap awal, terdapat 8 bank yang menjadi *piloting member* dari TPA Repo, meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Maybank, dan BPD Jawa Timur. Hingga satu bulan implementasi TPA Repo (per 31 Oktober 2025), volume transaksi repo interbank via TPA

Gambar 3. Proses Bisnis *Tri-Party Agent* (TPA) Repo



Sumber: Bank Indonesia

repo mencapai Rp194 miliar, dengan sebaran tenor *overnight* (O/N), 1 minggu, dan 2 minggu.

Ketiga, penguatan infrastruktur di sisi *back end* difokuskan pada penguatan di sisi Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Kapabilitas infrastruktur sisi *back end* dalam menyelesaikan berbagai ragam dan variasi transaksi PUVA berperan krusial dalam mendukung kesuksesan inisiatif pengembangan produk yang diarahkan untuk meningkatkan variasi dan likuiditas PUVA. Penguatan infrastruktur di sisi BI-SSSS dilakukan melalui pengembangan sistem untuk mendukung: (1) penerbitan BI-FRN termasuk setelmen lelang repo Bank Indonesia dengan *underlying* BI-FRN, setelmen transaksi BI-FRN di pasar sekunder antar pelaku pasar, dan pembayaran imbalan BI-FRN, (2) perluasan investor Sukuk Bank Indonesia dari semula hanya bank menjadi termasuk investor nonbank, dan (3) perluasan *underlying* repo Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh korporasi yang merupakan lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik dengan penugasan khusus. Selain pengembangan pada sistem saat ini, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan BI-SSSS Generasi III melalui penyusunan kebutuhan bisnis dengan melibatkan peran serta dan masukan dari pelaku pasar yang diwakili oleh asosiasi pelaku pasar.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan otoritas sektor keuangan lainnya (Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan) baik untuk pengembangan pasar keuangan dalam edukasi dan literasi keuangan maupun untuk sumber pembiayaan ekonomi. Sinergi diperkuat melalui Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) yang terdiri dari 4 (empat) otoritas di sektor keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara berkesinambungan sebagaimana amanat UU P2SK. Sinergi FK-PSK juga diarahkan untuk mendorong peningkatan basis investor ritel melalui kampanye kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Sepanjang

tahun 2025, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali LIKE IT di berbagai kota di Indonesia yang diarahkan pada generasi muda. Dengan adanya LIKE IT, generasi muda diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam investasi di pasar keuangan sebagai bagian dari pendidikan perencanaan keuangan mereka, dan sekaligus investasi yang selanjutnya akan berperan penting untuk peningkatan tabungan dan pembiayaan perekonomian nasional. Kemudahan investasi di pasar keuangan semakin didukung pula dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga inovasi investasi ritel yang terus dikembangkan dan ditawarkan oleh perbankan dan perusahaan sekuritas. Di samping itu, sinergi dan penguatan juga ditempuh dalam rangka harmonisasi pengaturan perpajakan pasar uang dan pengaturan perbankan guna mendukung pengembangan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, serta pengembangan infrastruktur antarpasar untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan infrastruktur pasar keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga turut aktif dalam pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan (*environmental, social, and governance*, atau ESG). Di samping itu, sinergi dan penguatan juga ditempuh dalam rangka harmonisasi pengaturan untuk mendukung pengembangan PUVA dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

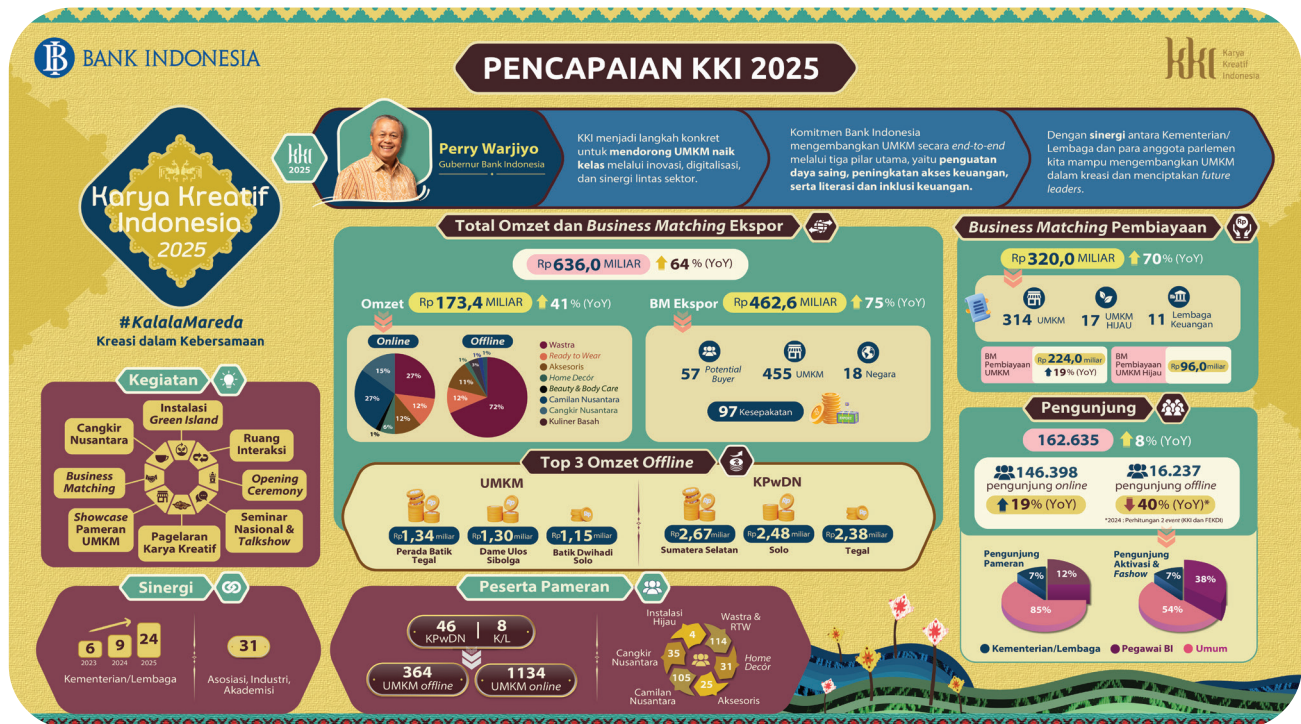
Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong akselerasi Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Pelaksanaan IEKB ditempuh melalui (i) pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing, (ii) pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang optimal, dan (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Secara lebih detil, pengembangan ekosistem

berfokus pada pemberdayaan usaha inklusif guna meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok subsisten secara *end to end* dari hulu ke hilir melalui berbagai inisiatif strategis seperti ECO-RISE (*Empowering Community & MSMEs toward Resilient, Inclusive, and Sustainable Economy*) dan penguatan kapasitas dan pendampingan secara *end to end*. Inisiatif ini diperkuat dengan perluasan akses pasar melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai *flagship program* perluasan akses pasar UMKM dalam negeri, program DIGDAYA UMKM (Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM) untuk perluasan akses pasar secara digital, serta kurasi dan promosi perdagangan baik domestik dan internasional. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang efisien dan adaptif melalui penyusunan model bisnis replikasi, *enhancement* Indonesia SME Export Hub, serta penguatan sistem data, pemantauan, dan evaluasi program. Dalam aspek pembiayaan, Bank Indonesia mendorong pembiayaan inklusif dan berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan infrastruktur pembiayaan inklusif dan berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), BI-SAID (*Database Profil UMKM Potensial Dibiayai*), dan kalkulator hijau untuk mendorong transisi pelaku usaha menuju ekonomi hijau. Fasilitas pembiayaan juga terus diperluas melalui inovasi program yang mendukung akses keuangan, pembangunan berkeadilan, dan pertumbuhan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, pada aspek literasi dan sinergi ekonomi-keuangan, Bank Indonesia memperkuat pemahaman masyarakat terhadap potensi dan risiko keuangan inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan KLIK (Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan), modul edukasi terstandarisasi, serta kegiatan edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan di seluruh daerah. Penguatan sinergi juga dilakukan melalui inisiatif BERSATU UMKM (Bersinergi, Satukan dan Majukan UMKM) yang bertujuan untuk tingkat keuangan inklusif melalui kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam rangka akselerasi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis di tingkat nasional. Melalui peran aktif seluruh Kantor Perwakilan di daerah dan luar negeri, Bank Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif, seperti kegiatan *business matching* pembiayaan dan ekspor, *on boarding* UMKM, serta peningkatan kapasitas untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi: Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan”, tema wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tagar #KalalaMareda, bermakna “kreasi dalam kebersamaan” yang berasal dari Bahasa Sumba. Bersinergi dengan lebih dari 24 kementerian/ lembaga dan 31 asosiasi, industri serta akademisi, Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 berhasil mencatat capaian yang menggembirakan. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.400 UMKM dan menarik lebih dari 150 ribu pengunjung baik daring maupun luring, dengan peningkatan omzet UMKM serta hasil *Business Matching* ekspor sebesar 64% hingga mencapai Rp636 miliar, serta *Business Matching* pembiayaan UMKM dan UMKM hijau meningkat 70% (yoy) mencapai Rp320 miliar (Gambar 4). Lebih dari itu, KKI 2025 juga menjadi bukti nyata komitmen Bank Indonesia terhadap penerapan ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Melalui inisiatif KKI BIJAK (KKI wujud Bank Indonesia untuk Jejak Alam Keberlanjutan), seluruh emisi karbon yang dihasilkan selama kegiatan diimbangi (*offset*) melalui pembelian *carbon credit* sebesar 150 ton CO₂ dan penanaman lebih dari 20 ribu pohon, sebagai langkah konkret menuju kegiatan yang ramah lingkungan. Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan berwawasan hijau, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan kapasitas digital, serta menembus pasar global guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 4. Capaian Penyelenggaraan KKI 2025



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mandiri dan inklusif. Pengembangan tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yaitu: (i) pengembangan ekosistem Rantai Nilai Halal yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) optimalisasi pembiayaan syariah; dan (iii) penguatan Literasi Eksyar dan Inklusi Eksyar. Tiga strategi utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 inisiatif strategis (6 rukun) akselerasi eksyar nasional yaitu (i) GERBANG SANTRI (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal); (ii) JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor); (iii) GEMA HALAL (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal); (iv) SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah); (v) KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF) dan (vi) LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas). Selanjutnya keenam inisiatif tersebut, difokuskan untuk mendukung ketiga strategi utama di atas. *Pertama*, penguatan ekosistem Rantai Nilai Halal, dengan inisiatif strategis GERBANG SANTRI, JAWARA Ekspor dan GEMA HALAL. *Kedua*, penguatan pembiayaan syariah, dengan inisiatif strategis SAPA SYARIAH dan KANAL

ZISWAF. *Ketiga*, penguatan Literasi dan Inklusi Eksyar, melalui inisiatif strategis LENTERA EMAS.

Seluruh inisiatif di atas diarahkan untuk dapat berkontribusi pada target Program Prioritas (PP) Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, Asta Cita menuju Indonesia Emas, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi pada program-program seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang 2025, penguatan ekosistem rantai nilai halal dilakukan melalui program pemberdayaan usaha pesantren yang telah diimplementasikan pada lebih dari 1000 unit usaha pesantren di 34 provinsi dengan sektor usaha yang beragam; program yang mendorong pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia melalui seleksi dan kurasi pelaku dan produk potensial ekspor, pendampingan, serta promosi; dan program peningkatan produksi bahan baku halal dalam negeri, akselerasi sertifikasi halal pada sisi hulu, penguatan *halal center* dan sistem informasi halal untuk perlindungan konsumen serta *traceability*. Adapun penguatan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan kebijakan, regulasi dan inovasi antara lain KLM dan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA), pengembangan PUVA Syariah yang mencakup

aspek produk, *pricing*, pelaku dan infrastruktur (3P+1I), program fasilitasi akses pembiayaan dan perdagangan antara lain Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) dan pengembangan model bisnis *Sharia Economic Development Fund* (SEDF) serta pengembangan pusat terintegrasi (PINTER) data ZISWAF yang merupakan sistem terpadu untuk mengelola data ZISWAF di Indonesia. Untuk penguatan literasi dan inklusi eksyar Bank Indonesia melakukan survei literasi dan inklusi eksyar, standarisasi konten literasi eksyar dan peningkatan kualitas SDM eksyar, serta penguatan kolaborasi dan penguatan digitalisasi termasuk dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di tiga wilayah, Sarasehan Nasional Eksyar, dan ISEF ke 12 Tahun 2025 di Jakarta.

Sinergi erat seluruh pemangku kepentingan pengembangan ekonomi syariah mampu menyukseskan program unggulan FESyar dan ISEF 2025. Sinergi Bank Indonesia yang semakin solid dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian/lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya, termasuk dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), International Islamic Financial Market (IIFM),

International Islamic Liquidity Management (IILM), dan Islamic Financial Services Board (IFSB), kembali mampu mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan rangkaian kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Pada tahun 2025, telah diselenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Keuangan Syariah berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai target RPJMN 2025-2029, yang mencakup peningkatan kontribusi PDB Syariah dan posisi Indonesia di laporan State of Global Islamic Economy (SGIE). Kemudian, dalam ISEF 2025 telah terselenggara 100 rangkaian kegiatan bekerja sama dengan 34 K/L, 30 mitra internasional dan lebih dari 700 pelaku UMKM dan industri. Nilai *business matching* pembiayaan dan perdagangan selama 5 hari ISEF mencapai Rp2,7 triliun dengan rincian Rp2,5 triliun untuk komitmen dan realisasi pembiayaan, Rp231 miliar untuk komitmen dan realisasi perdagangan. Jika digabungkan dengan capaian selama FESyar sebagai *road to ISEF* jumlahnya mencapai Rp3,1 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari 50% dari nilai tahun lalu sebesar Rp2 triliun (Gambar 5). Penyelenggaraan ISEF menjadi salah satu kegiatan

Gambar 5. Capaian Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan ISEF ke-12 Tahun 2025



Sumber: Bank Indonesia

yang menunjukkan *leadership* Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ditunjukkan antara lain dengan dipertahankannya peringkat Indonesia sebagai top 3 *global* dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.

Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung ketahanan dan stabilitas makroekonomi. Kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dengan mitra internasional terus diperkuat sebagai langkah preventif dari dampak rambatan ketidakpastian global. Pada 2025, Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) sepakat memperbarui perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk jangka waktu lima tahun. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga 400 miliar Yuan Tiongkok (ekuivalen 55 miliar dolar AS) dengan nilai Rupiah yang setara. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama BCSA dengan Reserve Bank of Australia senilai 10 miliar dolar Australia (ekuivalen 6,2 miliar dolar AS) untuk jangka waktu lima tahun. Perjanjian kerja sama tersebut merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung Asta Cita, terutama dalam menjaga ketahanan sektor eksternal. Di tataran regional ASEAN+3, Bank Indonesia aktif memperkuat JPKI dan terlibat aktif dalam pembahasan *New Financing Structure Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM). Berbagai kerja sama tersebut memperkuat bantalan ketahanan eksternal Indonesia yang telah dijalin sebelumnya antara lain dengan Federal Reserve dan Bank for International Settlement (BIS). Dalam menghadapi tantangan global, pada berbagai forum internasional Bank Indonesia menyampaikan 3 (tiga) penekanan utama, yakni (i) peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, diperlukan untuk menyuarakan urgensi kebijakan perdagangan internasional yang terbuka guna mendorong pertumbuhan ekonomi, (ii) penerapan *integrated policy mix* dan inovasi kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,

sekaligus mendorong pembiayaan hijau dan inklusif; serta (iii) komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan *rule-based*.

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan transaksi dalam mata uang lokal melalui penguatan kerja sama dan mendorong implementasinya. Sejak diinisiasi pada 2018, Bank Indonesia telah memiliki kerja sama LCT dengan delapan bank sentral, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BoT), Japan Ministry of Finance (JMOF), PBoC, Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Korea (BoK), Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE), dan Reserve Bank of India (RBI). Pada 2025, kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan PBoC, BNM dan BoT diperbarui untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Pembaruan kerja sama tersebut memperluas kerangka kerja LCT yang semula terbatas pada perdagangan dan investasi langsung menjadi meliputi transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Kerja sama LCT dengan CBUAE telah dapat diimplementasikan sejak awal 2025. Dengan perkembangan tersebut, dunia usaha memiliki opsi dalam menyelesaikan transaksi pembayaran antarnegara dengan menggunakan kuota nilai tukar secara langsung yang disediakan oleh bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). Penguatan kerja sama juga telah dilakukan dengan BNM dan BoT, yang disinergikan dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara. Inisiatif sinergi juga dilakukan dengan Jepang dan Tiongkok melalui kegiatan *High Level Campaign* LCT dan QR Antarnegara Indonesia-Jepang dan Indonesia-Tiongkok. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan LCT di dalam negeri, telah dibentuk Satuan Tugas Nasional (Satgas) LCT lintas kementerian/lembaga sejak 2023.

Bank Indonesia aktif meningkatkan kerja sama bilateral kebanksentralan untuk memperkuat kapasitas dan mendorong kerja sama di bidang sistem pembayaran. Kerja sama bilateral dengan mitra (*Structured Bilateral Cooperation*, SBC) terus dilakukan di berbagai bidang tugas bank sentral (moneter, makroprudensial, sistem pembayaran), dan area spesifik lain seperti ekonomi dan keuangan syariah, ekonomi hijau, Anti Pencucian Uang, Pencegahan

Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPSPM). Pada 2025, Bank Indonesia berhasil menjalin kerja sama bilateral dengan Banque de France (BdF) dan State Bank of Vietnam (SBV). Dengan bertambahnya kerja sama dengan kedua bank sentral tersebut, maka sejak diinisiasi pada 2015, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC dengan 15 bank sentral mitra, termasuk dengan Federal Reserve (The Fed), Bank of England (BoE), dan PBoC. Kerja sama bilateral ini dapat meningkatkan kapasitas Bank Indonesia, peluang kerja sama di bidang keuangan, serta mencerminkan peran *institutional leadership* Bank Indonesia di kawasan.

Kerja sama di bidang sistem pembayaran juga terus diperkuat guna mewujudkan konektivitas pembayaran antarnegara. Kerja sama pembayaran antarnegara dengan menggunakan QR code telah diimplementasikan dengan BoT, BNM, MAS, dan *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI) Jepang. Pada tataran regional ASEAN, kerja sama konektivitas pembayaran (RPC) juga terus diperluas. RPC pertama kali ditandatangani pada November 2022 oleh Bank Sentral ASEAN5 (Bank Indonesia, BNM, MAS, BoT, dan Banko Sentral ng Pilipinas (BSP)). Anggota RPC kini berjumlah sembilan negara dengan bergabungnya National Bank of Cambodia (NBC) pada April 2025. Konektivitas pembayaran antarnegara akan terus didorong untuk mewujudkan transaksi pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia serta promosi investasi dan perdagangan. Sinergi dilakukan melalui *engagement* serta komunikasi intensif dengan lembaga pemeringkat dan *stakeholder* internasional. Bank Indonesia, sebagai sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) nasional, mengawal pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia sehingga peringkat *sovereign rating* Indonesia dapat dipertahankan pada satu level di

atas *investment grade* dengan *outlook* stabil dari Moody's (Baa2), Standard & Poor (BBB), dan Fitch (BBB). Indonesia bahkan telah memperoleh peringkat dua level di atas *investment grade* (BBB+) dengan *outlook* stabil dari lembaga pemeringkat Jepang R&I. Upaya menjaga persepsi *stakeholder* berperan penting dalam meningkatkan arus masuk modal asing pada instrumen portofolio dan investasi langsung. Fasilitas promosi investasi dan perdagangan melalui *linkage* IRU-Regional IRU (RIRU)-Global IRU (GIRU) terus diperkuat dengan strategi *synergized, targeted, dan outcome oriented*.

Reputasi Bank Indonesia di internasional semakin kuat, tecermin dari peran aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional. Selama 2025, Bank Indonesia berperan sebagai *Chair* pada forum ASEAN *Senior Level Committee on Financial Integration* (SLC). Pertemuan ini mendiskusikan langkah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menyepakati arah strategis ASEAN *Economic Community Sectoral Plan for Financial Cooperation 2026–2030*. Bank Indonesia juga menjadi *Chair* pada EMEAP *Working Group on Banking Supervision* (WGBS) yang mendiskusikan perkembangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan Asia Pasifik. Dalam memimpin pertemuan SEACEN *Board of Governor's* (BOG) 2025, Bank Indonesia menggarisbawahi upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui kolaborasi regional yang lebih erat di tengah ketidakpastian global, transformasi digital, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Selain di kawasan regional, Indonesia juga berperan aktif pada forum kerja sama internasional seperti IMF, G20, Bank for International Settlements (BIS), termasuk forum syariah International Islamic Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Sejalan dengan keanggotaan Indonesia dalam forum BRICS sejak Januari 2025, Bank Indonesia aktif dalam diskusi jalur keuangan. Forum ini menekankan pentingnya koordinasi kebijakan, penguatan multilateralisme, reformasi tata kelola global, dan kerja sama mengatasi risiko iklim.

Bank Indonesia memperoleh beberapa penghargaan internasional selama 2025. Central Banking Award memberikan penghargaan *Reserve Manager of the Year 2025*, atas transformasi *framework* pengelolaan cadangan devisa yang dinilai dapat meningkatkan *agility* dan fleksibilitas pengelolaan cadangan devisa di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia juga memperoleh *Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific 2025* dari the Asian Banker. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengelola ekosistem keuangan digital. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga memperoleh penghargaan internasional sebagai *Best Central Banker of the Year 2025* dan *Best Central Bank for Facilitation & Support in Islamic Economy and Finance* pada ajang tahunan Global Islamic Finance Award (GIFA) 2025. *Contact Center "BICARA"* kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan internasional pada kategori *Best Employee Engagement*, *Best Employee Wellness*, *Best Self-Service Technology*, dan *Best Customer Service* pada ajang *Contact Center World Global Asia Pacific Top Ranking Performers Awards 2025*. Capaian ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menghadirkan layanan terbaik bagi publik dan mendukung keterbukaan informasi. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, Bank Indonesia memperoleh penghargaan Perak dan Perunggu dalam Asia Pacific Stevie Award 2025. Berbagai penghargaan internasional mengukuhkan citra Bank Indonesia sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*.

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak 2018 guna memperkuat kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global dan nasional, serta berbagai perubahan lingkungan strategis lainnya, termasuk pergeseran demografi

pegawai yang sekarang didominasi generasi milenial dan generasi Z. Dalam rangka merespons berbagai lingkungan strategis tersebut dan membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola, akuntabel, dan transparan, Bank Indonesia mempertajam sejumlah agenda transformasi dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Pada area kebijakan, Bank Indonesia melanjutkan penguatan pengaturan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan yang diamanatkan UU. Penguatan ini disertai dengan *Business Process Re-engineering* (BPR) serta dilakukan pada berbagai fungsi kebijakan yang mencakup pengembangan *blueprint framework*, instrumen, dan infrastruktur. Di bidang moneter, penguatan dilakukan antara lain melalui reformasi regulasi moneter melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI, serta pengembangan digitalisasi proses bisnis statistik. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi makroprudensial melalui penguatan pengaturan terkait pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian. Bank Indonesia juga terus memperkuat perumusan kebijakan makroprudensial, antara lain melalui penyusunan kerangka kerja/konsepsi makroprudensial. Pada bidang sistem pembayaran, reformasi regulasi dilakukan antara lain melalui penerbitan ketentuan yang relevan guna mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia juga secara berkelanjutan melakukan transformasi sistem pembayaran sejalan dengan BSPI 2025-2030 yang mencakup pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur data, untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital, penguatan daya saing industri, pengembangan inovasi dan perluasan akseptasi, pengembangan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta pengembangan Rupiah Digital.

Bank Indonesia terus melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional,

bertata kelola kuat, dan transparan. Transformasi bauran kebijakan, tata kelola kelembagaan, organisasi dan proses kerja, SDM, dan digital yang telah ditempuh sejak 2018 terus diperkuat dan dipertajam, terutama untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di era digital, sekaligus memastikan kapasitas yang lebih tangguh dalam mengawal perekonomian nasional dari dampak gejolak global, serta mengimplementasikan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU P2SK. Penguatan transformasi kelembagaan berfokus pada 3 (tiga) agenda pokok. *Pertama*, penguatan sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan dengan berdasarkan prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi (IKKAT). *Kedua*, digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan. *Ketiga*, penguatan kepemimpinan Bank Indonesia yang profesional dengan kompetensi tinggi (*book-smart*), pengalaman kuat (*street-smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual smart*) melalui program budaya kerja “Aku Bangsa BI Bermakna” (AB3). Bank Indonesia juga akan terus memperkuat akuntabilitas kelembagaan kepada DPR-RI dan mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, dan penguatan transparansi publik.

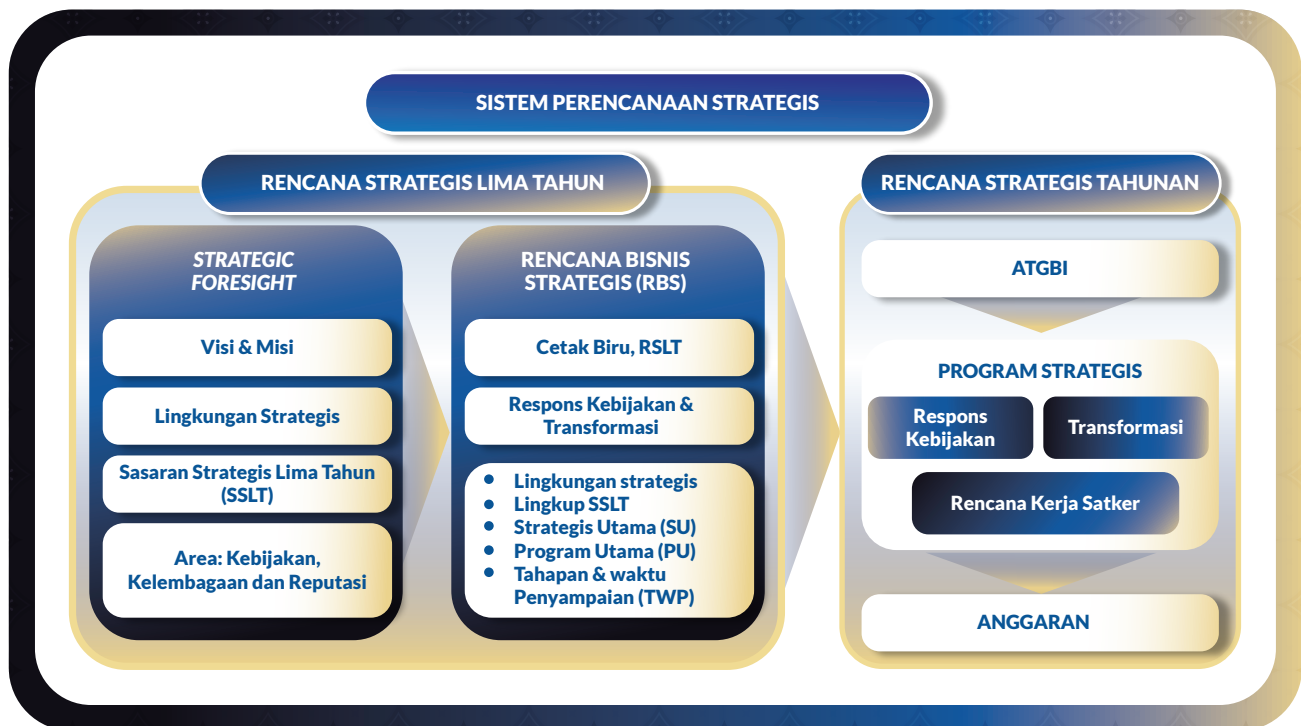
***Pertama*, Bank Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sesuai amanat UU melalui sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan yang berdasarkan prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT).** Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bank Indonesia diberikan independensi oleh UU dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kebijakannya sebagai bank sentral, yaitu di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Kewenangan Bank Indonesia tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses perumusan kebijakan yang bertata kelola dalam forum RDG Bulanan, serta senantiasa dilakukan evaluasi pelaksanaannya dalam forum

RDG Mingguan. Lebih lanjut sejalan dengan prinsip koordinasi, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen kuat untuk melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas termasuk melalui penyampaian laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR-RI, serta prinsip transparansi publik antara lain melalui konferensi pers secara bulanan atas kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam RDG Bulanan dan publikasi laporan-laporan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Keseimbangan kelima prinsip ini diimplementasikan melalui strategi perumusan, strategi pelaksanaan, dan strategi pengendalian untuk kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan. Penerapan strategi untuk tata kelola kebijakan dituangkan dalam kerangka bauran kebijakan utama yang mengintegrasikan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, yang diperkuat dengan kebijakan pendukung, untuk pencapaian tujuan Bank Indonesia yang optimal sesuai amanat UU Bank Indonesia. Sementara itu, penerapan strategi dalam tata kelola kelembagaan dituangkan dalam kerangka bauran kebijakan kelembagaan yang mengintegrasikan rencana strategis dan program kerja serta proses bisnis dan organisasi Bank Indonesia agar dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tata kelola yang baik dan profesional, serta didukung dengan penggunaan sumber daya secara terukur. Penguatan kerangka bauran kebijakan kelembagaan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen kelembagaan Bank Indonesia mampu mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Bank Indonesia juga telah melengkapi berbagai ketentuan di area kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi dimaksud.

Dalam rangka implementasi strategi di area kebijakan utama dan kelembagaan (Gambar 6), Bank Indonesia menerapkan sistem perencanaan strategis

Gambar 6. Sistem Perencanaan Strategis Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

jangka menengah dan tahunan. Perencanaan strategis dirumuskan berlandaskan tujuan dan tugas dalam UU Bank Indonesia, visi dan misi Bank Indonesia, serta arahan dan pandangan ke depan (*strategic foresight*) secara kolektif dari Dewan Gubernur. Perencanaan strategis jangka menengah dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis Strategis (RBS) Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RBS menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan Bank Indonesia, yang prosesnya didasarkan pada Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI). Hasil perencanaan strategis Bank Indonesia selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja dalam forum komunikasi lingkup Bank Indonesia.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola yang baik dan profesional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan tentang sistem pengambilan keputusan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Pengambilan Keputusan di Bank

Indonesia dan Peran Anggota Dewan Gubernur (PDG SPK) yang merupakan penyempurnaan atas PDG Nomor 24/5/PDG/2022 tentang Pengambilan Keputusan di Bank Indonesia dalam Era Digital, kebijakan Bank Indonesia terdiri atas kebijakan bank sentral dan kebijakan kelembagaan. Adapun keputusan di Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu Kebijakan Prinsipil dan Strategis, Implementasi Kebijakan Prinsipil dan Strategis, dan Kebijakan yang Tidak Dinyatakan Prinsipil dan Strategis. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara adaptif dan *streamlined* melalui penerapan prinsip 3S (Simplifikasi, Standarisasi, dan Sistemisasi). Di samping itu, dalam ketentuan dimaksud diatur mengenai peran Anggota Dewan Gubernur, yaitu (i) dalam Rapat Dewan Gubernur, (ii) dalam Komite, (iii) sebagai pengarah program strategis dan program transformasi, dan (iv) sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja.

Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur berkomitmen penuh memimpin pencapaian kinerja Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi

dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui perumusan dan pengambilan kebijakan strategis dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Sesuai UU BI, RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. Untuk memperkuat tata kelola dan kualitas kebijakan, proses perumusannya dilakukan secara berjenjang dengan menekankan adanya *check and balance* melalui tahapan inisiasi, verifikasi, rekomendasi, dan persetujuan. Tahapan inisiasi dan verifikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja, baik oleh Pemimpin satuan kerja maupun melalui Rapat Pimpinan satuan kerja. Selanjutnya, tahapan rekomendasi dilakukan oleh Komite melalui Rapat Komite dan tahapan persetujuan dilaksanakan dalam RDG. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial.

Kedua, Bank Indonesia akan mempercepat proses digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan tata kelola, *streamlined* proses, *collaborative work*, didukung dengan pengembangan pusat data serta kapabilitas *Artificial Intelligence* (AI). Bank Indonesia secara konsisten mendorong transformasi digital melalui pengembangan *digital business platform*, pengembangan pusat data dan AI, serta peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*. Pengembangan *digital business platform*, yang menjadi fondasi utama modernisasi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan, berfokus pada digitalisasi sistem pembayaran dan proses pengambilan keputusan strategis, yang terus diperkuat sepanjang tahun 2025. Inisiatif digitalisasi sistem pembayaran diwujudkan melalui perluasan fitur BI-FAST yang semakin inklusif serta eksplorasi inovasi Rupiah Digital dalam kerangka Proyek Garuda sebagai respons terhadap dinamika sistem keuangan digital global. Sejalan dengan itu, transformasi juga dilakukan pada tata kelola dan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui pengembangan platform *digital workplace* (DWP) sebagai media pendukung pelaksanaan RDG. Platform ini diimplementasikan secara

bertahap untuk memperkuat integrasi informasi, mempercepat proses analisis, dan meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan. Digitalisasi proses kerja dimaksud terus diperkuat dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antar-satuan kerja/unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process, dan multi purposes*.

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Pusat Data sebagai bagian dari inovasi digital yang mendukung ekonomi digital serta proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Pusat Data menjadi *epicentrum of change* dari transformasi digital Bank Indonesia dengan langkah nyata untuk mewujudkan institusi berbasis data (*Data-Driven Institution*) yang mampu memanfaatkan AI dan *Machine Learning* (ML) dalam pengambilan keputusan. Pengembangan ini mencakup dua besaran utama, yakni sebagai katalisator proses bisnis dan penguatan kapabilitas pusat data, yang diwujudkan melalui pendekatan *end-to-end* mulai dari demokratisasi data dengan memanfaatkan metadata, otomasi aliran dan pengolahan data (*data factory*), eksperimentasi inovasi data, serta eksplorasi teknologi data termasuk pengembangan model ML/AI (*data innovation*) dan pengembangan solusi teknologi *Omnidata Intelligence Platform*.

Bank Indonesia juga secara konsisten mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi dalam rangka memperkuat sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, penerapan sertifikasi, serta optimalisasi monitoring terhadap infrastruktur yang dimiliki. Penerapan inovasi teknologi baru maupun peremajaan terhadap infrastruktur yang telah berjalan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan ketersediaan layanan SI tetap terjaga dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat aspek tata kelola melalui penyusunan regulasi terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran,

pelaku pasar uang, pasar valuta asing, maupun pihak lain yang diawasi oleh Bank Indonesia, sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan tangguh secara digital.

Ketiga, penguatan kepemimpinan yang profesional dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan berakhlak mulia melalui program budaya kerja “Aku Bangga BI Bermakna” (AB3). Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional, dengan memiliki aspek *3-Smart*, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*), melalui 9 (sembilan) program yang terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu kepemimpinan, kekeluargaan, dan kesejahteraan. Selain itu, Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan suasana, hubungan, dan fasilitas kerja *modern office* yang lebih mendukung digitalisasi dan juga perilaku pegawai milenial.

Di tengah perubahan lingkungan strategis dan peningkatan komposisi pegawai pada Gen Y dan Z, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan kapabilitas pegawai sebagai *engine of change* organisasi. Upaya ini dilakukan melalui strategi pemenuhan dan pemeliharaan SDM serta penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) 3.0. EVP 3.0 menjadi salah satu prioritas transformasi kebijakan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pegawai Bank Indonesia. Hal ini meliputi program remunerasi kompetitif, pemeliharaan kesehatan dengan fokus pada kesehatan fisik, dan pensiun tenang dengan fokus pada program pensiun berkah.

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari transformasi SDM dan budaya kerja di Bank Indonesia. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia telah membentuk desain dan modul pembelajaran berbasis konsepsi kurikulum

Bank Sentral Digital. Di samping itu, penguatan kompetensi SDM juga ditekankan pada bidang *data science*, *data analytics*, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelaksanaan tugas bank sentral, serta memperluas penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan hijau sebagai bagian dari penguatan peran strategis Bank Indonesia di era transformasi digital dan keberlanjutan. Infrastruktur pembelajaran diperkuat melalui *Learning Management System* (LMS) dan *Digital/Cyber Library* yang terus dikembangkan, antara lain melalui pengayaan modul *e-learning* dari internal Bank Indonesia maupun mitra kerja. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan riset pendukung kebijakan antara lain melalui pengelolaan jurnal internasional.

IV. Bauran Kebijakan Transformasi Ekonomi Nasional: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

Capaian kinerja dan kuatnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang dicapai Indonesia selama ini merupakan landasan kuat ke depan untuk terus maju dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga di tengah rentetan badai gejolak global. Capaian pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu yang terbaik di EMEs dengan siklus ekonomi dan keuangan yang sedang meningkat. Kuatnya bauran kebijakan ekonomi nasional melalui sinergi erat kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia serta koordinasi kebijakan dalam KSSK juga diakui dunia internasional. Transformasi sektor riil juga terus berlanjut dengan kebijakan industrial, termasuk hilirisasi sumber daya alam, serta kebijakan struktural untuk perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur, didukung oleh program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi yang kuat dalam bauran kebijakan ekonomi nasional itu perlu semakin diperkuat ke depan.

Ke depan, sejumlah tantangan baik global maupun domestik perlu diantisipasi dalam penguatan sinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Dari sisi global, seperti dikemukakan dalam bagian pertama di atas, setidaknya ada 5 (lima) tantangan yang perlu dicermati. *Pertama*, berlanjutnya kebijakan proteksionis AS dan ketegangan geopolitik dunia menyebabkan semakin melebarnya fragmentasi perdagangan dan investasi antarnegara ke arah bilateral dan regional daripada multilateral. *Kedua*, melambatnya pertumbuhan ekonomi global disertai dengan pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi antarnegara, termasuk dari AS dan Tiongkok ke Uni Eropa, India, dan sejumlah negara EMEs lainnya. *Ketiga*, besarnya utang publik dan tingginya suku bunga negara maju menjadi beban berat bagi negara *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDEs) dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonominya, bahkan untuk pembiayaan program sosial bagi rakyat. *Keempat*, tingginya kerentanan dan risiko di sistem keuangan dunia dari pelipatan transaksi produk-produk derivatif berbasis utang publik negara (*leveraging*), khususnya oleh NBFIs dengan pengaturan dan pengawasan yang masih lemah. *Kelima*, maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto dan aset keuangan digital (*stablecoin* dan tokenisasi aset) secara global oleh swasta yang belum ada pengaturan dan pengawasan dari otoritas negara yang berwenang, termasuk terhadap transaksi ilegal, perlindungan konsumen, dan keamanan siber.

Dari sisi domestik, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan, termasuk memitigasi dampak dinamika global tersebut. Sinergi bauran kebijakan dimaksud perlu merespons setidaknya 5 (lima) tantangan berikut ini (Gambar 7).

- i. *Pertama*, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu tetap menjadi prioritas. Indonesia diakui internasional dalam kemampuan

menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ke depan, stabilitas ini semakin penting untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang terus berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Stabilitas nilai tukar dan terjaganya inflasi yang rendah perlu terus dijaga. Defisit fiskal tidak lebih 3% PDB perlu dipertahankan. Ketahanan dan stabilitas sistem perbankan perlu terus diperkuat. Karenanya, koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia maupun koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus dipererat.

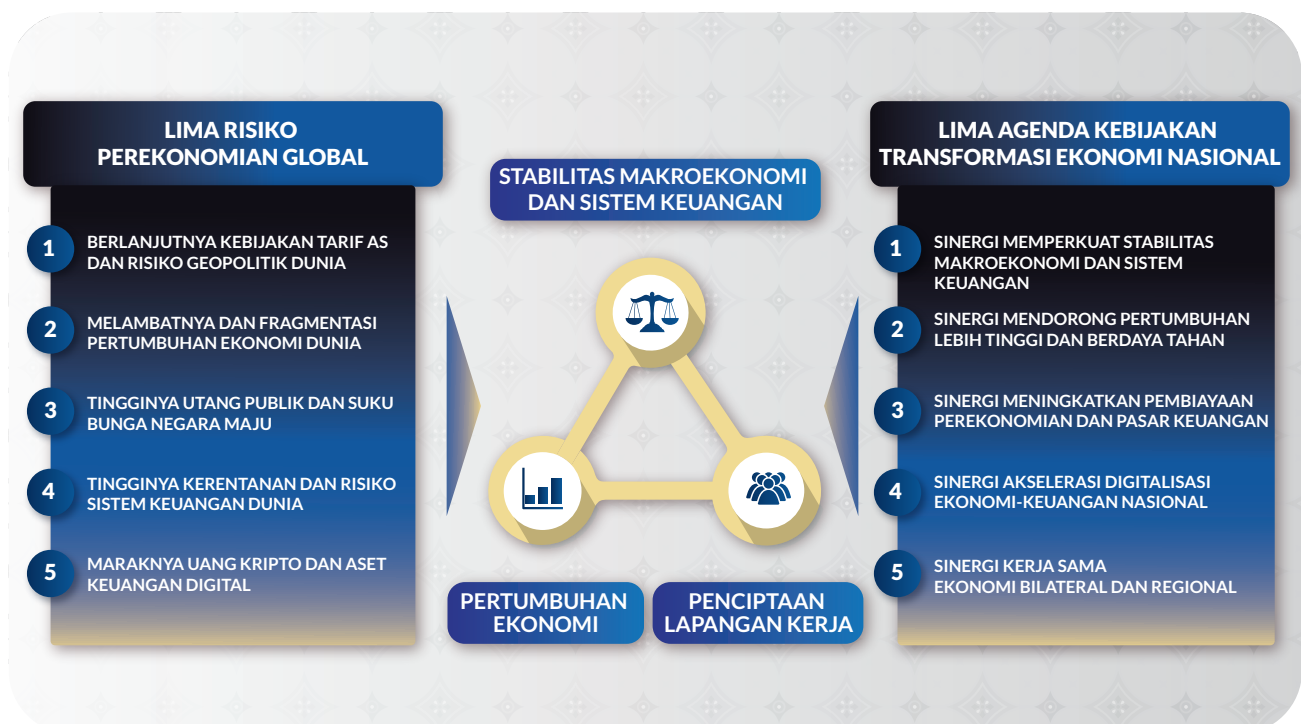
- ii. *Kedua*, transformasi sektor riil perlu dipercepat untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri yang lebih tinggi. Ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai pilar penting ketangguhan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan industrial dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam perlu menjadi prioritas industri strategis nasional, termasuk untuk mineral, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Indonesia sangat kaya sumber daya alam, namun selama ini kurang dioptimalkan dan bahkan sebagian dikelola secara ilegal. Hilirisasi dan industrialisasi perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah dengan produk-produk turunan dari sumber daya alam tersebut, seperti pada pengolahan kelapa sawit dan baterai litium. Pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah melalui Danantara maupun swasta dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, kebijakan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, dan riset perlu terus dikembangkan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi.

iii. *Ketiga*, sumber-sumber pembiayaan perlu terus dikembangkan untuk mendukung program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan modal dan investasi sangatlah besar, yang tidak mungkin dibiayai dari APBN. Perlu kejelasan strategi pembiayaan nasional. APBN sebaiknya dioptimalkan untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi kerakyatan dengan batasan defisit tidak lebih dari 3% dari PDB, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Desa Nelayan. Sementara itu, kebutuhan modal dan investasi yang besar untuk proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam dapat dibiayai dari Danantara, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta swasta dari dalam dan luar negeri. Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, serta penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun

instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Bank Indonesia akan berkoordinasi erat dalam KSSK untuk pendalaman pasar keuangan dimaksud.

iv. *Keempat*, digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang cepat dalam digitalisasi, khususnya digitalisasi sistem pembayaran serta transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel. Kini QRIS, *Mobile Banking*, *E-Commerce*, dan BI-FAST semakin digemari masyarakat dan UMKM untuk kemudahan bertransaksi ekonomi dan keuangan sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang sangat murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula, digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah terus berkembang untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi pengeluaran anggaran di pusat dan daerah. Ke depan, digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan nasional perlu terus diakselerasi. Pengembangan usaha jasa berbasis digital di berbagai segmen ekonomi perlu

Gambar 7. Lima Sinergi Bauran Transformasi Ekonomi Nasional



Sumber: Bank Indonesia

terus diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi sistem pembayaran baik secara ritel maupun nilai besar (*wholesale*) juga perlu terus dikembangkan, termasuk penerbitan dan pengembangan Rupiah Digital dan Aset Keuangan Digital oleh Bank Indonesia sesuai kewenangan UU. Kerja sama antarnegara untuk sistem pembayaran digital yang selama ini telah ditempuh juga perlu diperluas ke depan, termasuk konektivitas QRIS, BI-FAST, dan penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT) dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan.

- v. *Kelima*, peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama. Seperti dijelaskan di atas, kebijakan proteksionis AS dan polarisasi ekonomi dunia antarnegara akan berlanjut. Karenanya, kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, termasuk ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan), India, Timur Tengah, dan Uni Eropa, dengan tetap menyuarakan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral dan regional dimaksud juga penting dikaitkan dengan kepentingan Indonesia untuk perdagangan dan investasi yang mendukung program-program hilirisasi sumber daya alam dan kebutuhan pembiayaannya. Kerja sama dimaksud termasuk pula dalam hal memperluas penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT), pendalaman pasar keuangan, serta kerja sama sistem pembayaran digital antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

Sinergi Memperkuat Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan

Bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan ke depan perlu terus diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas dan mendukung pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, risiko terhadap stabilitas

dan ketahanan ekonomi nasional dari dampak negatif rambatan global diperkirakan akan meningkat. Tingginya *yield* US Treasury dan suku bunga negara maju, volatilitas dan premi risiko di pasar keuangan dunia dapat menyebabkan aliran keluar investasi portofolio asing dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga dapat terganggu baik karena terbatasnya surplus neraca modal dan finansial dalam NPI maupun menurunnya cadangan devisa karena kebutuhan untuk stabilisasi Rupiah. Pembiayaan defisit fiskal juga dapat terganggu karena meningkatnya *yield* SBN dan terbatasnya aliran investasi portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi stabilitas internal, tekanan inflasi dapat meningkat karena kenaikan harga pangan di dalam negeri dan harga komoditas dunia, di tengah meningkatnya permintaan domestik. Demikian pula, dampak rambatan negatif global dapat meningkatkan risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga), risiko likuiditas, dan risiko kredit pada sistem perbankan dan pasar keuangan Indonesia.

Koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK yang selama ini berjalan erat perlu semakin diperkuat dalam perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan ke depan di tengah berlanjutnya gejolak global. Koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia perlu terus diarahkan untuk keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dengan perlunya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi. Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dimulai dengan perumusan asumsi-asumsi makroekonomi dalam penyusunan APBN secara tahunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga SBN. Koordinasi secara berkala dilakukan untuk asesmen dan proyeksi perkembangan ekonomi serta respons kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang perlu dikoordinasikan bersama. Koordinasi juga dilakukan dalam rencana penerbitan SBN (secara tahunan dan berkala) baik dari pasar global maupun domestik untuk pembiayaan defisit fiskal dengan suku bunga yang kompetitif, serta

dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan. Sementara itu, koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong pembiayaan dari sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui KSSK yang melakukan rapat berkala secara triwulanan. Selain asesmen, proyeksi, dan respons kebijakan masing-masing lembaga, rapat KSSK juga membahas kerentanan dan risiko yang dapat muncul baik dari global maupun domestik serta respons kebijakan bersama yang perlu dikoordinasikan. Hasil rapat KSSK berkala secara triwulanan dikomunikasikan ke publik.

Kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, kebijakan fiskal dirumuskan sebagai kebijakan *countercyclical* untuk merespons gejolak perekonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makroekonomi yang mendasari APBN Tahun 2026 termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, rerata suku bunga SBN 10 tahun

sebesar 6,9%, dan rerata nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Defisit fiskal dalam APBN 2026 tetap berhati-hati sebesar 2,68% PDB, untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas Indonesia secara internasional (Tabel 10). Penerimaan negara naik sebesar 4,9% dari 2025 menjadi Rp3.153,6 triliun, terutama dari kenaikan penerimaan pajak. Belanja Pemerintah Pusat naik 16,6% menjadi Rp3.149,7 triliun, sementara transfer ke daerah dan dana desa turun menjadi Rp693,0 triliun atau 75,3% dari APBN 2025. Kenaikan belanja Pemerintah Pusat yang besar terutama untuk belanja barang dan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari produksi dan investasi. Selain itu, stimulus fiskal juga diarahkan untuk mendorong konsumsi, termasuk kenaikan anggaran untuk bantuan sosial dan belanja lainnya non-kompensasi energi. Perlu dicatat bahwa kenaikan belanja lainnya non-kompensasi energi dimaksud sebagai alokasi untuk pendanaan program-program Asta Cita dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan lainnya, yang semula sebagai bagian dari alokasi anggaran dalam bentuk transfer ke daerah. Secara

Tabel 10. Pokok-Pokok APBN Tahun 2026

URAIAN (TRILIUN RUPIAH)	2025	2026
PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	3.153,6
Penerimaan Perpajakan	2.490,9	2.693,7
Penerimaan Pajak	2.189,3	2.357,7
Kepabeanan dan Cukai	301,6	336,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,6	459,2
BELANJA NEGARA	3.621,3	3.842,7
Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	3.149,7
Belanja K/L	1.160,1	1.510,5
Belanja non-K/L	1.541,4	1.639,2
Transfer Ke Daerah	919,9	693,0
KESEIMBANGAN PRIMER	-63,3	-89,7
DEFISIT ANGGARAN	-616,2	-689,1
% Defisit terhadap PDB	-2,53	-2,68
PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	689,1

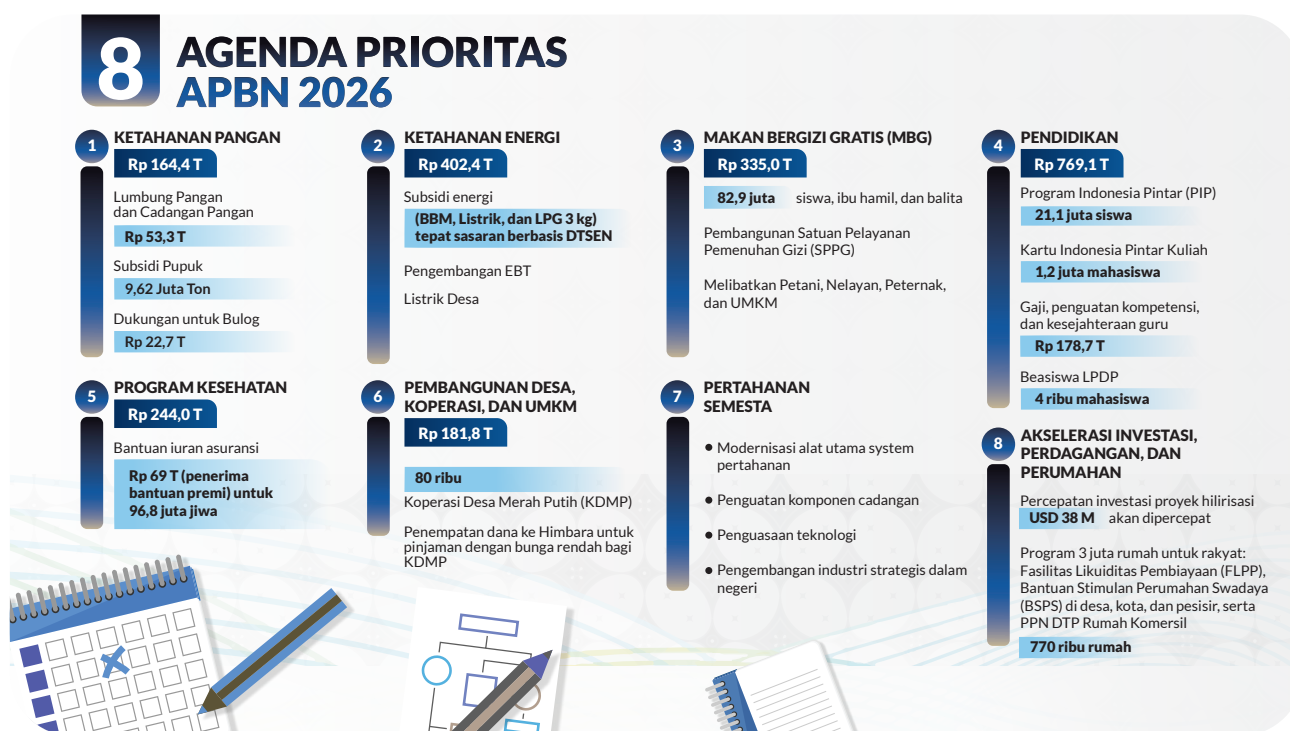
Sumber: Kementerian Keuangan

keseluruhan, alokasi anggaran dalam APBN 2026 tersebut sebagai kebijakan fiskal yang diarahkan dengan keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dengan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan anggaran untuk defisit fiskal tersebut sebesar Rp689,1 triliun diupayakan dari optimalisasi pinjaman program dan penerbitan SBN baik di pasar domestik maupun pasar keuangan global.

Dalam visi “Asta Cita” Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menggariskan 8 (delapan) agenda program prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedelapan program prioritas itu sebagian pendanaannya mulai dimasukkan dalam APBN Tahun 2026 (Gambar 8). *Pertama*, program ketahanan pangan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp164,4 triliun, yaitu untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, subsidi pupuk, dan dukungan untuk Bulog. *Kedua*, program ketahanan energi dengan alokasi anggaran total sebesar Rp402,4 triliun, yaitu untuk subsidi

energi, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan listrik desa. *Ketiga*, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita didukung dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM. *Keempat*, program pendidikan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp769,1 triliun, yaitu untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, peningkatan gaji dan kompetensi guru, serta beasiswa LPDP kepada 4 ribu mahasiswa. Pemerintah juga akan membangun Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp24,9 triliun setiap tahunnya. *Kelima*, program kesehatan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp244 triliun, yaitu untuk bantuan biaya asuransi kepada 96,8 juta jiwa. *Keenam*, program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dengan pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan penempatan dana ke Bank Himbara untuk pinjaman dengan bunga rendah. Pada tahun 2026 direncanakan pendirian 27,7 ribu KDMP dengan pinjaman sekitar Rp83 triliun dan akan terus meningkat hingga 80 ribu KDMP

Gambar 8. Delapan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto



Sumber: Kementerian Keuangan

dengan pinjaman total hingga mencapai sekitar Rp240 triliun pada tahun 2029. *Ketujuh*, program pertahanan semesta melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri. *Kedelapan*, program akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan. Untuk perumahan, Pemerintah merencanakan membangun 3 juta rumah untuk rakyat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir senilai Rp54,3 triliun pada 2026 dan ditingkatkan menjadi Rp111,9 triliun mulai tahun 2027. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas PPN DTP Rumah Komersial untuk 770 ribu rumah. Untuk investasi, Pemerintah akan mempercepat investasi proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS yang pembiayaannya sebagian dari APBN dan sebagian lainnya dari Danantara dan swasta baik domestik maupun asing.

Dengan sinergi erat bersama kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 2026 diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal ini terutama dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu: kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. *Pertama*, dengan perkiraan akan terkendalnya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026, Bank Indonesia akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,40% pada tahun 2026. Seperti dijelaskan sebelumnya, Bank Indonesia sejak September 2024 telah menurunkan BI-Rate sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps menjadi 4,75% hingga Oktober 2025. Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan KSSK juga terus mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunganya dan mendorong penyaluran kredit/pembiayaan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, stabilitas nilai tukar Rupiah akan terus dijaga sebagai bagian penting terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan maupun berkembangnya dunia

usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui intervensi Bank Indonesia baik di pasar valas luar negeri (*offshore* NDF) dan pasar domestik (*spot* dan DNDF). *Ketiga*, Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder sebagai bagian dari operasi moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti dijelaskan sebelumnya, hingga 18 November Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp289,91 triliun sejak Januari 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp212,60 triliun. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga menyepakati sebagian dana dari pembelian SBN dimaksud dipergunakan untuk pembiayaan program perumahan rakyat dan program KDMP dalam Asta Cita Pemerintah dengan bunga yang murah. Selain melalui tiga instrumen di atas, koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga sangat erat dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk pengendalian harga-harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*) dan harga pangan yang bergejolak (*volatile food*) dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah.

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia juga diperkuat untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang besar. Dalam kaitan ini, melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), Bank Indonesia memberikan insentif tambahan likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sesuai dengan program-program dalam Asta Cita Pemerintah, sektor-sektor ekonomi dimaksud mencakup: (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi sumber daya alam; (ii) sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan, termasuk perumahan rakyat; serta (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Seperti dijelaskan sebelumnya, hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun,

yang disalurkan ke sektor-sektor prioritas yakni sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, sektor real estat, perumahan rakyat, dan konstruksi, sektor transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau. Sementara itu, Pemerintah mendorong sektor-sektor prioritas itu melalui insentif fiskal dan kemudahan persyaratan yang diperlukan. Dalam penyaluran KUR, misalnya, Pemerintah menetapkan sektor mana yang dapat dibiayai, persyaratan, jumlah, dan insentif fiskal berupa subsidi bunga. Untuk program perumahan rakyat, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa subsidi suku bunga dan bantuan biaya administrasi yang jumlahnya disesuaikan dengan tipe rumah yang akan dibiayai. Sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah seperti ini dapat meningkatkan pertumbuhan kredit/ pembiayaan perbankan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

Sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan agar lebih berdaya tahan dalam menghadapi dampak rambatan global serta untuk

mendorong pembiayaan perekonomian, termasuk keuangan inklusif dan hijau. Pertemuan KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk melakukan asesmen terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) dan langkah koordinasi kebijakan yang diperlukan. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada enam aspek penting, yaitu: (i) asesmen kondisi dan status SSK terkini serta koordinasi respons kebijakan yang diperlukan, (ii) koordinasi mendorong kredit dan pembiayaan sektor keuangan bagi perekonomian, (iii) koordinasi pengembangan pasar keuangan (termasuk edukasi dan literasi keuangan), (iv) koordinasi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial (termasuk pengawasan risiko operasional dan serangan siber), (v) koordinasi penanganan dan resolusi permasalahan lembaga keuangan, serta (vi) koordinasi penguatan pengaturan dan ketentuan yang diperlukan, termasuk tindak lanjut implementasi UU P2SK (Gambar 9). Dalam kaitan ini, seperti dijelaskan di atas, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memelihara SSK diarahkan pada

Gambar 9. Koordinasi Kebijakan KSSK Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan

KOORDINASI KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)



Sumber: Bank Indonesia

terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, suku bunga dan penerbitan SBN untuk pembiayaan fiskal dari dampak negatif global. Untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, koordinasi erat dilakukan antara pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dari keterkaitan makro-finansial pada bank-bank besar dengan pengawasan mikroprudensial OJK untuk menjaga kesehatan individual seluruh bank. OJK juga memperkuat pengawasan kepada lembaga keuangan nonbank, pasar modal, perusahaan *fintech*, dan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan. Penguatan penjaminan simpanan dan resolusi bank oleh LPS terus dilakukan, berkoordinasi erat dengan OJK dan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing. Simulasi kesiapan koordinasi antar empat lembaga KSSK dan secara bilateral dalam penanganan permasalahan sektor keuangan terus ditingkatkan. Lebih dari itu, koordinasi KSSK terus ditingkatkan untuk penyelesaian seluruh peraturan dan ketentuan sebagai tindak lanjut UU P2SK. Secara keseluruhan, implementasi UU P2SK ini semakin memperkuat pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian bagi pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan.

Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu terus dipererat dalam pengelolaan lalu lintas devisa bagi ketahanan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penguatan dari PP No. 36 Tahun 2023 untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan DHE SDA bagi kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional, melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Peraturan tersebut mewajibkan 100% pemasukan DHE SDA ke sistem keuangan Indonesia (dalam Rekening Khusus) untuk ekspor yang bernilai ≥ 250 ribu dolar AS, dengan penguatan pada ketentuan SDA Non-migas yaitu kewajiban retensi yang sebelumnya sebesar 30%

selama 3 bulan menjadi 100% (setelah pengecualian untuk konversi Rupiah, impor, pembayaran pinjaman, dividen, dan pajak valas) selama 12 bulan. Pemantauan atas implementasi PP No. 8 Tahun 2025 menunjukkan pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus (Reksus) berjumlah sekitar 11-12 miliar dolar AS/bulan, atau pada kisaran 87-89% terhadap total ekspor SDA berkisar 13-15 miliar dolar AS/bulan. Kepatuhan pemasukan dan penempatan DHE SDA oleh para eksportir, yaitu DHE telah masuk dalam waktu 3 bulan setelah tanggal ekspor, berjalan baik yaitu 94% pada nonmigas dan 100% pada migas. PP No. 8 Tahun 2025 juga cukup efektif meningkatkan pasokan valuta asing ke dalam negeri sejalan dengan kebijakan fleksibilitas konversi ke Rupiah. Hal ini selanjutnya mendorong peningkatan DPK Rupiah korporasi di perbankan dan pasokan ke pasar valuta asing di dalam negeri. Sejumlah langkah tentu saja dapat ditempuh untuk lebih mendorong pemanfaatan DHE SDA tersebut bagi perekonomian nasional. Dari sisi Bank Indonesia, penguatan kebijakan dapat ditempuh untuk optimalisasi penempatan DHE SDA di Bank Indonesia, baik dalam bentuk perluasan instrumen penempatan DHE maupun pemberian imbal hasil (*pricing*) yang lebih kompetitif. Langkah serupa juga dapat ditempuh Pemerintah antara lain melalui penerbitan SBN Valuta Asing di dalam negeri, khususnya dalam valuta nonUSD (seperti Yen dan Renminbi) yang sekaligus dapat memperluas penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) dalam kerja sama perdagangan dan investasi antarnegara.

Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

Sinergi kebijakan transformasi sektor riil sangat penting untuk mendorong kapasitas perekonomian nasional dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, sinergi antara kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta koordinasi kebijakan dalam KSSK perlu terus dipererat untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat (pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor neto) dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, peningkatan kapasitas perekonomian dari sisi penawaran agregat dengan kenaikan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi perlu terus dilakukan. Di sinilah sinergi kebijakan transformasi sektor riil sangat penting untuk terus meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas bagi kenaikan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tersebut. Kebijakan transformasi sektor riil perlu ditempuh baik melalui kebijakan reformasi struktural maupun kebijakan industrial. Kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur (fisik dan digital), serta kebijakan perdagangan dan investasi (dalam negeri dan internasional) yang akan berdampak positif bagi produksi seluruh sektor-sektor ekonomi. Sementara kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang besar, termasuk di antaranya hilirisasi dan industrialisasi khususnya berbasis sumber daya alam. Dengan sinergi kebijakan makroekonomi untuk mendorong sisi permintaan agregat dan kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong sisi penawaran agregat tersebut maka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai dan berdaya tahan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga.

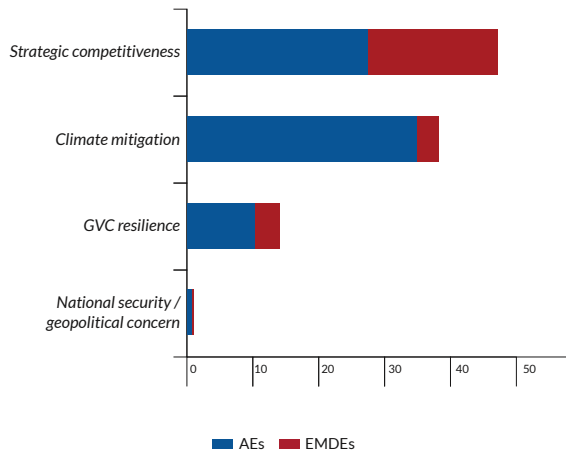
Sejak tahun 2009 semakin banyak negara yang menempuh kebijakan industrial untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya energi dan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenaikan terutama di negara-negara maju, termasuk AS, Uni Eropa dan Kanada, serta sejumlah negara EMES seperti Tiongkok. Peningkatan signifikan terjadi sejak pandemi COVID-19 yang memperkuat kebutuhan akan pentingnya ketahanan energi dan pangan bagi perekonomian nasional. Secara umum, kebijakan industrial diartikan sebagai kebijakan yang ditempuh suatu negara untuk mengubah

struktur ekonomi domestiknya melalui sejumlah instrumen termasuk pemberian subsidi dan fasilitas regulasi tertentu di bidang investasi, akses pasar, dan keuangan pada sektor atau komoditas yang menjadi prioritas nasionalnya. Pertimbangan ekonomi dapat didasarkan pada kebutuhan untuk koreksi atas kegagalan pasar seperti perlindungan pada industri pemula (*infant industry*) yang baru berkembang di dalam negeri dan belum mampu bersaing secara global. Pertimbangan untuk memperkuat daya saing strategis ini yang banyak ditemukan baik di negara maju maupun EMDEs, sementara pertimbangan untuk mitigasi iklim lebih banyak ditemukan di negara maju (Grafik 36.a). Sementara itu, sektor-sektor yang menjadi target prioritas dari kebijakan industrial di negara maju lebih banyak di sektor manufaktur yang berteknologi tinggi, sektor komoditas, energi dan pangan, serta sektor jasa-jasa (Grafik 36.b). Di negara EMDEs, sektor yang menjadi target kebijakan industrial bervariasi dari sisi sektor manufaktur hingga sektor komoditas, energi dan jasa-jasa, tergantung pada kesiapan kemampuan teknologi dan ketersediaan sumber daya alam yang dimilikinya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan industrial dapat ditempuh suatu negara untuk penguatan struktur ekonomi domestiknya bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Tentunya kebijakan industrial dimaksud perlu dirumuskan secara cermat dalam pemilihan sektor, pengembangan model bisnis, kebijakan investasi dan pembiayaan dengan mempertimbangkan keterbatasan pembiayaan fiskal Pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan industrial harus disertai dengan kebijakan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, tata kelola konektivitas infrastruktur, hingga perlunya pengembangan pasar keuangan.

Di Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan transformasi sektor riil untuk pengembangan hilirisasi dan industrialisasi serta pembukaan lapangan kerja. Sesuai Prioritas Nasional kelima dalam Visi Asta Cita, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing, Tingkat Komponen Dalam

**Grafik 36.a. Kebijakan Industrial:
Pertimbangan Ekonomi**

Stated Motivation (Share of measures, 2009–22, percent)

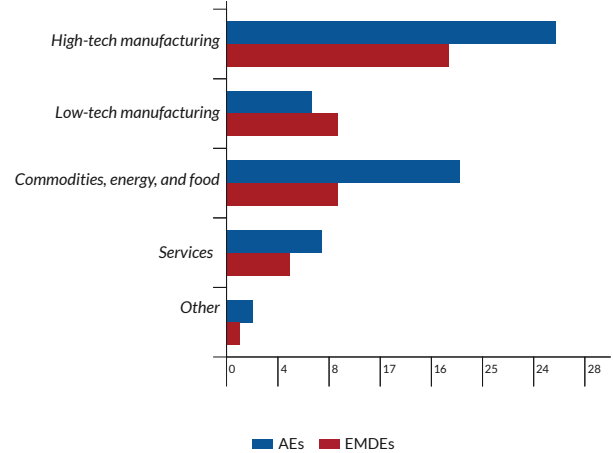


Sumber: IMF, World Economic Outlook, Oktober 2025

Negeri (TKDN), pembiayaan dan investasi, serta infrastruktur penunjang, sementara pembukaan lapangan kerja diarahkan untuk pengembangan SDM lokal, transfer teknologi, dan pemerataan ekonomi (Gambar 10). Untuk itu, arah kebijakan yang ditempuh mencakup: (i) percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor, serta (ii) aglomerasi industri

**Grafik 36.b. Kebijakan Industrial:
Target Sektor Ekonomi**

Targeted Sectors (Percent implemented globally, 2009–22)



Sumber: IMF, World Economic Outlook, Oktober 2025

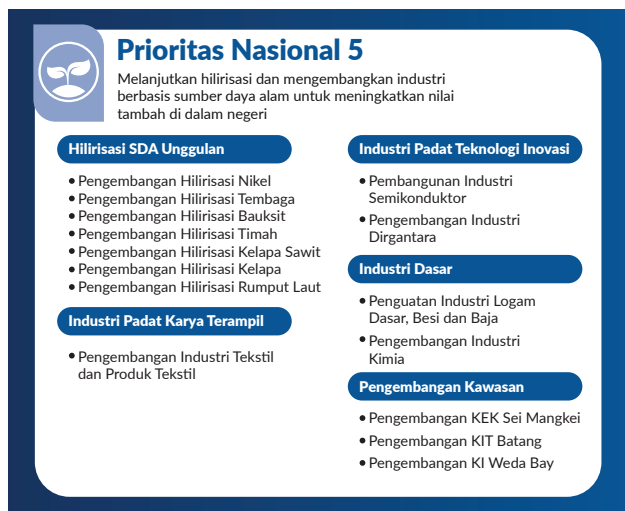
melalui peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi. Sasarannya adalah untuk: (i) peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan dengan target rasio PDB Industri Pengolahan meningkat dari 18,67% pada 2023 menjadi 21,90% pada 2029, serta (ii) peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global dengan rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Gambar 10. Kebijakan Transformasi Sektor Riil dalam Asta Cita: Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan



Sumber: RPJMN (Bappenas)

Gambar 11.a. Komoditas Hilirisasi SDA Prioritas dalam RPJMN



Sumber: RPJMN (Bappenas)

meningkat dari 29,3% menjadi 29,9% dari PDB, dan ekspor barang-jasa meningkat dari 21,7% menjadi 22,6% dari PDB pada periode yang sama.

Dari sisi kebijakan industrial, kebijakan transformasi sektor riil tersebut akan difokuskan pada hilirisasi komoditas SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas. Dalam RPJMN, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA akan dilanjutkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Gambar 11.a). Hilirisasi SDA akan difokuskan pada komoditas unggulan yaitu: nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Industri padat teknologi inovasi akan difokuskan pada pembangunan industri semikonduktor dan industri dirgantara, sementara industri dasar pada penguatan industri logam dasar, besi dan baja, serta pengembangan industri kimia. Sementara itu, penguatan industri manufaktur prioritas akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu industri berteknologi menengah-tinggi dan industri berteknologi rendah dan padat karya (Gambar 11.b). Strategi industri dengan teknologi medium-tinggi difokuskan pada mobil, baterai listrik, petrokimia, dan semikonduktor. Strategi industri pendukung dengan teknologi rendah difokuskan pada produk SDA seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, CPO, dan karet olahan untuk industri. Strategi industri padat karya dan produk unggulan daerah difokuskan pada garmen, sepatu olahraga, serta sejumlah produk

Gambar 11.b. Penguatan Industri Manufaktur Prioritas dalam RPJMN



Sumber: Bank Indonesia

perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pemilihan strategi didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan adopsi teknologi, pembentukan mata rantai hilirisasi dan industrialisasi, serta ketersediaan eksplorasi dari komoditas SDA terkait.

Danantara memegang peran penting baik dalam implementasi model bisnis maupun investasi ke dalam proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi SDA tersebut. Dalam menentukan prioritas, Danantara mempertimbangkan tiga pertimbangan utama, yaitu: kemampuan menghasilkan dampak terhadap ekonomi nasional, besarnya imbal hasil investasi yang berkesinambungan, serta peluang investasi yang dapat diwujudkan. Berdasarkan tiga pertimbangan dimaksud, Danantara menentukan 8 (delapan) sektor prioritas, yaitu: (i) sektor mineral pada komoditas nikel dan bauksit, (ii) energi terbarukan pada produk lanjutan migas, (iii) infrastruktur digital pada pusat data, (iv) kesehatan pada pembangunan fasilitas fraksionasi plasma darah dan mata rantai rumah sakit, (v) jasa keuangan pada sekuritisasi aset dan kredit, (vi) sarana dan prasarana pada pengolahan limbah dan infrastruktur pertambangan, (vii) pengembangan kawasan industri, serta (viii) pangan dan pertanian (Gambar 12). Seperti dikemukakan di atas, pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial dari hilirisasi dan industrialisasi pada sektor-sektor prioritas tersebut sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah

Gambar 12. Investasi Danantara pada 8 Sektor Prioritas



Sumber: Danantara

melalui Danantara maupun swasta dari dalam dan luar negeri.

Kebijakan reformasi struktural sangat penting untuk kesuksesan kebijakan industrial dengan hilirisasi dan industrialisasi SDA unggulan dan sektor-sektor prioritas nasional. Kebijakan industrial yang dirancang secara baik dan ditargetkan untuk mengatasi kegagalan pasar di sisi produksi dapat meningkatkan kinerja pada sektor yang diprioritaskan maupun secara agregat. Pengalaman Korea Selatan menggambarkan bahwa pemberian subsidi secara terarah dengan sasaran yang jelas dan diimplementasikan dengan tata kelola kelembagaan yang sehat dapat mendorong transformasi struktural di sektor-sektor seperti elektronik dan otomotif. Namun perlu diakui bahwa efektivitas kebijakan industrial sangat tergantung pada kemampuan dalam adopsi teknologi, kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta struktur persaingan pasar di negara bersangkutan. Itulah kenapa keberhasilan kebijakan industrial sangat memerlukan dan bahkan tergantung pada kebijakan struktural yang diarahkan pada untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur (fisik dan

digital), serta kebijakan perdagangan dan investasi (dalam negeri dan internasional) yang ditempuh negara yang bersangkutan. Seperti halnya kebijakan industrial, kebijakan struktural ditempuh untuk mengatasi berbagai hambatan terhadap pertumbuhan dan produktivitas. Bedanya, kebijakan struktural akan berdampak positif bagi produksi seluruh sektor-sektor ekonomi sementara kebijakan industrial lebih diarahkan pada sektor-sektor unggulan. Masalahnya, kebijakan struktural lebih sulit diimplementasikan karena ketergantungan pada birokrasi pemerintahan baik di pusat dan daerah. Untuk itulah kombinasi kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrial dapat menjadi pilihan. Langkah ini dapat ditempuh dengan menerapkan kebijakan industrial untuk mendorong produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor-sektor unggulan di kawasan ekonomi khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan, yang di dalamnya ditempuh kebijakan reformasi untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola dan birokrasi kelembagaan, serta pengembangan inovasi dan riset untuk percepatan adopsi teknologi. Dalam kaitan ini, pengembangan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Batang, Sei Mangke, dan Weda Bay, sebagai pusat-pusat pertumbuhan

untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor-sektor unggulan lain sebagai langkah kebijakan yang tepat dalam kombinasi kebijakan industrial dan kebijakan struktural tersebut.

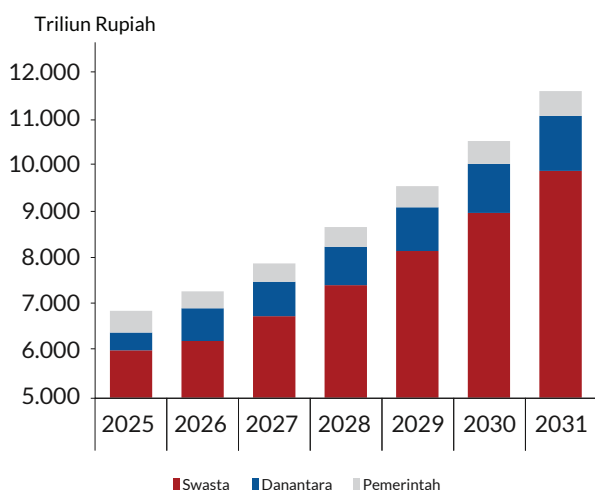
Sinergi Meningkatkan Pembiayaan Perekonomian

Sinergi dalam meningkatkan pembiayaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan sebelumnya, kebutuhan modal dan investasi untuk program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor prioritas lainnya, sangatlah besar yang tidak mungkin berasal dari APBN. Karenanya, perlu kejelasan strategi pembiayaan nasional. Dalam kaitan ini, kebutuhan total investasi dari tahun 2025-2031 diperkirakan mencapai Rp62,54 ribu triliun, yaitu meningkat dari Rp6,88 ribu triliun pada 2025 menjadi Rp11,63 ribu triliun pada 2031 (Grafik 37.a). Dari jumlah ini, dengan fokus anggaran untuk program sosial dan batasan defisit tidak lebih dari 3% PDB, pembiayaan investasi dari APBN selama periode 2025-2031 tersebut diperkirakan berjumlah Rp3,15 ribu triliun (sekitar 5,0%). Sementara itu, pembiayaan investasi dari Danantara diperkirakan berjumlah Rp5,84 ribu triliun (sekitar 9,3%) selama 2025-2031. Kontribusi terbesar dari pemenuhan pembiayaan untuk

kebutuhan investasi tersebut berasal dari swasta, yang diperkirakan berjumlah Rp53,56 ribu triliun (sekitar 85,6%) selama periode 2025-2031 tersebut (Grafik 37.b). Di sinilah tantangan terbesar untuk keberhasilan implementasi kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan tersebut. Tantangan ini semakin menuntut perlunya perumusan model bisnis yang jelas, tata kelembagaan yang kuat, dan kapabilitas adopsi teknologi dari program hilirisasi dan industrialisasi di atas sehingga secara komersial menguntungkan bagi penanaman modal swasta dari dalam negeri maupun investor asing.

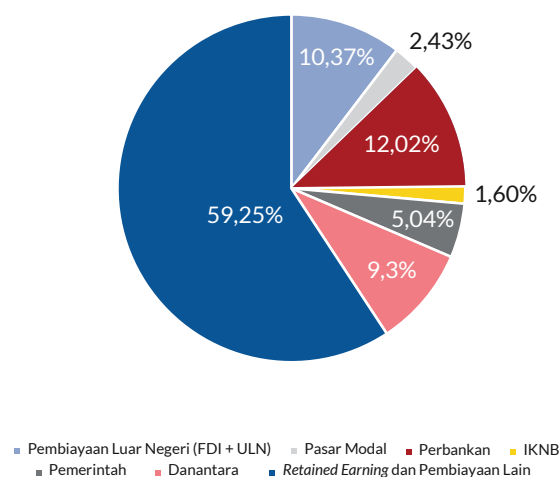
Sinergi kebijakan Pemerintah, Danantara, KSSK dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk eksplorasi sumber-sumber pembiayaan dari swasta untuk pemenuhan kebutuhan investasi yang sangat besar ke depan. Dalam kaitan ini, sesuai dengan pola sumber pembiayaan untuk investasi usaha yang telah berjalan selama ini, sekitar 59,25% dari kebutuhan total investasi swasta tersebut (atau sekitar Rp37,1 ribu triliun selama 2025-2031) umumnya berasal dari dana sendiri, baik yang berasal dari laba yang disisihkan (*retained earning*) dan pembiayaan lainnya (Grafik 37.b). Sumber pembiayaan berikutnya dari pembiayaan luar negeri baik dalam bentuk PMA atau pinjaman luar negeri, yaitu sekitar 10,37% (atau Rp6,5 ribu triliun selama 2025-2031), tambahan kredit/pembiayaan perbankan, yaitu

Grafik 37.a. Perkiraan Total Investasi dan Sumber Pembiayaan 2025-2031



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 37.b. Perkiraan Komposisi Sumber Pembiayaan Investasi 2025-2031



Sumber: Bank Indonesia, diolah

sekitar 12,02% (atau Rp7,52 ribu triliun selama 2025-2031), dan selebihnya dari pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk proyek-proyek baru dengan kontribusi pembiayaan dari dana sendiri lebih terbatas, pemenuhan kebutuhan investasi dari kredit/pembiayaan perbankan dan pembiayaan luar negeri tentunya akan lebih besar. Dengan demikian, sinergi kebijakan untuk mobilisasi pembiayaan dari empat sumber utama ini, yaitu dana sendiri, perbankan, PMA, dan anggaran Pemerintah perlu dioptimalkan untuk dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi dalam lima tahun ke depan. Fokus sinergi terutama pada empat aspek, yaitu: struktur pembiayaan proyek yang optimal, sumber pembiayaan yang tepat, kebutuhan likuiditas dan lindung nilai, serta edukasi dan literasi keuangan. Kelayakan proyek investasi akan menentukan struktur pembiayaan yang optimal. Semakin menguntungkan suatu proyek investasi, struktur pembiayaan dapat berasal baik dari swasta seperti kredit/pembiayaan dari perbankan, penerbitan obligasi atau surat berharga lain di pasar modal dalam negeri, maupun pinjaman dari investor luar negeri. Sebagian proyek memberikan keuntungan secara komersial sehingga kebutuhan investasi swasta dapat sebagian besar dipenuhi dari swasta baik modal sendiri, kredit perbankan, maupun

pinjaman dan penanaman modal asing. Namun, sebagian proyek lain masih memerlukan pembiayaan sebagian dan insentif fiskal dari Pemerintah untuk memperkuat kelayakan komersialnya. Insentif fiskal dan/atau kebijakan lain dari Pemerintah dimaksud termasuk tarif pajak, subsidi bunga, dan kepastian kebijakan Pemerintah, khususnya dalam masa tunggu (*grace period*) sejak tahap konstruksi sampai dengan tahap awal operasi. Sekali lagi, di sinilah sangat pentingnya perbaikan iklim investasi, reformasi birokrasi, dan studi kelayakan di atas (Gambar 13).

Selanjutnya, sinergi antara Kemenkeu, OJK, LPS, dan Bank Indonesia untuk koordinasi dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari sektor keuangan.

Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, maupun penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025-2030 baik pengembangan

Gambar 13. Model Bisnis Pembiayaan Perekonomian



Sumber: Bank Indonesia

produk, *pricing*, pelaku, maupun infrastruktur. Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, selama implementasi BPPU 2020-2025 rerata nilai transaksi di pasar uang telah mencapai lebih dari Rp54 triliun per hari dan di pasar valuta asing lebih dari 10 miliar dolar AS per hari. Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat menjalin sinergi dengan ketiga lembaga dalam KSSK tersebut untuk perumusan langkah bersama dalam pemenuhan sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan. Seperti dikemukakan di atas, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan insentif likuiditas KLM untuk mendorong kredit/ pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas pendukung pertumbuhan dan pencipta lapangan kerja tersebut. Selain koordinasi kebijakan makroprudensial dengan pengawasan mikroprudensial untuk optimalitas kredit dan terjaganya risiko sistem perbankan, sinergi Bank Indonesia dengan OJK terkait harmonisasi pengaturan penerbitan dan transaksi obligasi dan Surat Berharga Komersial (SBK) serta harmonisasi perizinan pasar keuangan seperti infrastruktur antarpasar dan profesi penunjang di sektor keuangan. Selain koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan makro-prudensial seperti dijelaskan di atas, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan juga terkait dengan pendalaman pasar obligasi Pemerintah (SBN) serta harmonisasi pajak transaksi keuangan baik di pasar modal maupun di pasar uang dan pasar valas (PUVA). Sinergi pengembangan pasar keuangan dalam KSSK dan dengan K/L, otoritas, dan pelaku terus dilakukan untuk inovasi instrumen pembiayaan ekonomi dan lindung nilai, seperti instrumen Surat Utang, *swap* suku bunga dan nilai tukar, dan optimalisasi transaksi mata uang lokal (LCT).

Sinergi Akselerasi Digitalisasi Ekonomi-Kuangan Nasional

Ekonomi Digital Indonesia memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi baik dari sisi investasi maupun peningkatan produktivitas. Sesuai Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, Indonesia berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, transformasi digital sektor perdagangan (termasuk UMKM), adopsi teknologi

seperti kecerdasan buatan (AI), dan penyediaan layanan pemerintahan digital yang efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai ekonomi digital Indonesia secara signifikan pada tahun 2030 dan memperkuat daya saing bangsa melalui inovasi dan kolaborasi digital. *Pertama*, strategi infrastruktur digital ditempuh melalui pengembangan infrastruktur fisik seperti jaringan fiber optik, menara *Base Transceiver Station* (BTS), dan satelit (termasuk Satria dan *low earth orbit*) untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Kedua*, mendorong transformasi digital di berbagai sektor, terutama perdagangan, dengan mendukung UMKM untuk naik kelas dan beradaptasi dengan ekosistem digital yang lebih luas. *Ketiga*, mempercepat adopsi teknologi inovatif seperti AI, komputasi awan (*cloud*), dan *fintech* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. *Keempat*, strategi pemerintahan digital dengan memodernisasi layanan publik yang fokus pada layanan yang mudah diakses dan efisien, serta memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan *kelima*, strategi keamanan siber dan regulasi dengan membangun kerangka kerja regulasi yang mendukung inovasi digital sambil tetap melindungi konsumen dan kepentingan nasional, serta memperkuat keamanan siber untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Dengan implementasi strategi nasional ekonomi digital tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melonjak dari 90 miliar dolar AS pada tahun 2024 menjadi hingga 360 miliar dolar AS pada tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi digital diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2030. Implementasi AI yang canggih diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.

Bank Indonesia akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung Ekonomi-Kuangan Digital (EKD) nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Hal ini akan ditempuh melalui program-program dalam BSPI 2030 baik untuk pengembangan infrastruktur pembayaran (ritel, *wholesale*, dan data), penguatan industri, pengembangan inovasi, kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi

digitalisasi sistem pembayaran dan sektor keuangan sebagai *leverage* untuk meningkatkan produktivitas jasa pembayaran dan keuangan bagi perekonomian. Semakin meluasnya adopsi QRIS dan BI-FAST dalam melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan dalam transaksi pembayaran digital sebagai kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Demikian pula berkembang pesatnya layanan perbankan digital melalui *online* dan *mobile banking*. Bank Indonesia juga akan mendirikan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat. Elektronifikasi sistem pembayaran dalam penyaluran program-program sosial dan transaksi keuangan Pemerintah juga akan terus diperluas. Bank Indonesia turut memperkuat sinergi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM) dengan PPATK, OJK, Kementerian/Lembaga terkait, industri sistem pembayaran dan perbankan, serta forum internasional guna memastikan integritas dan ketahanan ekosistem pembayaran nasional. Demikian pula, kerja sama bilateral dan internasional dalam sistem pembayaran antarnegara juga akan terus diperluas, tidak saja dengan negara ASEAN-5 tetapi juga dengan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India.

Sinergi Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Internasional

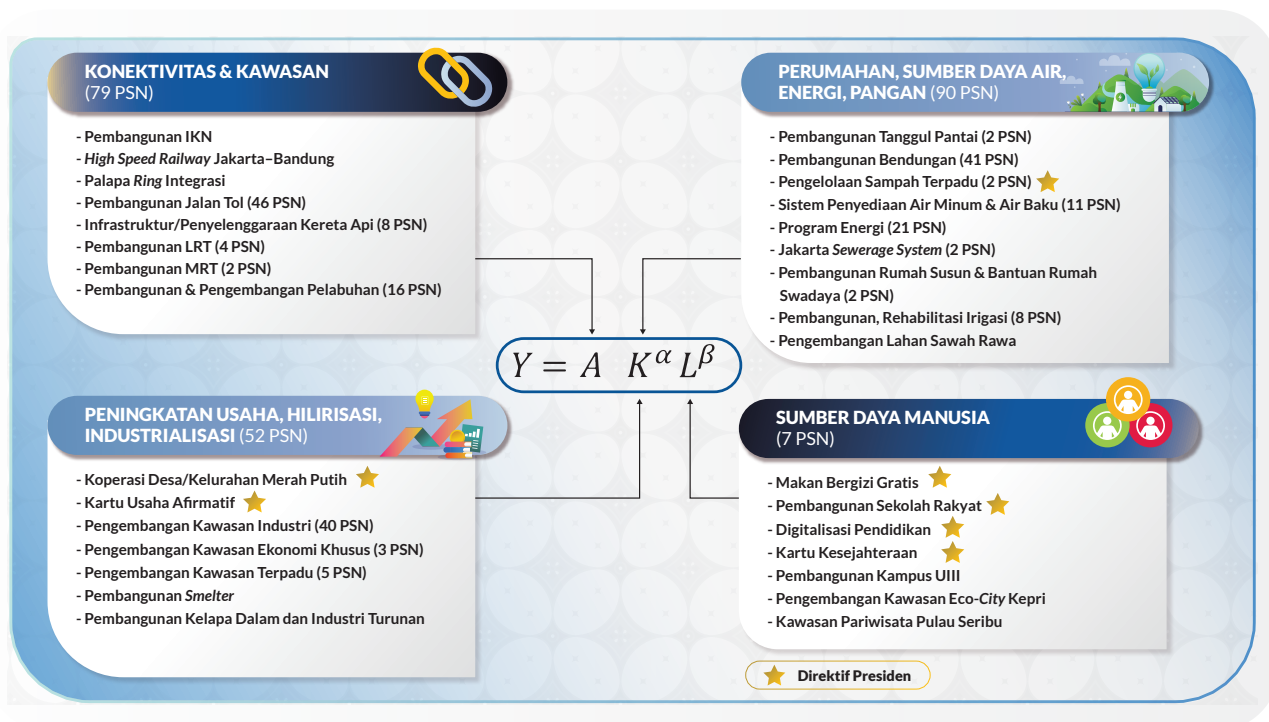
Sinergi peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama perlu ditempuh untuk kesuksesan kebijakan transformasi sektor riil. Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerja sama regional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan. Kerja sama bilateral dijalin Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra dagang utama. Dengan Tiongkok, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman strategis untuk investasi di sektor manufaktur, energi baru terbarukan, dan logistik. Kerja sama ini bertujuan untuk menarik

investasi, menciptakan lapangan kerja, dan melibatkan UMKM dalam rantai pasok global. Kerja sama dengan Jepang meliputi investasi dalam industri, seperti pembangunan pelabuhan dan pabrik kendaraan, serta pertukaran pelajar di bidang teknologi. Dengan Korea Selatan, Indonesia menjalin kemitraan strategis khusus yang fokus pada pertahanan dan perdagangan, serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*, IK-CEPA). Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Australia terkait perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama bisnis di berbagai sektor seperti infrastruktur, pertanian, dan sumber daya. Kerja sama dengan Swiss, hubungan kerja sama Indonesia mencakup perdagangan, investasi, pariwisata, dan pembangunan. Swiss adalah salah satu investor penting di Indonesia. Kerja sama Indonesia secara regional dan multilateral juga mencakup dengan Uni Eropa, International Monetary Fund (IMF), G20, dan juga World Trade Organization (WTO). Seperti dijelaskan di atas, kebijakan proteksionis AS dan polarisasi ekonomi dunia antarnegara akan berlanjut. Karenanya, kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, dengan tetap menyuarakan kerja sama multilateral. Lebih dari itu, kerja sama bilateral dan regional dimaksud juga penting dikaitkan dengan kepentingan Indonesia untuk perdagangan dan investasi yang mendukung program-program hilirisasi sumber daya alam dan kebutuhan pembiayaannya. Termasuk kerja sama dalam memperluas penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT), pendalaman pasar keuangan, serta kerja sama sistem pembayaran digital antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Menengah

Secara keseluruhan, kelima strategi bauran kebijakan ekonomi nasional di atas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimaksud dapat berasal baik dari dorongan

Gambar 14. Pengaruh Proyek Strategis Nasional terhadap Peningkatan Kapasitas Ekonomi Nasional



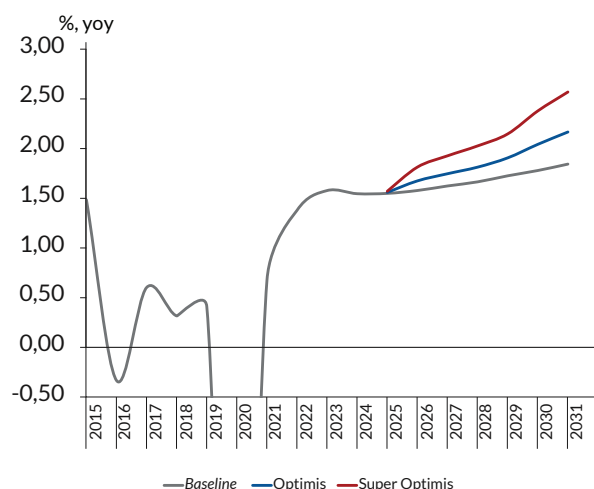
Sumber: Bank Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah, diolah

terhadap permintaan (*aggregate demand*) maupun dari sisi peningkatan kapasitas penawaran nasional (*aggregate supply*). Secara khusus, kenaikan pertumbuhan yang signifikan dari sisi modal, tenaga kerja, dan produktivitas dapat berasal dari implementasi proyek-proyek strategis nasional seperti 79 proyek konektivitas dan kawasan, 90 proyek perumahan, sumber daya air, energi, dan pangan, 52 proyek peningkatan usaha, hilirisasi dan industrialisasi, serta 7 proyek sumber daya manusia (Gambar 14). Seberapa jauh peningkatan pertumbuhan yang dapat dicapai akan tergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas implementasinya. Dalam kaitan ini, tiga skenario dapat disimulasikan. *Pertama*, skenario “Baseline”, dengan implementasi proyek-proyek yang *carry over*, sudah berjalan, dan sudah *groundbreaking*. *Kedua*, skenario “Optimis”, yaitu skenario *Baseline* ditambah dengan implementasi proyek-proyek baru yang belum berjalan, belum *groundbreaking* dengan biaya relatif rendah dan kemungkinan pembiayaan cepat, termasuk yang bersumber dari APBN. *Ketiga*, skenario “Super Optimis”, yaitu skenario Optimis ditambah dengan implementasi proyek-proyek yang belum berjalan, belum *groundbreaking* dengan biaya relatif tinggi dan kemungkinan pembiayaan relatif

lebih lama karena banyak bersumber dari swasta baik dalam maupun luar negeri. Tingkatan skenario juga menunjukkan intensitas pelaksanaan kebijakan reformasi struktural yang lebih kuat dari skenario sebelumnya. Kebijakan struktural dimaksud tercermin dari: (i) peningkatan “Produktivitas” melalui akselerasi pembangunan infrastruktur, kemampuan *research and development* dan adopsi teknologi, serta perbaikan *market efficiency*; (ii) peningkatan “Kapital” melalui perbaikan iklim investasi, peningkatan investasi PMA dan PMDN, dan dorongan pada sektor padat modal; serta (iii) peningkatan kualitas “Labor” melalui akses dan kualitas pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan pekerja formal.

Ketiga skenario di atas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan dengan tingkat capaian yang berbeda. Kuncinya terletak pada kecepatan dan efektivitas implementasi berbagai program dan proyek Pemerintah dan swasta yang mampu mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan konsumsi dan investasi maupun peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Kelima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut saling terkait dan mendukung

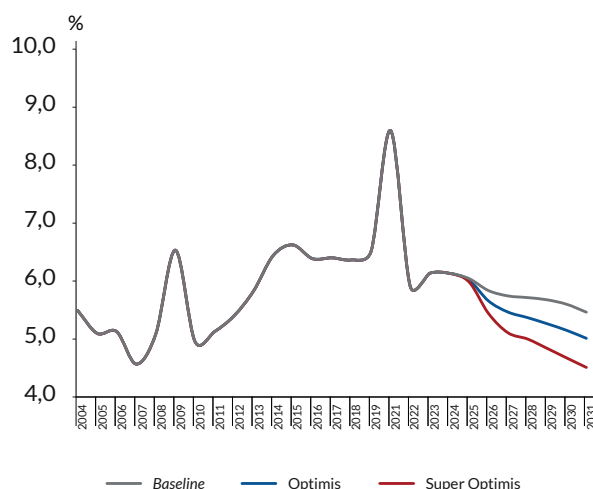
Grafik 38.a. Perkiraan Pertumbuhan Produktivitas: 2025-2031



Sumber: Bank Indonesia

kenaikan investasi dan modal, penyerapan tenaga kerja dan penghasilan masyarakat, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Hal ini akan tecermin pada pertumbuhan produktivitas (*Total Factor Productivity/TFP*) yang terus meningkat, dengan peningkatan terbesar pada skenario Super Optimis dari kedua skenario lainnya (Grafik 38.a). Artinya, dengan tingkat investasi modal dan penyerapan tenaga kerja yang sama, capaian pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya keseimbangan antara sektor padat modal untuk peningkatan kapasitas perekonomian (sisi penawaran agregat) dengan sektor padat karya untuk peningkatan penghasilan dan konsumsi (sisi permintaan agregat). Demikian pula, *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) akan menurun dengan penurunan terbesar pada

Grafik 38.b. Perkiraan Penurunan ICOR: 2025-2031



Sumber: Bank Indonesia

Skenario Super Optimis dibandingkan dengan kedua skenario lainnya (Grafik 38.b). Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil.

Kenaikan produktivitas TFP dan penurunan ICOR dari implementasi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut akan secara bersama meningkatkan capaian pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2025 sekitar 4,7-5,5% diperkirakan akan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan 5,1-5,9% pada 2027 (Tabel 11). Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 yang mencapai 5,6-6,4% untuk skenario

Tabel 11. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025-2031

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2031		
					Baseline	Optimis	Super Optimis
Pertumbuhan Ekonomi	%, yoy	4,7-5,5	4,9-5,7	5,1-5,9	5,6-6,4	6,1-6,9	6,9-7,7
Inflasi IHK	%, yoy	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Transaksi Berjalan	%PDB	0,1 s.d. -0,7	-0,2 s.d. -1,0	-0,4 s.d. -1,2	0,2 s.d. -0,6	0,3 s.d. -0,5	0,4 s.d. -0,4
Kredit Perbankan	%, yoy	8-11	8-12	9-13	10-14	11-15	12-16

Sumber: Proyeksi Bank Indonesia

“Baseline” diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1-6,9% pada skenario “Optimis” dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9-7,7% pada skenario “Super Optimis”. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi tetap terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ dan transaksi berjalan tetap terjaga rendah yaitu sekitar defisit 0,4% s.d. surplus 0,4% dari PDB pada tahun 2031. Stabilitas internal dan eksternal ekonomi Indonesia ini dapat dicapai karena peningkatan sisi penawaran agregat yang dapat memenuhi kenaikan permintaan melalui bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut. Kredit/pembiayaan dari perbankan tumbuh optimal yaitu sekitar 12-16% per tahun. Defisit fiskal juga tetap terjaga pada tingkat di bawah 3% dari PDB sebagaimana telah menjadi kredibilitas Indonesia.

Sebagai catatan, simulasi capaian kinerja perekonomian sebagai hasil dari implementasi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut perlu terus dievaluasi dengan dinamika yang berkembang dan respons bauran kebijakan yang diperlukan. Sejumlah asumsi mendasari simulasi ini. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi dunia diasumsikan akan melambat dari 3,1% pada 2025 menjadi 3,0% pada 2030, dengan suku bunga kebijakan moneter AS akan turun dari 4,0% menjadi 3,5%. Asumsi ini dapat saja berubah dengan berlanjutnya kebijakan tarif Pemerintah AS di bawah Presiden Trump. Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia yang berubah cepat ini dapat berpengaruh pada stabilitas dan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Kedua*, di samping program strategis Pemerintah dalam Asta Cita, peran swasta baik perusahaan besar maupun UMKM, ekonomi kreatif, sektor jasa ekonomi dan keuangan digital, dan pariwisata sangat penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kaitan ini, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan kepastian usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang tak kalah penting adalah terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membentuk kredibilitas bagi kinerja perekonomian Indonesia yang diakui secara internasional. Dalam kaitan ini, koordinasi erat antara kebijakan Pemerintah, kebijakan Bank Indonesia, dan kebijakan KSSK dalam menghadapi dinamika

geopolitik dan perekonomian global yang berubah cepat sebagai prasyarat dan landasan bagi keberhasilan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

V. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2026: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Arah bauran kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus ekonomi dan siklus keuangan Indonesia masih di bawah potensial dan sedang meningkat menuju optimal pada sekitar tahun 2027-2028. Dalam siklus ekonomi, hal ini tecermin pada prakiraan inflasi yang akan tetap terkendali pada sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027 mendatang, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas output nasional dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9% pada periode yang sama, sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya. Sementara dalam siklus keuangan, hal dimaksud tecermin pada tetap kuatnya stabilitas sistem keuangan dan prakiraan masih rendahnya pertumbuhan kredit di bawah optimal, yaitu 8-12% pada 2026 dan 9-13% pada 2027. Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan menuju Indonesia Emas.

Arah bauran kebijakan tersebut mendasari arah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang akan ditempuh Bank Indonesia pada tahun 2026 mendatang sebagai pelaksanaan mandat UU Bank Indonesia. Dengan prakiraan tetap rendahnya inflasi pada 2026 dan 2027, kebijakan moneter pada tahun 2026 akan diarahkan pada masih terbukanya ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (“*pro-growth*”) dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah (“*pro-*

Gambar 15. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2026



Sumber: Bank Indonesia

stability”) khususnya dari masih berlanjutnya ketidakpastian global (Gambar 15). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (*“pro-growth”*). Kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan, khususnya pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran akan terus diakselerasi sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dengan fokus pada penguatan infrastruktur (ritel, *wholesale*, dan data), konsolidasi industri, inovasi dan akseptasi, kerja sama internasional, serta pengembangan Digital Rupiah. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan

ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. Bank Indonesia akan senantiasa melakukan kalibrasi dari bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam perekonomian global maupun nasional.

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2026 akan diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap memanfaatkan masih terbukanya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti dijelaskan di atas, dengan prakiraan inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran ke depan dan pertumbuhan di bawah kapasitas potensial, masih terbuka ruang lebih lanjut pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh pada tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, tingginya ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026, baik karena dampak kebijakan tarif AS dan

geopolitik dunia, melambatnya dan melebarnya fragmentasi ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko pasar keuangan global, maupun semakin maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto dan aset keuangan digital oleh pihak swasta. Tingginya ketidakpastian perekonomian global ini perlu terus diwaspadai dan direspons dengan kebijakan yang tepat untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dalam memitigasi dampak negatifnya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Volatilitas aliran modal asing dan tekanan pada nilai tukar diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026, yang mengharuskan Bank Indonesia tetap mengarahkan kebijakan moneter juga pada stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap stabilitas perekonomian nasional. Dengan keharusan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dimaksud, kebijakan moneter pada tahun 2026 akan terus dilakukan secara konsisten, berhati-hati, dan terukur sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik untuk mencapai sasaran inflasi dan memanfaatkan ruang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027 mendatang.

Arah kebijakan moneter tahun 2026 untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh dengan empat instrumen pokok (Gambar 16). *Pertama*, kebijakan suku bunga secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. *Kedua*, ekspansi likuiditas moneter dengan strategi operasi moneter “*pro-market*” untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga BI-Rate ke suku bunga perbankan serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. *Ketiga*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dari dampak rambatan ketidakpastian global. *Keempat*, menjaga kecukupan cadangan devisa untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Gambar 16. Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

Pertama, kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, dengan tetap memanfaatkan ruang penurunan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti telah dijelaskan dalam Bab III, sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter BI-Rate sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps dari 6,25% pada September 2024 menjadi 4,75% pada September 2025, terendah sejak 2022. Selain itu, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 16-17 September 2025 juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga *Deposit Facility* lebih besar, yaitu sebesar 50 bps menjadi 3,75%, untuk lebih mendorong peran perbankan dalam memanfaatkan pelonggaran likuiditas bagi sektor riil. Ke depan, dengan pertimbangan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bank Indonesia memandang masih terbuka ruang bagi penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut. Pemanfaatan ruang penurunan lebih lanjut suku bunga BI-Rate akan didasarkan pada asesmen terhadap data dan kondisi yang berkembang (*data dependent*), khususnya dengan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak negatif berlanjutnya ketidakpastian global. Bank Indonesia juga akan terus menempuh langkah-langkah untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan BI-Rate khususnya pada penurunan suku bunga perbankan. Seperti dijelaskan pada Bab III, penurunan BI-Rate telah diikuti penurunan secara signifikan suku bunga INDONIA di pasar uang dan *yield* SBN di seluruh tenor, dan karenanya semakin meningkatkan transaksi, efisiensi, dan kedalaman pasar keuangan nasional. Namun demikian, penurunan suku bunga deposito perbankan masih berjalan lambat karena tingginya suku bunga deposito besar (*special rate*) dan demikian pula halnya penurunan suku bunga kredit antara lain karena masih tingginya premi risiko dan biaya *overhead* dalam pemberian kredit perbankan. Di samping penurunan BI-Rate dan terus menempuh

ekspansi likuiditas moneter, Bank Indonesia juga berkoordinasi erat dengan KSSK untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga perbankan tersebut untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Kedua, ekspansi likuiditas moneter dengan strategi operasi moneter “*pro-market*” terus diperkuat untuk efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Ekspansi likuiditas melalui program moneter diarahkan agar perkembangan likuiditas sesuai kebutuhan optimal di pasar uang dan di perekonomian. Besarnya didasarkan pada prakiraan jumlah Uang Primer (M0) dan uang beredar arti luas (M1 dan M2) yang sejalan dengan prakiraan indikator ekonomi yang relevan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti perkembangan aliran modal asing (*Net Foreign Asset*, NFA) dan operasi keuangan Pemerintah (*Net Claims on Government*, NCG). Berdasarkan program moneter tersebut, ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia melalui operasi moneter dengan mengoptimalkan struktur suku bunga dan volume seluruh instrumen yang tersedia, termasuk instrumen SRBI, SUKBI, SVBI, dan SUVBI. Pada tahun 2025, misalnya, ekspansi likuiditas moneter hingga November 2025 tercermin pada penurunan volume SRBI sebesar Rp217,67 triliun dengan penurunan suku bunga SRBI untuk tenor 6 bulan sebesar 254 bps menjadi 4,62%. Berdasarkan program moneter tersebut, ekspansi likuiditas moneter juga ditempuh Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Pada tahun 2025, seperti telah dijelaskan, Bank Indonesia hingga 18 November 2025 telah membeli SBN sebesar Rp289,91 triliun, dengan *yield* SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun sebesar 226 bps dan 113 bps menjadi 4,70% dan 6,13%, dan karenanya membantu penurunan beban bunga SBN dalam APBN Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan ekspansi likuiditas moneter sesuai program moneter tahun 2026, baik melalui seluruh instrumen moneter yang tersedia maupun melalui pembelian SBN dari pasar sekunder dengan koordinasi erat kebijakan fiskal Pemerintah.

Lebih dari itu, Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter “*pro-market*” untuk semakin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga BI-Rate ke sektor keuangan, serta menjaga stabilitas pasar dan sistem keuangan secara keseluruhan. Penguatan strategi operasi moneter “*pro-market*” antara lain dilakukan melalui empat langkah berikut. *Pertama*, optimalisasi transaksi repo dan DNDF dengan melibatkan bank-bank yang memanfaatkan *Central Counterparty* (CCP) guna memperkuat mitigasi risiko transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar. *Kedua*, pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) market melalui penerbitan *Floating Rate Note* (BI-FRN) dan *matchmaking* OIS untuk tenor di atas *overnight* guna membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang. Pengembangan OIS dilakukan mengingat penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan tidak dilanjutkan pada 2026. Hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan pasar uang domestik yang lebih baik dari sisi *pricing*. *Ketiga*, perluasan *underlying repo* dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk/didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Dan *keempat*, perluasan investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk penduduk dan bukan penduduk, sebagai bentuk penguatan instrumen moneter agar juga dapat digunakan untuk menarik *capital inflow*. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Ketiga, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global sehingga berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara fundamental, nilai tukar Rupiah seharusnya dapat bergerak menguat dan stabil sesuai dengan rendahnya inflasi, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian,

seperti dijelaskan di Bab I terdahulu, tingginya ketidakpastian di perekonomian dan pasar keuangan global meningkatkan risiko aliran keluar investasi portofolio dari negara-negara EMEs serta menekan berbagai mata uang dunia, termasuk Rupiah. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar Rupiah perlu terus dijaga untuk ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global dimaksud. Stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi terkendalinya inflasi, khususnya dari harga impor, dan kepastian usaha bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas Rupiah juga penting untuk turut menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan ABPN. Selain itu, stabilitas Rupiah juga menentukan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, khususnya risiko nilai tukar baik terhadap kondisi neraca perbankan maupun neraca korporasi, di samping penting pula untuk menjaga keyakinan pengusaha dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh selama ini oleh Bank Indonesia akan terus dilanjutkan dalam tahun 2026. Stabilisasi Rupiah dilakukan melalui intervensi valuta asing, baik di pasar luar negeri (*offshore* NDF) maupun di pasar domestik (secara *spot*, DNDF, dan transaksi SBN di pasar sekunder). Intervensi di *offshore* NDF yang telah dilakukan sejak awal April 2025 dari dampak negatif kebijakan tarif AS secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan AS melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri terbukti efektif dan karenanya akan terus dilanjutkan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping pergerakan Rupiah di pasar luar negeri itu berpengaruh besar ke dalam negeri, intervensi secara NDF lebih efisien karena jumlahnya relatif lebih kecil dan tidak mengharuskan pergerakan dana sehingga tidak banyak berdampak pada cadangan devisa.

Keempat, kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, dan diperkuat dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Kecukupan cadangan devisa akan terus ditingkatkan, baik dari surplus neraca pembayaran, operasi moneter valas, maupun melalui optimalisasi pengelolaannya.

Dalam kaitan ini, optimalisasi pengelolaan cadangan devisa terus diperkuat melalui penerapan *Strategic Asset Allocation* (SAA) untuk mencapai hasil investasi yang optimal serta memenuhi kebutuhan likuiditas untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping penempatan cadangan devisa pada aset keuangan berkualitas tinggi dengan risiko nilai tukar rendah, pembelian emas juga dilakukan secara aman, gradual, dan terukur. Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan perluasan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), guna mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kerja sama bilateral dengan sejumlah bank sentral, termasuk dengan Malaysia, India, dan Tiongkok, dijalin untuk pemanfaatan kerja sama *swap* dan pembelian SBN secara bilateral dalam pengelolaan cadangan devisa. Demikian pula kerja sama internasional juga dipererat, baik secara multilateral dengan BIS untuk pengelolaan devisa, kerja sama *swap* secara bilateral dengan sejumlah bank sentral termasuk AS, Jepang, Tiongkok, dan ASEAN, maupun kerja sama secara regional dengan ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan) dalam kerangka Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM) untuk penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) di Asia. Sebagai tindak lanjut UU P2SK, Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI tentang pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang konsisten dengan sistem devisa bebas dan kaidah internasional sesuai panduan yang diterbitkan IMF. Pengaturan dimaksud mencakup pengelolaan lalu devisa dalam baik kondisi normal, kondisi tekanan, maupun dalam kondisi krisis, serta mekanisme koordinasinya antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

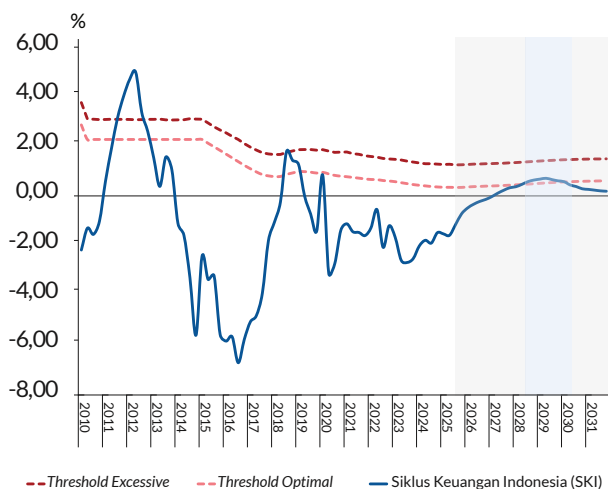
Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi kebijakan dalam menjaga ketahanan eksternal dari dampak global dilakukan dengan

keserasian operasi moneter Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan penerbitan SBN untuk pembiayaan fiskal oleh Pemerintah di pasar domestik dan global, mulai dari rencana tahunan hingga pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Koordinasi untuk pengendalian inflasi, khususnya *volatile food* dan *administered prices*, dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Garda Ketahanan Pangan Nasional (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP) dengan mengerahkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Sementara itu, koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi, dilakukan melalui sinkronisasi penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia melalui perbankan, dengan stimulus fiskal dari Pemerintah untuk menggerakkan sektor riil, baik di level pusat maupun daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh, termasuk berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah.

Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2026 untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial longgar ini ditempuh Bank Indonesia didasarkan pada tiga pertimbangan pokok. *Pertama*, siklus keuangan Indonesia pada tahun 2026 dan 2027 masih di bawah kapasitas pembiayaan optimal dan mulai meningkat pada akhir 2027, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2029 (Grafik 39.a). Hal ini sejalan dengan siklus ekonomi yang masih di bawah kapasitas output nasional terutama karena masih belum kuatnya permintaan konsumsi dan investasi, di tengah perlambatan ekspor karena ekonomi global. Karenanya, kebijakan makroprudensial longgar

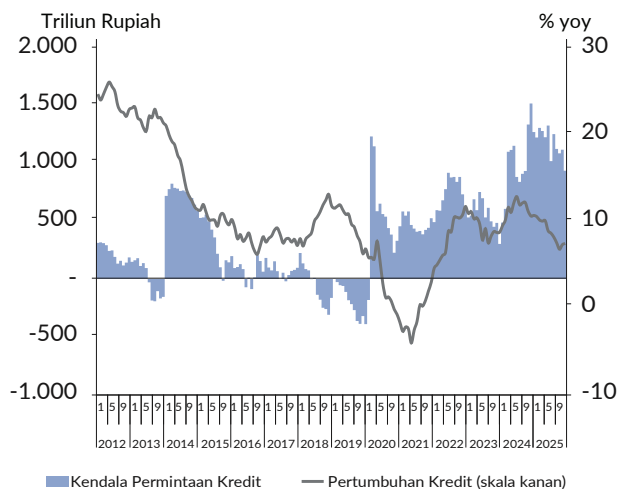
Grafik 39.a. Siklus Keuangan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

diperlukan untuk dorongan bagi kapasitas perbankan dalam penawaran kredit/pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pencipta pertumbuhan dan lapangan kerja. *Kedua*, Pemerintah sesuai Visi Asta Cita telah merancang sejumlah Program Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja yang memerlukan dukungan pembiayaan yang besar. Seperti dikemukakan dalam Bab IV, beberapa Program Strategis dimaksud mencakup hilirisasi SDA, penguatan industri manufaktur, ketahanan pangan, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan, termasuk perumahan rakyat. Program-program sosial dan ekonomi kerakyatan seperti MBG, KDMP, UMKM, dan ekonomi kreatif juga akan berlanjut. Karenanya, sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan industrial Pemerintah sangat penting untuk mengatasi kendala permintaan yang selama ini menyebabkan masih rendahnya kredit/pembiayaan dari perbankan (Grafik 39.b). Sinergi dimaksud menjadi bagian penting untuk memenuhi besarnya pembiayaan bagi program-program strategis nasional tersebut. *Ketiga*, kebijakan makroprudensial longgar tersebut juga konsisten dengan sehatnya stabilitas sistem keuangan, tecermin dari tingginya rasio kecukupan modal, longgarnya likuiditas, dan rendahnya kredit bermasalah. Namun demikian, sejumlah kerentanan dapat muncul baik dari dinamika ekonomi global maupun domestik, yang dapat berdampak pada tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan ke depan.

Grafik 39.b. Kendala Permintaan Kredit



Sumber: Bank Indonesia

Karenanya, diperlukan sinergi erat antara kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan tersebut dengan penguatan surveilans terhadap sistem perbankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Koordinasi erat dalam KSSK juga perlu diperkuat tidak saja untuk memelihara SSK tetapi juga mendorong kredit/pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian nasional yang besar, sekaligus sebagai implementasi reformasi sektor keuangan yang diamanatkan UU P2SK.

Seluruh instrumen kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mencapai pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan sekitar 8-12% pada tahun 2026 dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Pembahasan pada Bab II dan III menunjukkan bahwa masih rendahnya pertumbuhan kredit/pembiayaan terutama karena masih lambatnya penurunan suku bunga perbankan dan lemahnya permintaan kredit dari sektor riil. Sementara itu, sejumlah risiko atas stabilitas sistem keuangan (SSK) perlu tetap diwaspadai, baik karena dampak dari gejala global maupun risiko operasional terutama dari keamanan siber. Karena itu, arah kebijakan makroprudensial pada tahun 2026 akan ditempuh melalui tiga langkah berikut (Gambar 17). *Pertama*, penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) *forward looking lending*

Gambar 17. Arah Kebijakan Makroprudensial Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

channel dalam mendorong perilaku perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk penyesuaian sektor dan besarnya insentif yang diberikan, maupun sinergi dengan Pemerintah, KSSK dan pihak terkait termasuk Danantara dalam mendorong permintaan kredit dari sektor riil. *Kedua*, percepatan penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan melalui efektivitas KLM *forward looking interest channel* dan respons yang diperlukan, termasuk koordinasi KSSK dalam penurunan suku bunga deposito besar (*special rate*) dan penurunan margin suku bunga kredit. *Ketiga*, penguatan *surveilans* sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari dampak gejolak global dan risiko operasional, termasuk dengan penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil prioritas, penguatan ketahanan SSK, serta keberlanjutan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

Pertama, penguatan efektivitas insentif KLM *forward looking lending channel* dalam meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas

pertumbuhan dan lapangan kerja. Seperti dijelaskan pada Bab III, sebagai wujud komitmen kuat Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai Desember 2025 pemberian insentif KLM akan berbasis kinerja dan berorientasi ke depan melalui *lending channel* dan *interest rate channel* (Tabel 12). Besarnya insentif KLM secara total dinaikkan menjadi sebesar 5,5% dari DPK. Bank akan memperoleh insentif berdasarkan komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*) dan menurunkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Bank dapat menerima insentif KLM *lending channel* dengan penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif KLM *interest rate channel* paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK. Adapun sektor yang mendapat insentif KLM *lending channel* terdiri dari (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Besaran

Tabel 12. Besaran Insentif KLM: *Lending Channel* dan *Interest Rate Channel*

Lending Channel

Kelompok	Tiering Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan (%yoy)	KLM (%)	
		Pangsa Kredit/Pembiayaan (%)	
		Di bawah/sama dengan Threshold	Di atas Threshold
		≤10%	>10%
Sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi	>0-3%	1,3%	1,4%
	>3-7%	1,4%	1,5%
	>7%	1,5%	1,5%+
Sektor Jasa, termasuk Ekraf		≤2%	>2%
	≤0%	-	0,4%
	>0-6%	0,4%	0,5%
	>6-12%	0,5%	0,6%
	>12%	0,6%	0,6%+
Sektor Perumahan		≤2%	>2%
	≤0%	-	1,2%
	>0-3%	1,2%	1,3%
	>3-7%	1,3%	1,4%
	>7%	1,4%	1,4%+
Sektor UMKM, Koperasi, Inklusi dan Berkelanjutan		≤2%	>2%
	≤0%	-	1,4%
	>0-4%	1,4%	1,5%
	>4%	1,5%	1,5%+

Interest Rate Channel

Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru dengan BI-Rate	Insentif KLM (%) Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah
<0,3	-
≥0,3 s.d <0,6	0,4%
≥0,6	0,5%

Sumber: Bank Indonesia

insentif yang diberikan kepada bank pada *lending channel* juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya. Sementara, pemberian insentif KLM jalur suku bunga kredit/pembiayaan (*interest rate channel*) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dari waktu ke waktu akan terus melakukan asesmen atas efektivitas insentif likuiditas KLM tersebut untuk semakin mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas tersebut. Selain melalui kebijakan, Bank Indonesia juga akan lebih aktif dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, Danantara, perbankan, dan dunia usaha untuk mendorong permintaan

kredit. Sinergi dapat dilakukan dengan diskusi, komunikasi dan seminar untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi berbagai kendala penyaluran kredit, baik pada sektor-sektor tertentu maupun secara agregat, sekaligus memperkuat keyakinan dan optimisme akan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.

Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti dikemukakan di atas, lambatnya penurunan suku bunga perbankan menjadi salah satu faktor kendala efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan kredit. Penyebabnya adalah fenomena suku bunga deposito spesial yang diminta para deposan besar, yang pangsaanya pada Oktober 2025 sebesar Rp2.656,79 triliun (27% dari

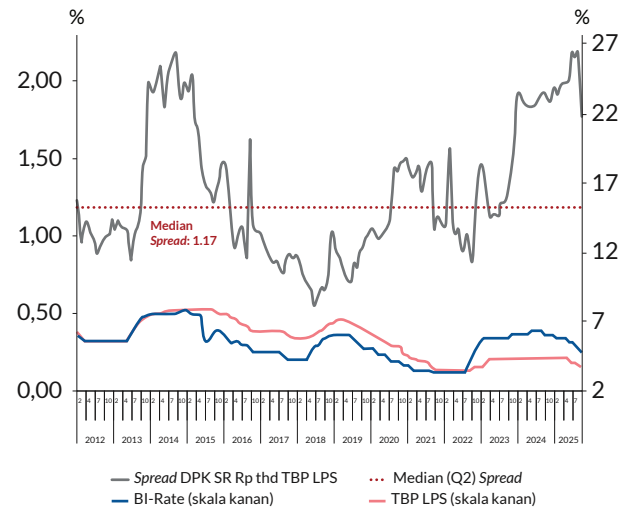
Tabel 13. *Special Rate* per Deposita Besar

Kelompok	Nominal (Triliun Rupiah)				Pangsa terhadap Total DPK (%) Okt-25	Suku Bunga Special Rate (%) - Rupiah			
	2023	2024	Sep-25	Okt-25		2023	2024	Sep-25	Okt-25
Bukan Penduduk	3,87	5,67	6,07	7,07	6,80	5,14	5,34	5,22	5,17
Pemerintah	447,02	468,56	705,10	817,16	52,88	6,77	6,66	5,53	5,10
Pemerintah BUMN	255,33	272,34	309,02	331,15	51,28	6,84	6,60	5,97	5,58
Pemerintah Non BUMN	191,69	196,22	396,08	486,01	54,02	6,69	6,74	5,19	4,78
Perseorangan	462,42	402,29	417,66	415,68	10,47	5,87	5,97	5,73	5,50
Swasta KNB	165,78	218,31	242,87	262,48	52,13	6,40	6,36	5,86	5,40
Swasta Non KNB	761,01	975,31	1178,12	1154,40	31,78	5,85	6,02	5,39	5,13
Total	1840,10	2070,14	2549,83	2656,79	27,23	6,13	6,19	5,53	5,21

Sumber: Bank Indonesia

total DPK) dengan suku bunga deposito mencapai 5,21% (Tabel 13). Lebih dari itu, deposito Pemerintah (BUMN dan Non-BUMN) berjumlah Rp817,16 triliun dengan suku bunga deposito sekitar 5,10%. Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi pada bekerjanya mekanisme pasar karena daya tawar para deposito besar yang lebih kuat terhadap bank di tengah struktur industri perbankan yang lemah karena terlalu banyaknya jumlah bank. Akibatnya, terjadi inefisiensi baik dalam industri perbankan maupun ekonomi karena biaya dana yang terlalu besar. Hal ini tercermin dari besarnya *spread* antara suku bunga deposito spesial dengan maksimum suku bunga penjamin LPS dengan median sekitar 1,17% sejak tahun 2012 dan bahkan meningkat menjadi 1,71% pada Oktober 2025 (Grafik 40). Inefisiensi di industri perbankan juga tercermin dari tingginya *spread* suku bunga kredit dari suku bunga deposito, baik karena premi risiko kredit maupun biaya *overhead* yang besar, dibandingkan dengan negara-negara lain. Permasalahan ini yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan insentif KLM yang besarnya dikaitkan dengan kecepatan penurunan suku bunga kredit dibandingkan dengan penurunan BI-Rate seperti dijelaskan di atas. Artinya, bank-bank yang lambat penurunan suku bunganya akan diwajibkan memelihara GWM yang lebih tinggi di Bank Indonesia, sebaliknya insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang lebih cepat penurunan suku bunganya. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi efektivitas KLM *forward looking interest channel*

Grafik 40. *Spread Special Rate* – LPS Rate



Sumber: Bank Indonesia

ini terhadap kecepatan penurunan suku bunga perbankan, dan merumuskan respons penguatan yang diperlukan. Bank Indonesia juga akan terus menjalin koordinasi KSSK untuk menempuh langkah-langkah bersama yang diperlukan untuk mempercepat penurunan suku bunga deposito besar (*special rate*) dan penurunan margin suku bunga kredit.

Ketiga, penguatan surveilans sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari risiko gejolak global dan risiko operasional, termasuk melalui penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Surveilans sistemik Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari pengawasan makroprudensial memfokuskan pada bank-bank besar yang dari sisi keterkaitan makroekonomi-sektor keuangan dinilai sangat berpengaruh dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan SSK secara keseluruhan. Sejumlah aspek penting dalam surveilans sistemik Bank Indonesia mencakup kinerja kredit/pembiayaan, ketahanan terhadap risiko likuiditas, risiko pasar (nilai tukar dan *yield* SBN), risiko kredit, risiko operasional, serta interkoneksi dalam pendanaan, pasar uang, dan sistem pembayaran. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan di atas, dampak rambatan global dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar Rupiah secara berlebihan, kenaikan *yield* SBN yang tinggi, keketatan likuiditas karena pelarian modal ke luar negeri, dan penurunan aktivitas dunia usaha. Risiko operasional, termasuk mitigasi serangan siber, juga akan menjadi

perhatian utama. Hal ini mempertimbangkan semakin cepatnya digitalisasi di perbankan dan sistem pembayaran yang dapat menimbulkan tidak saja risiko operasional karena gangguan teknologi ataupun serangan siber di suatu bank yang dapat secara cepat merambat ke bank-bank lain. Pertimbangan inilah yang mendorong Bank Indonesia memperkuat Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT), yang mengintegrasikan pemantauan kerentanan dan pencegahan risiko terhadap SSK baik karena risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit tersebut dengan risiko kelembagaan yang dapat muncul dari risiko operasional termasuk serangan siber. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan KSSK baik untuk bersama menjaga stabilitas sistem keuangan maupun secara bilateral dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Karenanya, Bank Indonesia akan memperkuat sinergi surveilans makroprudensial terhadap sistem perbankan dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK sesuai dengan mekanisme koordinasi yang telah berjalan baik selama ini. Koordinasi ini penting untuk memitigasi risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga), risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional agar stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara. Koordinasi erat

dalam KSSK juga perlu diperkuat untuk memelihara SSK tersebut sekaligus penguatan implementasi reformasi sektor keuangan yang diamanatkan UU P2SK.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia mengacu pada peta jalan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030* akan terus mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) bagi generasi mendatang. BSPI 2030 dibangun untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang mendukung integrasi EKD nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Visi BSPI 2030 akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif, yaitu **Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD)**, yang sekaligus menjadi strategi utama (Gambar 18). *Pertama*, Penguatan dan modernisasi Infrastruktur baik ritel, *wholesale*, maupun data sistem pembayaran. *Kedua*, Konsolidasi dan penataan struktur Industri. *Ketiga*, Perluasan Inovasi dan akseptasi digital. *Keempat*, Perluasan interkoneksi dan kerja sama Internasional. *Kelima*, Pengembangan Rupiah Digital.

Gambar 18. Lima Inisiatif *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030*



Sumber: Bank Indonesia

Kelima strategi utama ini telah dijabarkan ke dalam program-program utama beserta tahapan dan waktu penyelesaiannya.

Arah kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2026 menjadi komitmen dalam mewujudkan program strategis dalam BSPI 2030 yang diarahkan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi selama ini untuk lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti terlihat pada Tabel 8 pada bagian kedua di atas, sasarannya untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital yakni dari 49,2 miliar transaksi dengan nilai Rp78.563,1 triliun pada tahun 2025 menjadi 63 miliar transaksi (30,0%) dengan nilai Rp88.310,7 triliun (12,4%) pada tahun 2026. Transaksi QRIS naik dari 15,4 miliar transaksi pada 2025 menjadi 17,0 miliar transaksi (10,6%) dengan jumlah pengguna naik menjadi 60 juta pengguna dan 45 juta *merchant* yang sebagian besar *merchant* UMKM pada 2026. Layanan BI-FAST naik dari 4,8 miliar transaksi pada 2025 menjadi 6,3 miliar transaksi (29,8%) pada 2026, sementara transaksi BI-RTGS naik dari 10,28 juta dengan nilai Rp149.344,0 triliun pada 2025 menjadi 10,32 juta transaksi (0,3%) dengan nilai Rp166.015,0 triliun (9,0%) pada 2026.

Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2026 ini akan dilakukan melalui lima langkah pokok.

Pertama, dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia akan melakukan pengembangan New BI-FAST dan *fast payment* industri, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran yang saling 3i (interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas) untuk perumusan kebijakan, pengembangan bisnis industri, dan kepentingan publik (Gambar 19). *Kedua*, dari sisi konsolidasi Industri, Bank Indonesia akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran pada perbankan sebagai lembaga utama dan mendorong *interlink* antara bank dan *fintech*, dan reformasi regulasi untuk konsolidasi industri sistem pembayaran dan penataan Industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) agar integritas pembayaran lebih kuat. *Ketiga*, dari sisi Inovasi dan akseptasi digital, Bank Indonesia berkolaborasi dengan ASPI untuk inovasi dan akseptasi pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia/PIDI (termasuk pengembangan *digital talent* Indonesia), kampanye, dan edukasi-literasi masyarakat. *Keempat*, dari sisi Internasionalisasi pembayaran, Bank

Gambar 19. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

Indonesia akan memperluas kerja sama internasional sistem pembayaran ritel secara bilateral dan secara multilateral dalam pengembangan NEXUS. *Kelima*, dari sisi pengembangan Rupiah Digital, Bank Indonesia akan melanjutkan tahap eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada pengembangan *Securities Ledger*.

Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel, nilai besar, dan data akan diarahkan untuk interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i) digitalisasi transaksi pembayaran, konsolidasi industri, inovasi dan akseptasi, dan internasionalisasi EKD nasional. Dari sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia akan mengembangkan New BI-FAST bersinergi dengan infrastruktur *fast payment* oleh industri untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi digital di masa mendatang, baik stabilitasnya maupun skalabilitasnya dengan konstruksi arsitektur sistem modular dalam aplikasi untuk proses *enquiry*, kliring, dan setelmen pembayaran (Gambar 20). Konstruksi arsitektur ini juga dipandang lebih mampu merespons pengembangan fitur layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Untuk infrastruktur sistem pembayaran nilai besar, modernisasi BI-RTGS akan dirancang terintegrasi dengan pengembangan

infrastruktur pasar uang dan pasar valas dengan pengadopsian format ISO 20222, pengembangan fitur *multicurrency*, dan pengembangan fitur lain yang memperkuat aspek 3i dengan infrastruktur pasar keuangan secara menyeluruh. Pengembangan fitur *multicurrency* berguna untuk mengefisienkan setelmen, baik di domestik maupun *cross-border*. Pengadopsian ISO 20222 bertujuan untuk mengefisienkan transaksi Rupiah dan valas dengan lebih *seamless* dan granularitas lebih tinggi. Penguatan manajemen risiko juga akan diperkuat melalui penguatan fitur *Liquidity Saving Mechanism* (LSM), termasuk juga fitur *fraud management/end point security*. Bank Indonesia juga akan memulai pembangunan pusat data untuk memastikan aliran data sistem pembayaran secara *end-to-end* dari konsumen ke *merchant*, industri bank dan nonbank, hingga penyelesaiannya di infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia. Hal ini penting guna menjamin keberlangsungan tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas harga, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Infrastruktur data sistem pembayaran ini akan dibangun untuk penguatan integritas transaksi dan perumusan kebijakan melalui pengembangan Payment ID, BI-Payment Info, dan BI-Payment Clear. Payment ID akan berperan sebagai

Gambar 20. Arah Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel, Nilai Besar, dan Data dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia

identitas unik untuk setiap pelaku pembayaran (*payment unique identifier*) sehingga memudahkan sistem perolehan dan pengolahan data digital secara granular untuk kepentingan perumusan kebijakan, pengembangan bisnis oleh industri, dan untuk layanan publik. Hasil olahan data itu akan diunggah dalam platform BI-Payment Info sebagai infrastruktur publik dari Bank Indonesia yang menyediakan produk data olahan sistem pembayaran digital untuk kepentingan nasional. Dalam kaitan ini, BI-Payment Clear dapat mengakses data transaksi mencurigakan dari BI-Payment Info yang dikembangkan untuk menjaga layanan transaksi pembayaran aman dari kecurangan (*fraud*) dengan memperkuat kapasitas industri dalam manajemen risiko. Melalui BI-Payment Clear akan terhubung dengan *fast payment*, transaksi pembayaran ritel daring dapat dikurasi integritasnya terlebih dahulu dari keabsahan dan keamanannya sebelum diselesaikan pada infrastruktur *fast payment*. Pelaku industri dapat melakukan *flagging* dan menolak transaksi yang mencurigakan atau terduga *fraud*.

Kedua, kebijakan struktur industri sistem pembayaran ke depan diarahkan untuk memperkuat struktur industri yang sehat, kompetitif, dan menjamin fungsi

pengedaran uang oleh bank sentral. Penataan Industri sistem pembayaran menitikberatkan pada peran perbankan sebagai poros peredaran uang (*money supply process*) dalam sistem moneter dan sistem keuangan yang akan berjalan efektif (Gambar 21). Untuk itu, Bank Indonesia telah merumuskan kriteria yang mengukur tingkat kontribusi dan manajemen risiko pelaku industri yang terdiri dari Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI). Penilaian atas TIKMI suatu pelaku industri akan dievaluasi secara berkala sebagai acuan dalam persyaratan izin, pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama bisnis, akses kepesertaan pada infrastruktur sistem pembayaran, dan acuan pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung pembangunan SDM kompeten di bidang sistem pembayaran dengan program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain itu, Bank Indonesia turut menata industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk meningkatkan integritas transaksi valuta asing. Hal ini dilakukan untuk mencegah KUPVA BB sebagai sarana tindakan pencucian uang atau transaksi tidak tercatat. Penataan

Gambar 21. Arah Konsolidasi Industri Sistem Pembayaran dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia

membantu memperkuat KYC, pelaporan, dan pengawasan agar arus valuta asing yang masuk–keluar lebih terpantau.

Ketiga, Bank Indonesia berkolaborasi dengan industri akan terus mendorong inovasi dan akseptasi sistem pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Inovasi layanan pembayaran akan didorong dalam koridor persaingan usaha yang sehat yang menjamin proses integrasi EKD secara *end-to-end*. Standardisasi metode pembayaran pada sisi instrumen dan kanal pembayaran akan difokuskan pada jenis inovasi yang berpotensi diadopsi secara masif berdasarkan prinsip satu bahasa. Di samping mencegah risiko persaingan usaha yang tidak sehat, standardisasi ini juga ditempuh untuk menjamin berlangsungnya proses integrasi EKD secara *end-to-end* yang menjadi sasaran akhir BSPI 2030. Proses kolaboratif yang efektif bersama pelaku industri dioptimalkan melalui pembentukan PIDI (Gambar 22). PIDI akan dikembangkan dalam 3 (tiga) pilar fungsionalitas; (1) *in-depth sandboxing* atau ruang uji coba inovasi yang efektif; (2) *market*

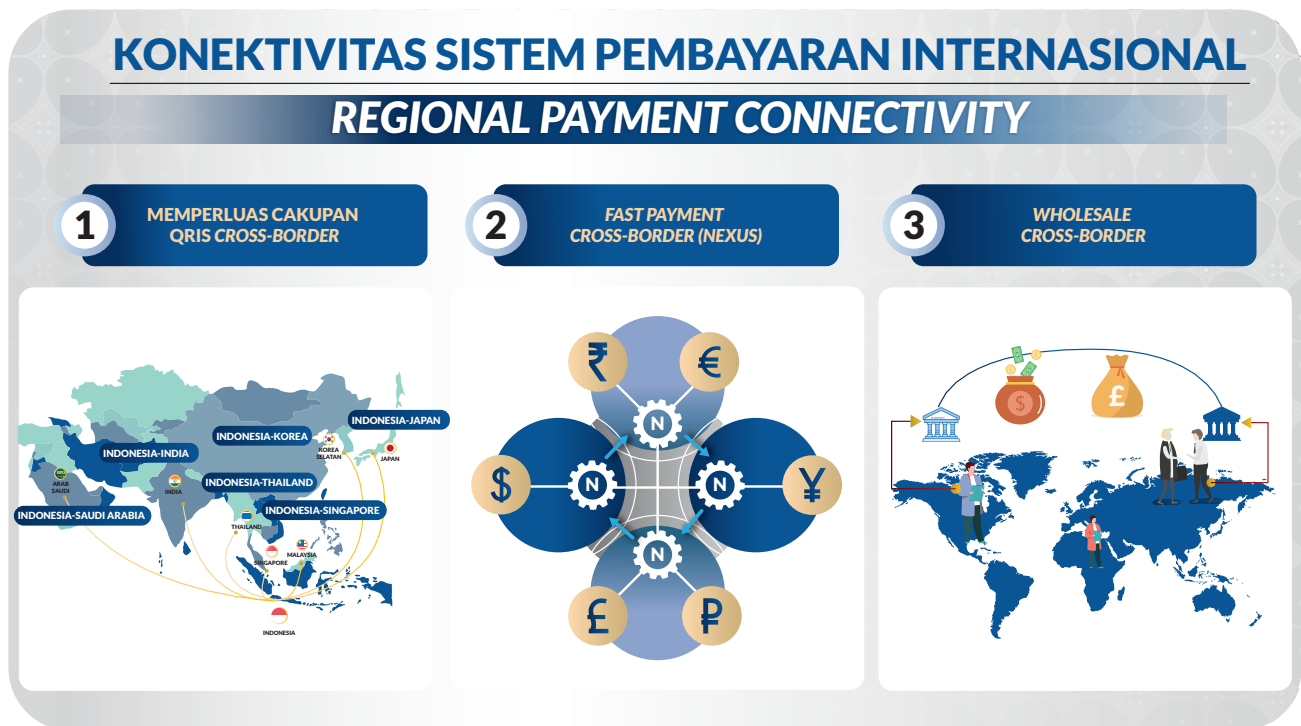
intelligence atau monitoring perkembangan industri; dan (3) *design thinking* atau proses iteratif, termasuk riset/asesmen berkolaborasi dengan industri dan dapat melibatkan pakar di bidangnya. Selain itu, PIDI akan mendukung pengembangan inovasi digital yang berdaya saing global dan juga penguatan talenta digital yang diharapkan mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan fungsi tersebut akan mengakomodasi upaya memastikan aspek perlindungan konsumen, stabilitas, termasuk manajemen risiko, integritas atau *compliance* dan kompetisi yang sehat. Sementara itu, akseptasi digital yang telah berjalan efektif pada beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan dan diperkuat melalui program sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk mengakselerasi adopsi yang seimbang dengan pemenuhan manajemen risiko dan perlindungan konsumen, khususnya pada sisi pengguna. Demikian pula, penguatan perlindungan konsumen akan ditempuh melalui penguatan kerangka regulasi hingga perancangan mekanisme yang dapat menjembatani kebutuhan seluruh elemen (masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri sistem pembayaran). Kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai konsumen layanan pembayaran juga akan diperkuat melalui berbagai program literasi digital di atas.

Gambar 22. Pengembangan Inovasi Sistem Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 23. Arah Konektivitas Sistem Pembayaran Internasional dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia

Keempat, Bank Indonesia akan memperluas kerja sama internasional untuk konektivitas sistem pembayaran antarnegara guna mendukung integrasi ekonomi di kawasan, khususnya di regional ASEAN. Konektivitas pembayaran antarnegara sangat penting untuk memudahkan transaksi ekonomi-keuangan lintas negara, menjaga stabilitas, dan membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mendahulukan kepentingan nasional (Gambar 23). Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: (1) memperluas cakupan kerja sama QRIS antarnegara; dan (2) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antar negara. Kerja sama QRIS antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang akan diperluas ke Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Konektivitas transaksi pembayaran antarnegara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran, baik secara bilateral maupun multilateral. Pada sisi ritel, Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral melalui Project Nexus bersama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India dengan melibatkan Bank for International Settlements (BIS). Bank Indonesia terlibat secara aktif dalam

pengembangan Project Nexus Phase III dengan menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral lima negara ASEAN dan India dalam *use case* remitansi. Untuk konektivitas infrastruktur sistem pembayaran nilai besar, modernisasi BI-RTGS seperti dikemukakan di atas juga akan mulai disiapkan sejak awal untuk dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan interkoneksi antar negara di masa depan. Interkoneksi RTGS juga telah menjadi agenda G20 yang didorong melalui inisiatif *enhancing cross-border payments*, yang perlu diantisipasi sejak awal menimbang posisi Indonesia sebagai anggota G20.

Kelima, Bank Indonesia akan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital pada tahap eksperimen lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Inisiatif eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia atau “Rupiah Digital” dipayungi oleh Proyek Garuda dengan tujuan untuk: (i) menjaga kedaulatan Rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK; (ii) memperkuat peranannya di kancah internasional; dan (iii) mengakselerasi integrasi EKD secara nasional (Gambar 24). Implementasi Proyek Garuda dibagi

Gambar 24. Arah Pengembangan Rupiah Digital dalam BSPI 2030



Sumber: Bank Indonesia

ke dalam 3 (tiga) tahapan. Pada tahap pertama (*immediate*), pengembangan dimulai dengan w-Digital Rupiah untuk *use case* penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana antarpihak yang telah selesai dilakukan. Pada tahun 2026, tahapan eksperimentasi akan difokuskan pada uji coba pemanfaatan sekuritas digital melalui proses tokenisasi dalam *use case* operasi moneter dan transaksi keuangan lainnya. Pada tahap akhir (*end state*), konsep *integrated end-to-end* w-Digital Rupiah to r-Digital Rupiah akan diujicobakan.

Selain kelima program pokok di atas, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun industri sistem pembayaran. Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong penyaluran bansos, dan memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah. Digitalisasi UMKM dan pariwisata juga akan semakin digencarkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan

Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di berbagai daerah. Sinergi dan koordinasi pengaturan dan pengawasan terhadap digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi lembaga keuangan oleh OJK akan semakin dipererat sebagai amanat dari UU P2SK, termasuk terhadap aset kripto dan Industri Teknologi Sistem Keuangan (ITSK), literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, serta keamanan siber. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi *fintech*, dan asosiasi lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada masyarakat luas. Telah menjadi prinsip Bank Indonesia bahwa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan sistem pembayaran dirumuskan dan dilaksanakan bersama industri (*industry friendly policy*).

Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) terus berperan penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia, stabilitas sistem

keuangan, dan pembiayaan fiskal dan perekonomian.

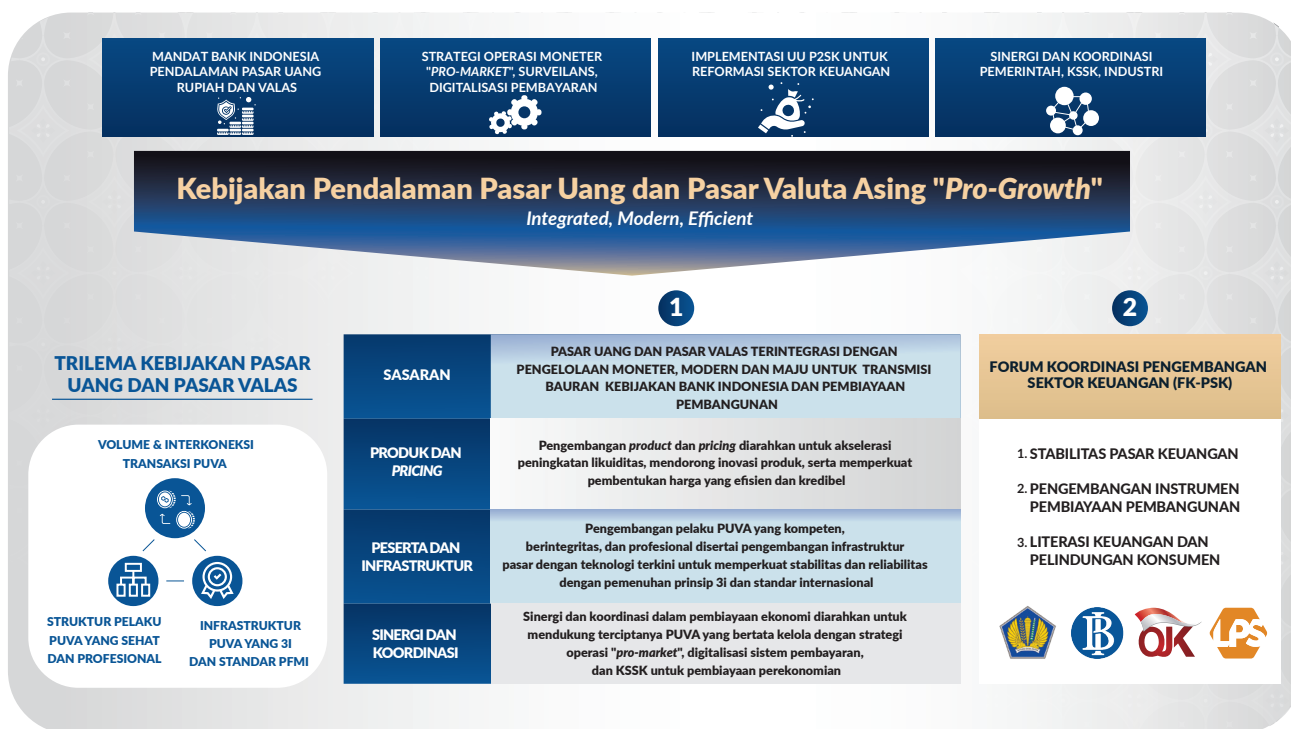
Sejak diluncurkan pada tahun 2024, *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) tahun 2030 yang merupakan kelanjutan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 telah secara konsisten mendorong berbagai pencapaian strategis dalam upaya pendalaman PUVA mencakup seluruh aspek *product*, *pricing*, *participant*, dan infrastruktur (3P+I). Pendalaman PUVA secara menyeluruh pada aspek 3P+I menjadi landasan fundamental bagi penguatan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan operasi moneter “*pro-market*” Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong perekonomian. Pengelolaan likuiditas serta portofolio aset perbankan dan para investor pada gilirannya juga akan lebih efisien dan fleksibel, sehingga turut memperkuat stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pasar SBN yang berkembang juga berperan penting dalam mendukung kemudahan pembiayaan fiskal Pemerintah. Dengan demikian, PUVA yang semakin dalam dan efisien berkontribusi pada kelancaran manajemen likuiditas serta penyediaan sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar, sehingga mendukung ketahanan dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030 dirumuskan sebagai peta jalan strategis menuju pendalaman PUVA yang modern dan maju, guna mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, selaras dengan mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU P2SK. Arah transformasi PUVA dalam BPPU 2030 merupakan penguatan dari inisiatif BPPU 2025, khususnya terkait integrasi dengan strategi OM *pro-market*, penetapan sasaran strategis yang lebih terukur pada aspek 3P+I, pengembangan infrastruktur PUVA yang berlandaskan prinsip 3i dan terintegrasi dengan infrastruktur data SP PUVA, serta penegasan aspek pengaturan dan pengawasan PUVA berdasarkan kaidah dan praktik terbaik internasional. Pengembangan produk akan diutamakan pada peningkatan transaksi repo dan DNDF dengan sasaran rerata harian masing-masing menjadi Rp30 triliun dan 1 miliar dolar AS pada

tahun 2030 didukung dengan upaya perluasan *underlying* repo Bank Indonesia dan penerbitan BI-FRN. Langkah strategis tersebut juga dilakukan untuk mendorong pengembangan produk derivatif baik suku bunga seperti *Overnight Index Swap* (OIS) maupun nilai tukar seperti *FX Swap*. Aspek *pricing* diarahkan untuk pembentukan *term-structure* harga produk-produk PUVA dimaksud yang efisien dari tenor 2 minggu hingga 12 bulan dengan pembentukan *Money Market Curve* dan *FX Forward Curve*, interkoneksi transaksi antara Dealer Utama PUVA dan peserta pasar lain yang semakin besar dan aktif, didukung infrastruktur CCP PUVA yang 3i dengan *Electronic Trading Platform* (ETP) di pasar, ETP dan BI-SSSS di Bank Indonesia, dan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST dan BI-RTGS sejalan dengan inisiatif integrasi infrastruktur data SP PUVA.

Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing pada tahun 2026 akan tetap “*pro-growth*” melalui terwujudnya pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2026 akan difokuskan pada 5 (lima) program utama berikut ini (Gambar 25). *Pertama*, pengembangan produk Repo sejalan dengan upaya peningkatan volume dan likuiditas pasar sekunder SRBI, SUKBI, dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)/Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sekaligus mendukung pembentukan pasar *Overnight Index Swap* (OIS) dan *Foreign Exchange Swap* (FX Swap), untuk efektivitas transmisi moneter, stabilitas Rupiah, *hedging*, serta manajemen likuiditas jangka pendek. *Kedua*, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga (INDONIA, OIS, dan *repo*), nilai tukar (DNDF), dan *hedging* (IRS dan FX Swap). *Ketiga*, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui penguatan Dealer Utama PUVA dan penguatan peran Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam implementasi strategi operasi moneter dan pengembangan PUVA termasuk

Gambar 25. Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2026



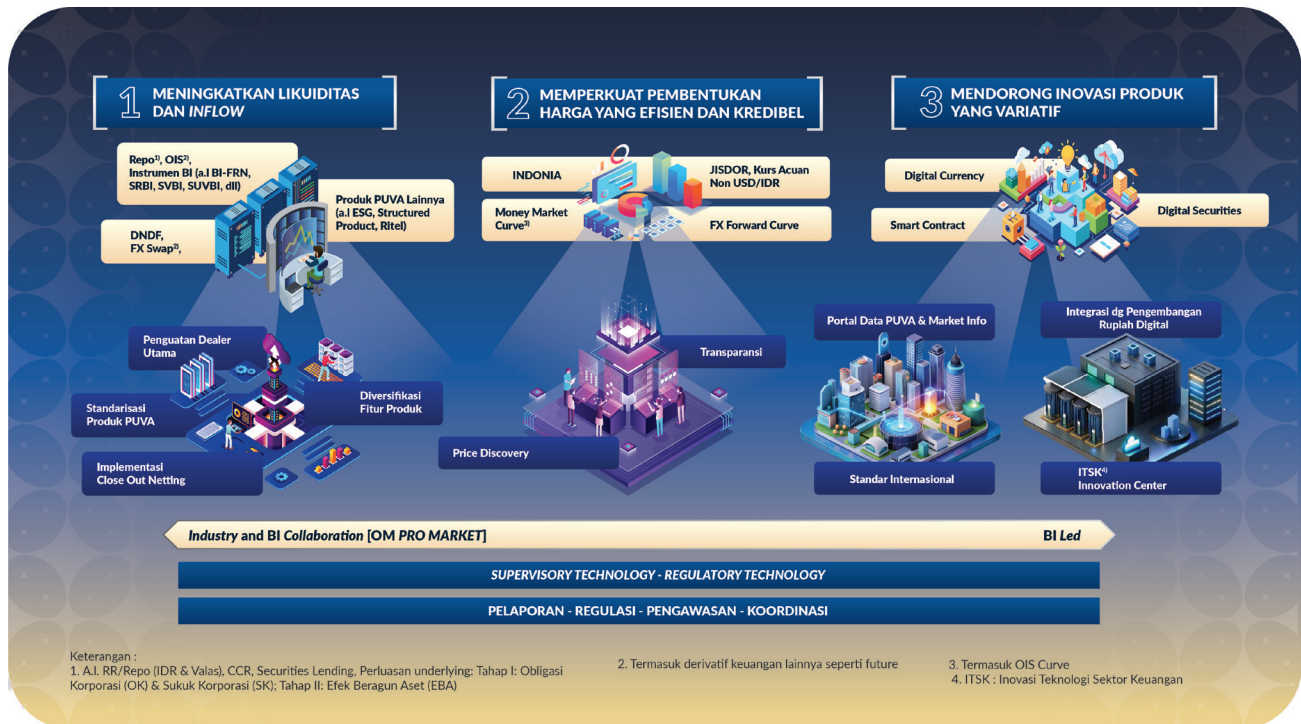
Sumber: Bank Indonesia

dalam peningkatan kualitas pelaku PUVA dan penerapan kode etik pasar. *Keempat*, pengembangan infrastruktur pasar uang, operasi moneter, dan sistem pembayaran yang saling 3i melalui implementasi infrastruktur data SP PUVA, sekaligus sebagai fondasi untuk mendukung penerbitan Digital Rupiah mencakup digital aset. *Kelima*, sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola.

Pertama, pengembangan *product* dan *pricing* diarahkan untuk akselerasi peningkatan likuiditas, mendorong inovasi produk, serta memperkuat pembentukan harga yang efisien dan kredibel. Di pasar uang, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi dan likuiditas antara lain pada transaksi repo melalui inisiatif perluasan *underlying* repo Bank Indonesia menggunakan obligasi korporasi dan sukuk korporasi serta penerbitan BI-FRN sebagai *floating rate instrument* untuk mendukung pembentukan pasar *Overnight Index Swap* (OIS) (Gambar 26). Upaya tersebut selaras dengan pengembangan *pricing* yang efisien dan kredibel dengan referensi suku bunga INDONIA serta pembentukan *term-structure* suku

bunga dari 2 minggu hingga 12 bulan. Di pasar valas, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas DNDF dan FX Swap didukung dengan upaya perluasan kontrak standar penerapan margin. Pada aspek *pricing*, penguatan JISDOR dan kurs acuan non-USD/IDR sebagai referensi nilai tukar yang efisien dan kredibel terus dilakukan didukung dengan pembentukan *term-structure* nilai tukar dari 2 minggu hingga 12 bulan. Pengembangan produk dan *pricing* di PUVA akan diselaraskan dengan strategi operasi moneter "pro-market" untuk peningkatan likuiditas instrumen *floating* berbasis INDONIA untuk mendukung pembentukan *Money Market Curve*, dan transaksi FX Swap dan FX Forward untuk mendukung pembentukan FX Forward Curve sebagai referensi harga di pasar. Peningkatan likuiditas repo dan DNDF di PUVA juga akan didorong melalui pengembangan infrastruktur a.l. ETP, MO, dan CCP serta penguatan peran Dealer Utama sebagai *market maker* pada pasar uang dan pasar valuta asing, diversifikasi fitur dan standarisasi produk, serta perluasan basis pelaku berkoordinasi dengan otoritas dan APUVINDO.

Gambar 26. Arah Pengembangan Product & Pricing dalam BPPU 2030

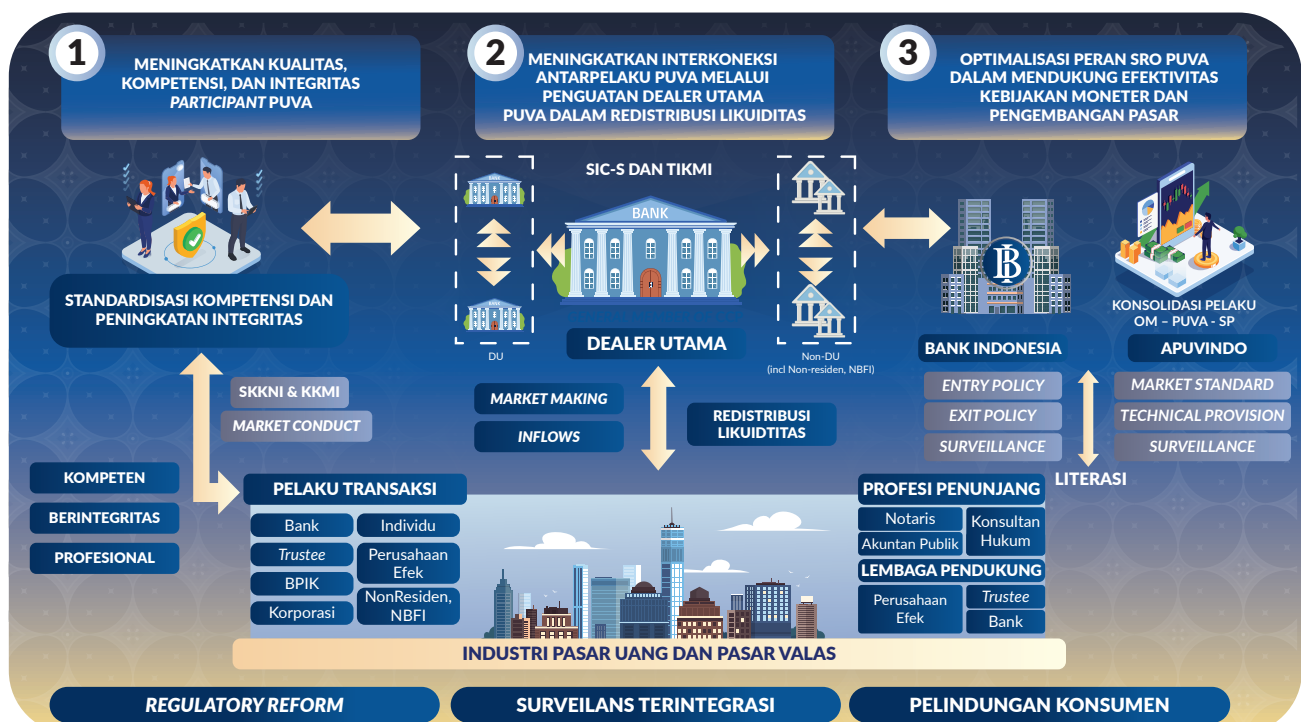


Sumber: Bank Indonesia

Kedua, pengembangan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional disertai dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dengan infrastruktur data SP PUVA, untuk memperkuat stabilitas dan reliabilitas dengan

memenuhkan prinsip 3i dan standar internasional. Melalui kolaborasi dengan APUVINDO, Bank Indonesia terus menguatkan langkah dalam pengembangan PUVA termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya pelaku pasar (Gambar 27). Pengembangan

Gambar 27. Arah Pengembangan Pelaku dalam BPPU 2030



Sumber: Bank Indonesia

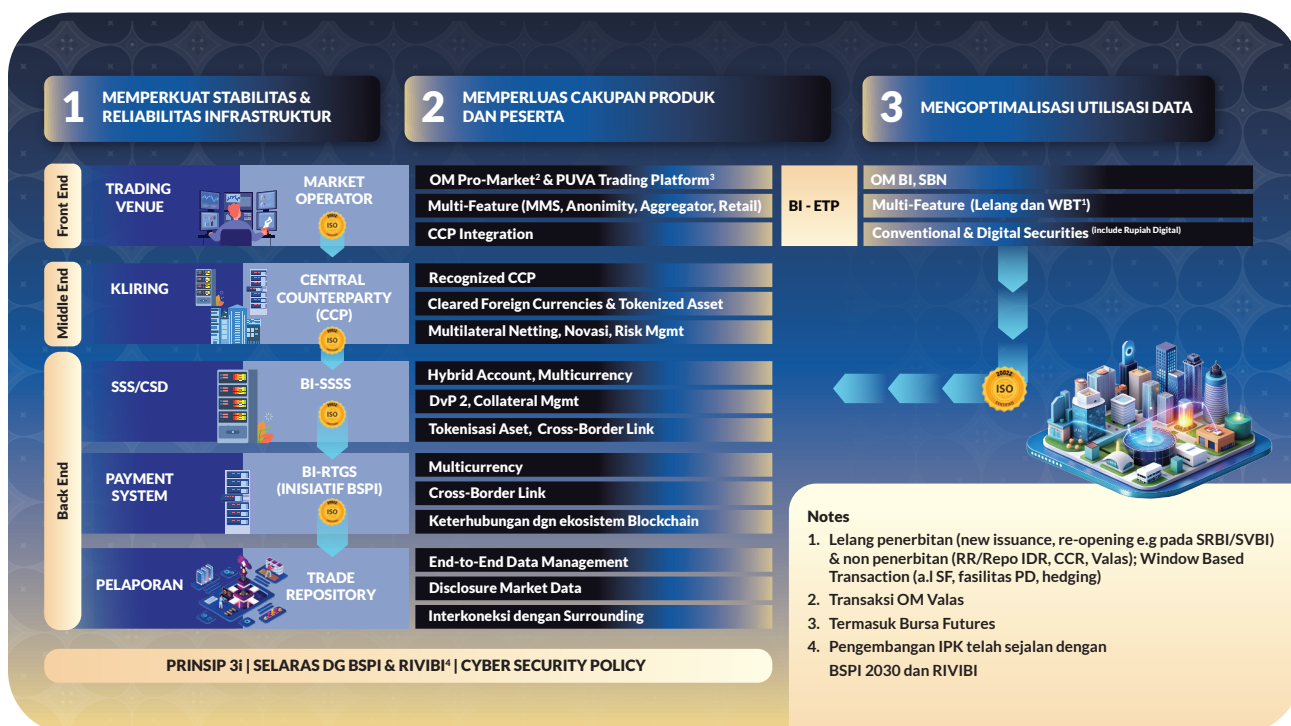
kompetensi dilakukan melalui penyempurnaan standarisasi sertifikasi kompetensi profesi tresuri. Penguatan kode etik pasar diinisiasi dengan penyempurnaan “Market Code of Conduct” (MCoC) dan “Islamic Financial Market Code of Conduct” (ICoC) sebagai panduan kode etik pasar untuk pelaku PUVA oleh Bank Indonesia selaras dengan praktik terbaik di internasional dan perkembangan terkini.

Sementara itu, penguatan infrastruktur PUVA mencakup 3 (tiga) sisi yang terdiri dari *front-end*, *middle-end*, dan *back-end* (Gambar 28). *Pertama*, pada sisi *front-end* dilakukan melalui penguatan *trading venue* yang mencakup BI-ETP dan *Market Operator* (MO) khususnya untuk mendukung strategi OM *pro-market* dan mendorong peningkatan transaksi repo, DNDF, dan OIS. Kemudian, pada sisi *middle-end* dilakukan penguatan dan pengembangan CCP PUVA antara lain (1) inisiasi perolehan *recognized* CCP, (2) interkoneksi CCP dengan sarana transaksi lain, dan (3) pengembangan CCP Repo. Terakhir, sisi *back-end* mencakup strategi penguatan pada SSS/CSD melalui pengembangan BI-SSSS untuk mendukung OM *pro-market*, pengembangan BI-SSSS Generasi III serta integrasi dengan *payment system*

melalui pengembangan BI-RTGS yang telah dirumuskan dalam BSPI 2030. Pengembangan infrastruktur PUVA juga akan menerapkan standar *messaging* internasional, seperti ISO 20022, pada (1) BI-RTGS Generasi III; (2) BI-SSSS Generasi III; (3) *Trade Repository*; dan (4) *Central Counterparty* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi, sekaligus mempersiapkan untuk proses digitalisasi PUVA ke depan. Penguatan infrastruktur PUVA juga akan diintegrasikan dengan infrastruktur data SP PUVA mencakup pengembangan (1) BI-Payment Clear, (2) BI-Payment Info, (4) pengembangan infrastruktur *data capturing* dan *data analytics* sampai dengan pemanfaatannya untuk berbagai *use case*, (4) integrasi Payment ID dengan Investor ID, serta (5) *trade repository*. Berbagai inisiatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur pasar yang saling terinterkoneksi, serta memiliki interoperabilitas dan terintegrasi untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju memiliki volume dan likuiditas yang besar, segmen pelaku yang variatif, pasar yang stabil dan efisien.

Ketiga, sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi diarahkan untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola. Sinergi dengan strategi

Gambar 28. Arah Pengembangan Infrastruktur dalam BPPU 2030



Sumber: Bank Indonesia

operasi moneter “*pro-market*” dan surveilans makroprudensial diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, stabilitas pasar dan infrastruktur serta pembentukan harga yang efisien sesuai *market conduct*. Strategi dilakukan pada pengembangan produk dan harga, pelaku dan infrastruktur, serta harmoni pengaturan antara operasi moneter, pendalaman PUVA, dan surveilans moneter-*market* dengan makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan sesuai kaidah internasional dalam koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK. Sementara itu, sinergi dengan Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) sebagai pelaksanaan dari UU P2SK Pasal 11 antara Kementerian Keuangan dalam pengembangan pasar obligasi Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan, Bank Indonesia dalam pendalaman PUVA, OJK dalam pengembangan pasar modal, serta LPS dalam penjaminan dana masyarakat. Sinergi dalam Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) sebagai amanat UU P2SK Pasal 224 untuk koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan untuk ekonomi hijau dan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan antara Kementerian Keuangan dalam pembiayaan proyek dan program Pemerintah, Bank Indonesia dalam perumusan kebijakan makroprudensial dan pengembangan PUVA, dan OJK dalam pembiayaan melalui perbankan dan pasar modal. Dengan pembentukan FK-PSK tersebut, sinergitas pengembangan sektor keuangan menjadi lebih kuat dan efisien sehingga dapat secara *end-to-end* mencakup bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam perekonomian.

Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperluas serta memperkuat perannya dalam mendorong percepatan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan

berkelanjutan. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing. Selain itu, Bank Indonesia juga menitikberatkan pada optimalisasi pembiayaan, literasi, dan sinergi di bidang ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan yang terus diperluas. *Pertama*, untuk meningkatkan daya saing, Bank Indonesia akan terus memperkuat model bisnis, pedoman, dan berbagai bentuk fasilitasi, termasuk pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) yang mencakup peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar termasuk *supply chain*. Kegiatan ini dilaksanakan secara *end to end* dengan sasaran utama UMKM berorientasi ekspor, UMKM pendukung pariwisata, klaster pangan, kelompok subsisten, serta komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan produk unggulan daerah lainnya. Sebagai wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan, Bank Indonesia juga akan menyusun pedoman UMKM sirkular di antaranya berbasis pemanfaatan limbah plastik, daun nanas, dan sampah organik, serta melaksanakan *pilot project* UMKM berkelanjutan. Penguatan daya saing juga mencakup penyusunan model bisnis UMKM hijau yang lebih komprehensif. Inisiatif ini diperkuat dengan pengembangan Kalkulator Hijau versi 2 untuk mengukur kinerja keberlanjutan usaha. *Kedua*, untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, *business matching* pembiayaan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Lembaga Keuangan, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan konvensional, tetapi juga diarahkan pada perluasan akses pembiayaan hijau, termasuk persiapan rencana fasilitasi infrastruktur pendukung pembiayaan hijau (termasuk laporan berkelanjutan). Upaya perluasan akses pembiayaan ini didukung oleh platform BI-SAID (*Database Profil UMKM Potensial Dibiayai*) yang memudahkan lembaga keuangan untuk mengakses data UMKM layak dibiayai secara langsung. Selain itu, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) terus dikembangkan untuk memudahkan UMKM melakukan pencatatan keuangan secara digital. *Ketiga*, literasi dan sinergi juga terus diperluas melalui

penerapan KLIK (Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan), modul edukasi terstandarisasi, serta program edukasi dan pendampingan berkelanjutan di berbagai daerah. Sinergi antarprogram akan terus diperluas, termasuk melalui *flagship* program Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai wadah sinergi lintas *stakeholders* dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Sinergi juga semakin diperkuat melalui komitmen strategis antara Bank Indonesia dan berbagai Kementerian/Lembaga, yang diwujudkan dalam Nota Kesepahaman sebagai landasan kerja sama yang kokoh dan langkah nyata untuk mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Tidak hanya domestik, Bank Indonesia pun akan terus secara aktif memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional, seperti G20-SFWG, *Blue Finance Advisory Committee*, ASEAN WC-FINC, dan APRACA, guna memperluas kolaborasi, memperkuat representasi nasional, serta mendorong adopsi praktik ekonomi hijau dan inklusif yang selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) akan tetap diutamakan pada sektor unggulan, yaitu makanan halal (*halal food*), fesyen (*modest fashion*), dan pariwisata ramah muslim. Penguatan ekosistem HVC dalam jangka pendek (2027) dilakukan melalui pengembangan *piloting* model bisnis kemandirian ekonomi syariah termasuk pesantren, *piloting halal trading house*, perluasan *halal center*, serta fasilitasi akses pasar bagi ekosistem haji dan umroh. Adapun untuk jangka menengah (2028–2031) penguatan ekosistem HVC akan dilakukan melalui rangkaian fasilitasi akses pasar untuk sektor unggulan eksyar dan perluasan sertifikasi halal. Selain itu, pengembangan ekosistem HVC akan dilakukan pada sektor farmasi sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam penguatan ekosistem eksyar di Indonesia. Upaya ini diharapkan

mampu mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas jangkauan dan daya saing produk halal nasional. Dari sisi keuangan syariah komersial, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah dalam jangka pendek (2027) dilakukan melalui pengembangan model bisnis pembiayaan yang mendukung sektor unggulan eksyar sekaligus *Values-Based Economy*, pelaksanaan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), penguatan kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor unggulan eksyar, dan kebijakan terkait *primary dealer* (PD) syariah. Selanjutnya untuk jangka menengah (2028–2031), akan dilakukan melalui inovasi Keuangan Syariah mendukung *Values-Based Economy* menyesuaikan perkembangan industri (antara lain *blended finance*), penguatan dan perluasan pelaksanaan BPS, dan implementasi PD Syariah. Penyesuaian ini juga diiringi dengan penguatan arah pertumbuhan dan proyeksi pembiayaan perbankan syariah agar tetap selaras dengan dinamika ekonomi nasional dan kebutuhan pembiayaan sektor prioritas. Selanjutnya, perluasan literasi dan inklusi eksyar akan terus dilakukan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek (2027), fokus diarahkan pada penguatan fondasi melalui pemanfaatan data ZISWAF terintegrasi, implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) sebagai payung kebijakan nasional, serta mendorong inovasi pembentukan lembaga pendukung inklusi dalam rangka memperluas alternatif pembiayaan syariah. Pada saat yang sama, survei literasi dan inklusi eksyar untuk mengukur capaian, serta sinergi program lintas K/L dan pusat-daerah terus diperkuat, termasuk kampanye nasional eksyar yang terintegrasi. Sementara untuk jangka menengah (2028–2031), kebijakan difokuskan pada akselerasi dan perluasan dampak, antara lain melalui penguatan implementasi SNLIEKSI, pengembangan model bisnis sektor riil dan keuangan syariah, serta pemanfaatan digitalisasi dan *big data analytics* untuk memperkuat strategi literasi dan inklusi yang berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di tingkat global, Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk

mendukung penguatan *leadership* Bank Indonesia pada *fora* internasional syariah melalui keterlibatan aktif dalam mendukung penyusunan standar keuangan syariah global bersama Islamic Financial Services Board (IFSB) dan pengembangan likuiditas keuangan syariah bersama International Islamic Liquidity Management (IILM).

Kebijakan Internasional

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan berkoordinasi erat dengan Pemerintah untuk semakin memperkuat posisi Indonesia baik secara bilateral, di kawasan regional Asia, maupun global. Kebijakan internasional ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari dampak global dengan menjalin kerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan internasional Bank Indonesia antara lain meliputi aspek bauran kebijakan bank sentral dan ekonomi nasional, *Local Currency Transaction* (LCT), serta promosi perdagangan dan investasi yang bersinergi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Pada tahun 2026, kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) fokus utama. *Pertama*, penguatan dan perluasan kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra utama Indonesia di bidang kebanksentralan, sistem pembayaran, LCT, dan kerja sama keuangan internasional seperti *swap* bilateral (*Bilateral Swap Arrangement*, BSA). *Kedua*, penguatan kerja sama regional terutama *ASEAN Financial Integration*, *ASEAN Payments Connectivity* (APC), dan penguatan Chiang-Mai Initiative Multilateralism (CMIM) yang merupakan kerja sama keuangan regional ASEAN+3. *Ketiga*, partisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional baik di G20, IMF, Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), maupun dalam forum internasional syariah IFSB dan IILM. Selain itu, pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga *rating* maupun promosi perdagangan dan

investasi terus ditingkatkan melalui *Investor Relation Unit* Bank Indonesia, baik IRU (Nasional), RIRU (Daerah), dan GIRU (global), dengan memperkuat peran kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah dan luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat kepemimpinan institusional dengan menjadi *Chair* dalam forum kerja sama internasional, serta meraih penghargaan internasional di bidang bauran kebijakan, penelitian, inovasi, kelembagaan, kepemimpinan, serta digitalisasi sistem pembayaran dan pengedaran uang.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan bank sentral negara mitra utama terkait perumusan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta kerja sama sistem pembayaran, LCT dan keuangan internasional. Kerja sama bilateral yang telah terjalin dengan bank-bank sentral negara Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, AS, Inggris, Prancis, dan India akan terus diperluas ke negara-negara lain. Kerja sama sistem pembayaran melalui interoperabilitas QR dan *FAST Payments* dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang akan diperluas dengan Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Arab Saudi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, UAE, Tiongkok, Singapura, dan India juga akan terus diperluas. Perluasan dilakukan baik kepada negara mitra baru, cakupan transaksi untuk meliputi perdagangan dan investasi, investasi portofolio dan transaksi pembayaran, maupun dari jumlah bank peserta yang ditunjuk. Dalam rangka mendukung LCT, Bank Indonesia melakukan perjanjian *swap* bilateral dalam mata uang lokal dengan Bank Negara Malaysia (senilai 24 miliar ringgit Malaysia atau Rp82 triliun), Bank of Korea (10,7 triliun won Korea Selatan atau Rp115 triliun), People's Bank of China (senilai 400 miliar Yuan Tiongkok atau Rp878 triliun), Monetary Authority of Singapore (senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun), dan Reserve Bank of Australia (senilai 10 miliar dolar Australia atau Rp100 triliun). Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral untuk memperkuat kemampuan

cadangan devisa dalam menghadapi dampak negatif gejolak global antara lain melalui perjanjian BSA dengan Bank of Japan (senilai 22,76 miliar dolar AS) dan *Bilateral Repo Line* (BRL) dengan *Monetary Authority of Singapore* (senilai 3 miliar dolar AS).

Kebijakan Transformasi Kelembagaan

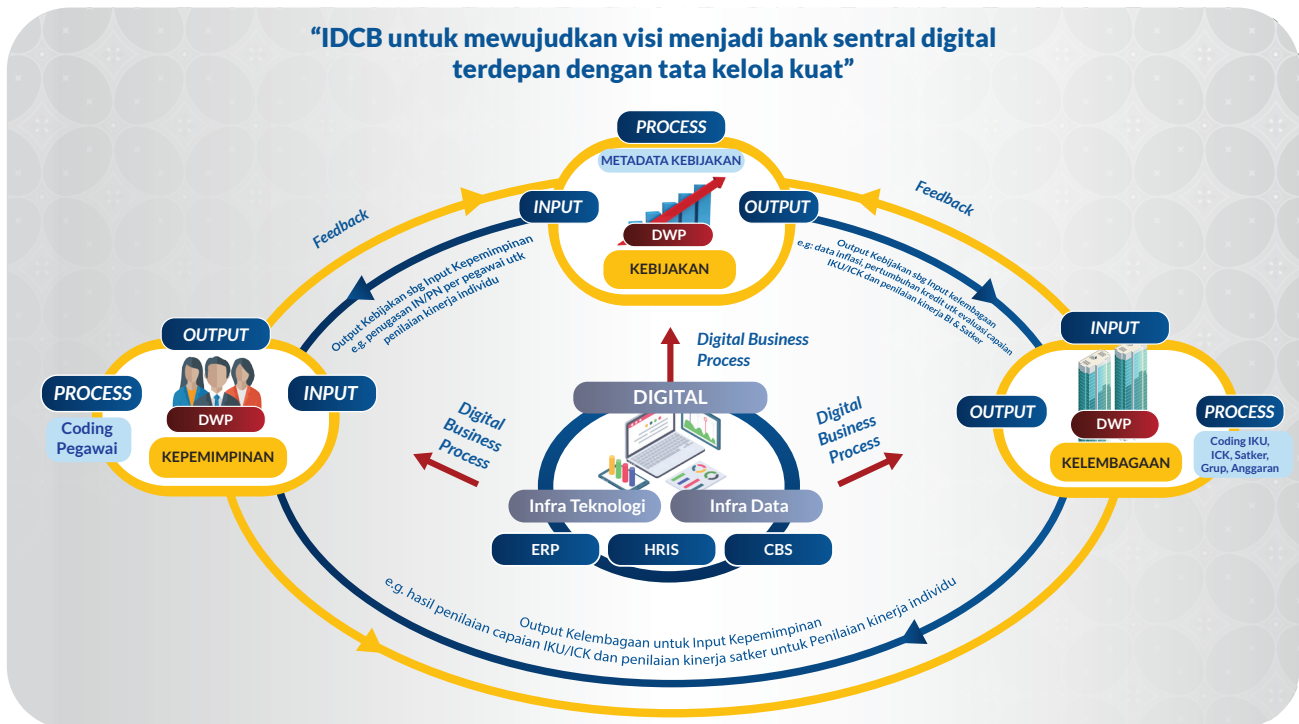
Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan program transformasi kelembagaan dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi kelembagaan akan terus diperkuat dan dipertajam, terutama dalam rangka mengimplementasikan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU P2SK. Ke depan, transformasi kelembagaan akan terus berfokus pada 3 (tiga) area utama. *Pertama*, penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. *Kedua*, penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work* dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence*. *Ketiga*, penguatan sumber daya manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition*. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan.

Pertama, Bank Indonesia terus melakukan penguatan fungsi organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan berkepatuhan. Penguatan dan penyempurnaan organisasi senantiasa dilaksanakan berbasis strategi (*strategy-driven*) dengan memperhatikan *framework* atau kerangka kerja pada masing-masing area, sekaligus memperhatikan kesinambungan antara struktur organisasi dan proses bisnis. Upaya tersebut juga mencakup penerapan praktik terbaik (*best practices*), serta pemanfaatan infrastruktur dan teknologi secara adaptif sesuai kebutuhan. Seluruh inisiatif penguatan dan penyempurnaan organisasi dimaksud dilandasi

oleh prinsip 3S, yaitu Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi. Penguatan fungsi organisasi ke depan akan difokuskan antara lain pada asesmen penguatan fungsi organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, sejalan dengan implementasi penyempurnaan *framework* kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Penyempurnaan fungsi organisasi ini diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yaitu inflasi daerah yang rendah dan stabil, peningkatan akses pembiayaan, serta velositas yang cepat, mudah, dan murah didukung struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan mandat Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, Bank Indonesia akan terus melakukan transformasi digital untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Bank Indonesia terus melakukan pengembangan *decision making process* dan *business process reengineering* secara terintegrasi di area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam *Integrated Digital Central Bank* (IDCB) (Gambar 29). Pengembangan IDCB telah didukung dengan tata kelola dan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui pengembangan platform *digital workplace* (DWP). Pengembangan aplikasi DWP tengah dilakukan untuk cakupan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Bulanan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Mingguan, dan akan diimplementasikan secara bertahap untuk memperkuat proses kerja perumusan kebijakan Bank Indonesia. Pengembangan IDCB juga memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi proses bisnis. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas inovasi data berbasis AI/ML di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pengembangan AI dan ML tersebut dilakukan mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing*

Gambar 29. Arah Pengembangan *Integrated Digital Central Bank (IDCB)*



Sumber: Bank Indonesia

the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning) agar terintegrasi optimal dalam proses bisnis. Melanjutkan pengembangan digitalisasi pengambilan keputusan dan proses kerja di area kebijakan, ke depan Bank Indonesia juga akan terus memperkuat digitalisasi proses kerja, khususnya di area kelembagaan. Penguatan digitalisasi di area kelembagaan akan berfokus pada pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk penguatan aplikasi DWP untuk mendukung pengambilan keputusan di area kelembagaan. Pengembangan IDCB akan terus didukung dengan kesiapan aspek *process*, *people*, dan *technology* untuk mewujudkan “one input, one process, multi-purposes” dengan mengedepankan tata kelola, serta didukung oleh sistem informasi secara *end-to-end* dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ketiga, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memperkuat sumber daya manusia agar memiliki kepemimpinan yang profesional, berkinerja tinggi, dan berakhlak mulia. Pengembangan SDM Bank Indonesia akan terus difokuskan pada

penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan “*strategic spiritual leadership*” dengan kompetensi tinggi (*book-smart*), pengalaman kuat (*street-smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual-smart*). Di samping itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi pemenuhan dan pemeliharaan SDM melalui penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Hal ini menjadi salah satu prioritas transformasi kebijakan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pegawai Bank Indonesia, meliputi program remunerasi kompetitif, pemeliharaan kesehatan dengan fokus pada kesehatan fisik, dan pensiun tenang dengan fokus pada program pensiun berkah. Sejalan dengan visi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas bank sentral, terutama untuk mendukung pola pikir dan kemampuan teknis digital, seperti pemanfaatan *artificial intelligence*. Upaya transformasi SDM ini akan terus dilakukan untuk memastikan tersedianya SDM yang adaptif, memiliki kepemimpinan kuat, serta mampu bekerja secara optimal dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

VI. Melangkah ke Depan: Sinergi Menuju Indonesia Emas

Sinergi adalah kunci ekonomi Indonesia untuk **TANGGUH** dan **MANDIRI** dalam menghadapi gejolak global serta mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi erat dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan KSSK dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi yang telah berjalan baik dengan DPR-RI khususnya Komisi XI,

perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak. Inovasi bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran didukung dengan kebijakan pendalaman pasar uang, kebijakan internasional, dan program pengembangan ekonomi inklusif dan hijau, terus dikembangkan.

Sebagai penutup, mari kita terus bersinergi melangkah ke depan menuju Indonesia Emas.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, kesempurnaan, dan keberkahan kepada bangsa dan negara Indonesia dan kepada kita semua.

Sekian, terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 28 November 2025

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA